

LAPORAN KEUANGAN

**UAPPA ESELON I
BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BAHASA**

**Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2023 (Audited)**



Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun,
Jakarta Timur

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA) Tahun 2023 ini dapat disusun dengan baik. Laporan Keuangan ini disusun memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA) Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pimpinan satuan kerja guna pengambilan keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta,

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,



E. Aminudin Aziz

NIP196711161992031001


Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	6
II. Neraca.....	7
III. Laporan Operasional.....	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
A.1. Dasar Hukum	10
A.2. Kebijakan Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	49
A.4. Basis Akuntansi	49
A.5. Dasar Pengukuran.....	49
A.6. Kebijakan Akuntansi	50
B. Penjelasan Pos-PoS Laporan Realisasi Anggaran	57
B.1. Pendapatan.....	58
B.2. Belanja	61
B.3. Belanja Pegawai	63
B.4. Belanja Barang	65
B.5. Belanja Modal.....	66
B.5.1 Belanja Modal Tanah.....	68
B.5.2 belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	68
B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68
B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	69
B.5.5 Belanja Modal Lainnya	69
B.6. Belanja Bantuan Sosial.....	69
C. Penjelasan atas Pos-PoS Neraca	70
C.1. Aset Lancar	70
C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	70

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	71
C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	71
C.1.4 Piutang Bukan Pajak	72
C.1.5 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	72
C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	73
C.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	73
C.1.8 Beban Dibayar Dimuka.....	74
C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....	75
C.1.10 Persediaan	75
C.2. Aset Tetap	76
C.2.1 Tanah.....	78
C.2.2 Peralatan dan Mesin.....	78
C.2.3 Gedung dan Bangunan.....	82
C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	85
C.2.5 Aset Tetap Lainnya	86
C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	87
C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	90
C.3. Piutang Jangka Panjang	91
C.3.1 Piutang Tagihan TP/TGR	91
C.3.2 Tagihan Penjualan Angsuran	91
C.3.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	91
C.4. Aset Lainnya	91
C.4.1 Aset Tak Berwujud	92
C.4.2 Dana yang Dibatasi Penggunaannya.....	95
C.4.3 Aset Lain-Lain	95
C.4.4 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	96
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	97
C.5.1 Uang Muka dari KPPN	98
C.5.2 Utang kepada Pihak Ketiga	98
C.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka	99
C.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya.....	99
C.7. Ekuitas.....	99
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	100
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	100

D.2.	Beban Pegawai	101
D.3.	Beban Persediaan	102
D.4.	Beban Barang dan Jasa	102
D.5.	Beban Pemeliharaan	103
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	104
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	105
D.8.	Beban Bantuan Sosial	106
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	106
D.10.	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	107
D.11.	Kegiatan Non Operasional	107
D.12.	Pos Luar Biasa	107
E.	Penjelasan atas Pos-PoS Laporan Perubahan Ekuitas	108
E.1.	Ekuitas Awal	108
E.2.	Surplus (Defisit) LO	109
E.3.	Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	109
E.4.	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	109
E.4.1	Penyesuaian Nilai Aset	109
E.4.2	Koreksi Nilai Persediaan.....	109
E.4.3	Koreksi atas Reklasifikasi.....	110
E.4.4	Selisih Revaluasi Aset.....	110
E.4.5	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	110
E.4.6	Koreksi Lain-lain	111
E.5.	Transaksi antar Entitas.....	112
E.5.1	DDEL/DKEL	112
E.5.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	112
E.5.3	Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	114
E.6.	Ekuitas Akhir	114
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	115
F.1.	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	115
F.2.	Pengungkapan Lain-Lain	115
VI.	Lampiran	

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 2	:	Ringkasan Neraca	3
Tabel 3	:	Kriteria Kualitas Piutang	55
Tabel 4	:	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	56
Tabel B	:	Revisi Anggaran 2023	57
Tabel B.1	:	Rincian Realisasi Pendapatan	58
Tabel B.2	:	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022	61
Tabel B.2.1		Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022	62
Tabel B.3	:	Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022	63
Tabel B.4	:	Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022	65
Tabel B.5	:	Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022	67
Tabel C.1	:	Rincian Aset Lancar per Desember 2023 dan 2022	70
Tabel C.1.1	:	Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022	71
Tabel C.1.2	:	Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022	71
Tabel C.1.3	:	Perbandingan kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022	72
Tabel C.1.4	:	Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022	72
Tabel C.1.5	:	Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2022 dan 2021	73
Tabel C.1.7	:	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jk. Pendek	74
Tabel C.1.8	:	Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022	74
Tabel C.1.10	:	Rincian Persediaan Per Desember 2023 dan 2022	75
Tabel C.2	:	Rincian Aset Tetap per Desember 2023 dan 2022	77
Tabel C.2.7	:	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	90
Tabel C.4	:	Rincian Aset Lainnya	92
Tabel C.4.4	:	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	97
Tabel C.5	:	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	97
Tabel C.5.2	:	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	98

Tabel C.5.3	:	Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023	99
Tabel D.1	:	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Desember 2023 dan 2022	100
Tabel D.2	:	Rincian Beban Pegawai Tahun Per Desember 2023 dan 2022	101
Tabel D.3	:	Rincian Beban Persediaan Per Desember 2023 dan 2022	102
Tabel D.4	:	Rincian Beban Barang dan Jasa Per Desember 2023 dan 2022	103
Tabel D.5	:	Rincian Beban Pemeliharaan Per Desember 2023 dan 2022	104
Tabel D.6	:	Rincian Beban Perjalanan Dinas Per Desember 2023 dan 2022	105
Tabel D.7	:	Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per Desember 2023 dan 2022	106
Tabel D.9	:	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Desember 2023 dan 2022	107
Tabel D.11	:	Rincian Kegiatan Non Operasional Per Desember 2023 dan 2022	107
Tabel E.1	:	Perbandingan Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Periode Desember 2023 dan 2022	108
Tabel E.4.4	:	Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023	110
Tabel E.4.6	:	Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023	111
Tabel E.5.3	:	Pengesahan Hibah Langsung TA 2023	114

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023
- Lampiran 2 Neraca UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Per 31 Desember 2023
- Lampiran 3 Laporan Operasional UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Periode 31 Desember 2023
- Lampiran 4 Laporan Perubahan Ekuitas UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Periode 31 Desember 2023
- Lampiran 5 Neraca Percobaan Basis Kas Tingkat Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Per 31 Desember 2023
- Lampiran 6 Neraca Percobaan Basis Akrual Tingkat Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Per 31 Desember 2023
- Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran Belanja UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 menurut Jenis Belanja/Akun
- Lampiran 8 Laporan Realisasi Anggaran Belanja UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 menurut Wilayah/Satker
- Lampiran 9 Laporan Realisasi Anggaran Belanja UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 menurut Wilayah/Jenis Belanja
- Lampiran 10 Laporan Realisasi Anggaran Belanja UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan
- Lampiran 11 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 menurut Akun
- Lampiran 12 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 menurut Wilayah/Satker
- Lampiran 13 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 menurut Wilayah/Akun
- Lampiran 14 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Menurut Sumber Dana/Jenis Belanja/Akun UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan

DAFTAR LAMPIRAN

Bahasa Tahun 2023

- | | |
|-------------|--|
| Lampiran 15 | Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Covid-19 Menurut Jenis Belanja/Akun Tahun 2023 |
| Lampiran 16 | Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2022 |
| Lampiran 17 | Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal Satker Pusat dan Daerah di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 dengan KPPN |
| Lampiran 18 | Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Modul Persediaan, Modul Aset, dan Modul GLP per 31 Desember 2023 |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA) Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun TA 2023 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,

E. Aminudin Aziz

NIP196711161992031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA) Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2023 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4.085.276.071 atau mencapai 2199,34% dari estimasi Pendapatan – LRA sebesar Rp185.750.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp538.953.306.544 atau mencapai 98,26% dari alokasi anggaran sebesar Rp548.474.648.000.

Tabel 1
Ringkasan Laporan Ralisasi Anggaran
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	CATATAN	2023		% thd Angg	2022		% Thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		Anggaran	REALISASI	
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	185.750.000	4.085.276.071	2199,34%	1.276.740.000	3.392.230.308	266%
JUMLAH PENDAPATAN							
		185.750.000	4.085.276.071	2199,34%	1.276.740.000	3.392.230.308	266%
BELANJA							
Belanja Pegawai	B.3	144.721.742.000	142.781.333.797	98,66%	143.313.729.000	140.941.480.977	98,34%
Belanja Barang	B.4	335.778.603.000	328.249.674.322	97,76%	366.079.589.000	356.955.557.349	97,51%
Belanja Modal	B.5	67.974.303.000	67.922.298.425	99,92%	8.075.645.000	7.917.950.756	98,05%
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		548.474.648.000	538.953.306.544	98,26%	517.468.963.000	505.814.989.082	98,05%

Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.283.869.095.245 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.642.152.115, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.258.772.062.870, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp22.454.880.260.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.133.596.912 dan Rp1.279.735.498.333.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca
Per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022

NAMA PERKIRAAN	Catatan	Jumlah		Kenaikan	
		2023	2022	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR	C.1				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	5.777.777	(5.777.777)	(100.00%)
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	500.000	(500.000)	(100.00%)
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	358.062.000	180.191.600	177.870.400	98.71%
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.1.7	(1.790.310)	(900.958)	(889.352)	(98.71%)
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.8	205.426.540	8.706.478	196.720.062	2.259.47
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.1.9	-	3.519.000	(3.519.000)	(100.00%)
Persediaan	C.1.10	2.080.453.885	1.932.869.402	147.584.483	7.64%
JUMLAH ASET LANCAR		2.642.152.115	2.130.663.299	511.488.816	24.01%
ASET TETAP	C.2				
Tanah	C.2.1	892.987.805.493	892.768.938.210	218.867.283	0.02%
Peralatan dan Mesin	C.2.2	158.307.919.167	147.411.157.040	10.896.762.127	7.39%
Gedung dan Bangunan	C.2.3	334.999.285.032	335.724.660.464	(725.375.432)	(0.22%)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	4.792.998.750	4.862.923.450	(69.924.700)	(1.44%)
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	8.324.566.234	8.286.679.684	37.886.550	0.46%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	50.506.171.610	4.924.747.073	45.581.424.537	925.56%
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(191.146.683.416)	(175.491.214.990)	(15.655.468.426)	8.92%
JUMLAH ASET TETAP		1.258.772.062.870	1.218.487.890.931	40.284.171.939	3.31%
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3				
Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	-	-	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak tertagih- Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-	-	-
ASET LAINNYA	C.4				
Aset Tak Berwujud	C.4.1	8.998.693.806	2.337.365.447	6.661.328.359	284.99%
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2	10.832.183.000	-	10.832.183.000	100.00%
Aset Lain-lain	C.4.3	11.747.572.590	18.896.450.736	(7.148.878.146)	(37.83%)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	(9.123.569.136)	(15.409.375.859)	6.285.806.723	(40.79%)
JUMLAH ASET LAINNYA		22.454.880.260	5.824.440.324	16.630.439.936	285.53%
JUMLAH ASET		1.283.869.095.245	1.226.442.994.554	57.426.100.691	4.68%

KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5				
Uang Muka dari KPPN	C.5.1				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	4.111.154.094	143.814.310	3.967.339.784	2.758.65%
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.3	22.442.818	36.940.317	(14.497.499)	(39.25%)
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.4	-	500.000	(500.000)	(100.00%)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		4.133.596.912	181.254.627	3.952.342.285	2.180.55%
JUMLAH KEWAJIBAN		4.133.596.912	181.254.627	3.952.342.285	2.180.55%
EKUITAS	C.6				
Ekuitas	C.6.1	1.279.735.498.333	1.226.261.739.927	53.473.758.406	4.36%
JUMLAH EKUITAS		1.279.735.498.333	1.226.261.739.927	53.473.758.406	4.36%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.283.869.095.245	1.226.442.994.554	57.426.100.691	4.68%

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.590.231.014 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp490.599.037.513 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(487.357.468.499). Kegiatan Non Operasional terealisasi sebesar Rp(2.353.570.600) dan Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(482.819.520.645).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp1.226.261.739.927 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(482.819.520.645) kemudian ditambah/dikurang dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp41.300.844 serta ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp536.251.978.207 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.279.735.498.333.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN (UAPPA)
ESELON I BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023		% thd Angg	2022		% Thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		Anggaran	REALISASI	
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	185.750.000	4.085.276.071	2199,34%	1.276.740.000	3.392.230.308	266%
JUMLAH PENDAPATAN		185.750.000	4.085.276.071	2199,34%	1.276.740.000	3.392.230.308	266%
BELANJA	B.2.						
Belanja Pegawai	B.3	144.721.742.000	142.781.333.797	98,66%	143.313.729.000	140.941.480.977	98,34%
Belanja Barang	B.4	335.778.603.000	328.249.674.322	97,76%	366.079.589.000	356.955.557.349	97,51%
Belanja Modal	B.5	67.974.303.000	67.922.298.425	99,92%	8.075.645.000	7.917.950.756	98,05%
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		548.474.648.000	538.953.306.544	98,26%	517.468.963.000	505.814.989.082	98,05%

Jakarta,

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,

E. Aminudin Aziz
NIP196711161992031001

II. NERACA

**UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN
ESELON I BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

NAMA PERKIRAAN	Catatan	Jumlah		Kenaikan		
		2023	2022	Jumlah	%	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-	-	-	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	5.777.777	(5.777.777)	(100.00%)	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	500.000	(500.000)	(100.00%)	
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	358.062.000	180.191.600	177.870.400	98.71%	
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5	-	-	-	-	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-	-	-	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.1.7	(1.790.310)	(900.958)	(889.352)	(98.71%)	
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.8	205.426.540	8.706.478	196.720.062	2.259.47	
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.1.9	-	3.519.000	(3.519.000)	(100.00%)	
Perseendaan	C.1.10	2.080.453.885	1.932.869.402	147.584.483	7.64%	
JUMLAH ASET LANCAR		2.642.152.115	2.130.663.299	511.488.816	24.01%	
ASET TETAP						
Tanah	C.2.1	892.987.805.493	892.768.938.210	218.867.283	0.02%	
Peralatan dan Mesin	C.2.2	158.307.919.167	147.411.157.040	10.896.762.127	7.39%	
Gedung dan Bangunan	C.2.3	334.999.285.032	335.724.660.464	(725.375.432)	(0.22%)	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	4.792.998.750	4.862.923.450	(69.924.700)	(1.44%)	
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	8.324.566.234	8.286.679.684	37.886.550	0.46%	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	50.506.171.610	4.924.747.073	45.581.424.537	925.56%	
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(191.146.683.416)	(175.491.214.990)	(15.655.468.426)	8.92%	
JUMLAH ASET TETAP		1.258.772.062.870	1.218.487.890.931	40.284.171.939	3.31%	
PIUTANG JANGKA PANJANG						
Piutang Tagihan Tuntutan	C.3.1	-	-	-	-	
Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	-	-	-	-	
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-	-	-	
Penyisihan Piutang Tidak tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-	-	-	
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-	-	-	
ASET LAINNYA						
Aset Tak Berwujud	C.4.1	8.998.693.806	2.337.365.447	6.661.328.359	284.99%	
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2	10.832.183.000	-	10.832.183.000	100.00%	
Aset Lain-lain	C.4.3	11.747.572.590	18.896.450.736	(7.148.878.146)	(37.83%)	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	(9.123.569.136)	(15.409.375.859)	6.285.806.723	(40.79%)	
JUMLAH ASET LAINNYA		22.454.880.260	5.824.440.324	16.630.439.936	285.53%	
JUMLAH ASET		1.283.869.095.245	1.226.442.994.554	57.426.100.691	4.68%	
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	-	-	-	-	
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	4.111.154.094	143.814.310	3.967.339.784	2.758.65%	
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.3	22.442.818	36.940.317	(14.497.499)	(39.25%)	
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.4	-	500.000	(500.000)	(100.00%)	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		4.133.596.912	181.254.627	3.952.342.285	2.180.55%	
JUMLAH KEWAJIBAN		4.133.596.912	181.254.627	3.952.342.285	2.180.55%	
EKUITAS						
Ekuitas	C.6.1	1.279.735.498.333	1.226.261.739.927	53.473.758.406	4.36%	
JUMLAH EKUITAS		1.279.735.498.333	1.226.261.739.927	53.473.758.406	4.36%	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.283.869.095.245	1.226.442.994.554	57.426.100.691	4.68%	

Jakarta,

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa.

E. Aminudin Aziz

NIP196711161992031001

III. LAPORAN OPERASIONAL

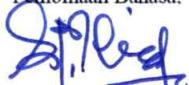
**UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN
ESELON I BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.590.231.014	1.831.416.735	1.758.814.279	96,04%
JUMLAH PENDAPATAN		3.590.231.014	1.831.416.735	1.758.814.279	96,04%
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	142.790.615.211	140.727.712.726	2.062.902.485	1,47%
Beban Persediaan	D.3	2.624.320.406	2.663.963.439	-39.643.033	(1,49%)
Beban Barang dan jasa	D.4	147.518.085.840	111.652.714.975	35.865.370.865	32,12%
Beban Pemeliharaan	D.5	15.135.542.299	10.516.948.390	4.618.593.909	43,92%
Beban Perjalanan Dinas	D.6	153.173.683.619	105.121.681.181	48.052.002.438	45,71%
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	2.388.832.714	126.878.395.336	(124.489.562.622)	(98,12%)
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	20.423.310.660	18.188.328.384	2.234.982.276	12,29%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	1.790.310	900.958	889.352	98,71%
JUMLAH BEBAN		484.056.181.059	515.750.645.389	(31.694.464.330)	(6,15%)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(480.465.950.045)	(513.919.228.654)	33.453.278.609	(6,51%)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	(2.798.499.818)	589.149.202	(3.387.649.020)	(575,01%)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		444.929.218	662.188.734	(217.259.516)	(32,81%)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(2.353.570.600)	1.251.337.936	(3.604.908.536)	(288,08%)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(482.819.520.645)	-512.667.890.718	29.848.370.073	(5,82%)
POS LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	D.12	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(482.819.520.645)	(512.667.890.718)	29.848.370.073	(5,82%)

Jakarta,

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,



E. Aminudin Aziz
NIP196711161992031001

hj:

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

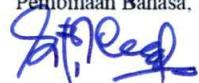
**UAPPA ESELON I
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
EKUITAS AWAL	E.1	1.226.261.739.927	880.429.455.290	345.832.284.637	39,28%
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(482.819.520.645)	(512.667.890.718)	29.848.370.073	(5,82%)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	41.300.844	(600.537.520)	641.838.364	(106,88%)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	3.000.000	(3.000.000)	(100,00%)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	680.000	0	680.000	100,00%
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.4	-	-	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	39.719.886	(760.852.659)	800.572.545	(105,22%)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	900.958	157.315.139	(156.414.181)	(99,43%)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	536.251.978.207	859.100.712.875	(322.848.734.668)	(37,58%)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		53.473.758.406	345.832.284.637	(292.358.526.231)	(84,54%)
EKUITAS AKHIR	E.6	1.279.735.498.333	1.226.261.739.927	53.473.758.406	4,36%

Jakarta,

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,



E. Aminudin Aziz
NIP196711161992031001



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara

Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020 – 2024;
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Entitas Pemerintah Pusat;
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- Rencana Strategis
- 25. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 72/M/2023 tentang Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
 - 27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 61/PB/2009 tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan;
 - 28. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

A.2. Kebijakan Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kebijakan Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A.2.1 Visi dan Misi

A.2.1.1 Visi

Sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendukung visi Kemendikbudristek tahun 2020—2024 melalui bahasa dan sastra. Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut.

“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra.”

Dari rumusan visi di atas, Indonesia maju terwujud ketika bangsa Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong.

Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

melalui pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

A.2.1.2 Misi

Untuk mencapai visi dan misi Kemendikbudristek dalam Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Pengembangan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki misi sebagai berikut.

Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan.
2. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional
3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah.
4. Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

A.2.2 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Sasaran Program

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diturunkan dari visi dan misi presiden, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berfokus pada tujuan Kemendikbudristek, terutama dalam hal **pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan**.

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan
Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	81
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,70

Berdasarkan tujuan Kemendikbudristek tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan dan indikator kinerja sebagai berikut.

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan
1.	Peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengaruhnya terhadap bahasa dan sastra dalam pendidikan	Persentase penutur bahasa Indonesia terbinar yang meningkatkan kualitas berbahasanya	72
		Persentase lembaga terbinar yang meningkatkan kualitas penggunaan bahasanya	91,99
2.	Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	50
3.	Peningkatan kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	20,54
4.	Penguatan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A
		Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	4

Tujuan strategis yang telah ditetapkan dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra pada tahun 2024, yaitu

1. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan; dan
2. Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sasaran strategis tersebut memiliki indikator keberhasilan yang disajikan dalam tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia
	Indeks Pembangunan Kebudayaan
Menguatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek
	Predikat SAKIP Kemendikbudristek
	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan empat sasaran program tahun 2021—2024. Secara terperinci sasaran program beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Persentase penutur bahasa indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya
	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
Meningkatnya peran bahasa indonesia di kancah internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa indonesia
Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Pedikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Tujuan Kemendikbudristek	Sasaran Strategis	Tujuan BPP Bahasa	Sasaran Program
Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan
		Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional
		Peningkatan kelestarian bahasa daerah	Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah
Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	Menguatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Penguatan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

A.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2020—2024 diselenggarakan melalui tujuh agenda pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Ketujuh agenda pembangunan tersebut ialah

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh agenda pembangunan di atas, Kemendikudristek berkontribusi secara langsung dalam mendukung agenda 3, 4, dan 7. Ketiga agenda tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

Sementara itu, dari tiga agenda pembangunan yang didukung oleh Kemendikbudristek, terdapat dua agenda yang disokong oleh unit kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu agenda 4 dan 7. Keduanya diuraikan sebagai berikut.

Agenda Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental merupakan gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan beberapa program prioritas dan kegiatan priotas. Salah satu program dan kegiatan tersebut ialah peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas yang salah satu kegiatan utamanya berkaitan erat dengan program kebahasaan.

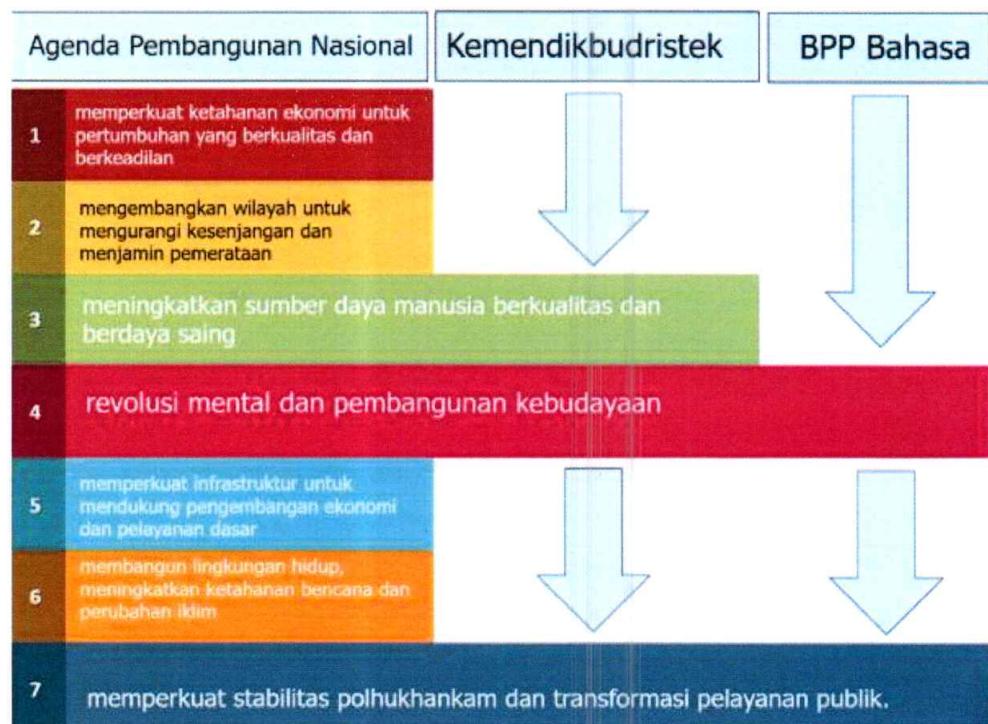
No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis
A	Peningkatan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas	
1	Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	SS 3: Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

*Agenda Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik*

Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian diperlukan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi melalui penerapan sistem merit yang sangat baik, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja, serta transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui strategi berikut.

No.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis
A	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	
1.	Penguatan manajemen aparatur sipil negara	
2.	Penataan kelembagaan dan proses bisnis	SS 5 Menguatnya tata Kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
3.	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja	
4.	Transformasi pelayanan publik	

Secara umum, kontribusi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek dalam menopang agenda pembangunan ditampilkan dalam gambar berikut ini.



A.2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyusun arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang selaras. Secara garis besar, Kemendikbudristek mengusung platform Merdeka Belajar sebagai cara untuk mencapai hal tersebut. Merdeka belajar menjadi semangat yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.



Selanjutnya, dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN, Kemendikbudristek mengarahkan fokus kebijakan pada lima hal sebagai berikut.

1. Optimalisasi angka partisipasi pendidikan
2. Peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan
3. Pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
4. Kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan
5. Tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Berkaitan dengan hal di atas, pada butir pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, berikut ini kondisi yang ingin dicapai oleh Kemendikbudristek.

1. Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan.
2. Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Strategi yang dikembangkan secara khusus untuk mencapai kondisi yang diinginkan oleh Kemendikbudristek terurai dalam table berikut ini.

No.	Arah Kebijakan/Kondisi yang Ingin Dicapai/Strategi
Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	
1.	<p>Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan nalar kritis pendidik dan peserta didik melalui bahasa sebagai implementasi merdeka belajar; b. meningkatkan peran bahasa indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan melalui pendekatan tematik terpadu; c. Meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai media pengembangan literasi dalam pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran; d. mengoptimalkan peran bahasa sebagai wahana Pendidikan karakter; e. mengoptimalkan peran bahasa sebagai sarana pembentuk jati diri dan pikiran keindonesiaan pendidik dan peserta didik; f. meningkatkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas awal g. memajukan budaya melalui wahana pendidikan di berbagai jenjang dan berbagai ranah.
2.	<p>Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerapkan standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati dan penutur asing bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan dan konteks penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia; b. meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia dalam pengembangan program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing sebagai salah satu instrumen utama diplomasi lunak Indonesia c. meningkatkan partisipasi publik (diaspora Indonesia, pelajar Indonesia, sahabat Indonesia (friends of Indonesia), dan Indonesianis) serta pemangku kepentingan dalam pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di luar negeri.

3.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan
a.	memfasilitasi adanya ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
b.	melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
c.	Mengembangkan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia
d.	Mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
e.	memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
f.	reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
g.	meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan
h.	meningkatkan peran aktif komunitas dan pemerintah daerah dalam program revitalisasi bahasa dan sastra daerah
i.	mengembangkan model konservasi dan revitalisasi untuk mencegah kepunahan bahasa dan sastra daerah
j.	mendokumentasikan bahasa dan sastra daerah untuk pelindungan bahasa dan sastra daerah

A.2.5 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diturunkan ke dalam arah kebijakan Kemendikbudristek, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut.

Arah Kebijakan BPP Bahasa

Pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan strategi Kemendikbudristek, terutama dalam mewujudkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Arah kebijakan ditujukan pada tiga fokus utama, yaitu

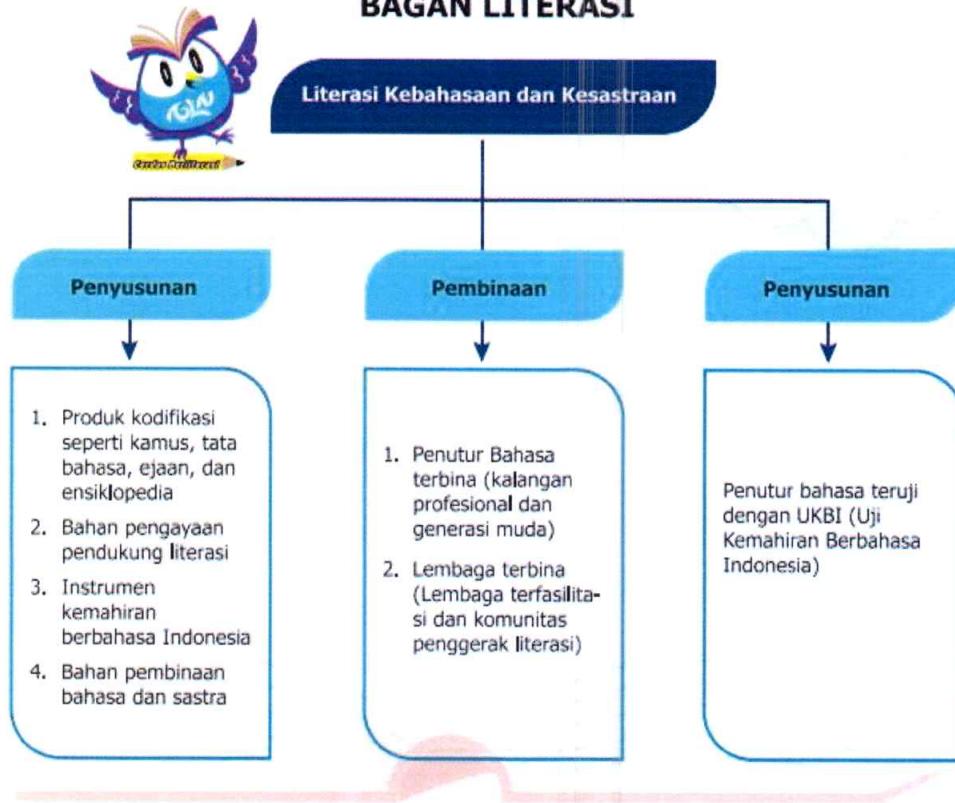
1. penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan,
2. pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan
3. internasionalisasi bahasa Indonesia.



Fokus kebijakan pertama ialah penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan. Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya BPP Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama bacatulis). Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sumber daya manusia. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.

Dalam implementasinya, penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan mencakup penyusunan bahan pengayaan literasi, pembinaan bahasa dan sastra, serta pengujian bahasa. Dalam hal penyusunan untuk penyediaan bahan pengayaan literasi, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh BPP Bahasa dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, misalnya kamus, tesaurus, tata bahasa, buku bacaan literasi, dan bahan pembinaan bahasa. Sementara itu, dalam hal pembinaan masyarakat, terdapat berbagai aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas berbahasa masyarakat, misalnya pembinaan penutur bahasa, pembinaan lembaga (termasuk komunitas), layanan ahli bahasa, serta dan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.

BAGAN LITERASI



Fokus kebijakan kedua ialah pelindungan bahasa dan sastra daerah. Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar pengetahuan—termasuk kearifan lokal, legenda, dan puisi—yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.

Dari berbagai aktivitas pelindungan bahasa daerah, prioritas dalam Renstra periode ini diarahkan pada upaya menumbuhkan penutur muda melalui revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan. Revitalisasi juga merupakan upaya menjamin hak masyarakat adat untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa mereka serta mengarusutamakan keragaman bahasa ke dalam semua agenda pembangunan.

Strategi baru yang ditempuh dalam rangka revitalisasi bahasa daerah diuraikan dalam Merdeka Belajar Episode 17 yang diluncurkan oleh Mendikbudristek pada

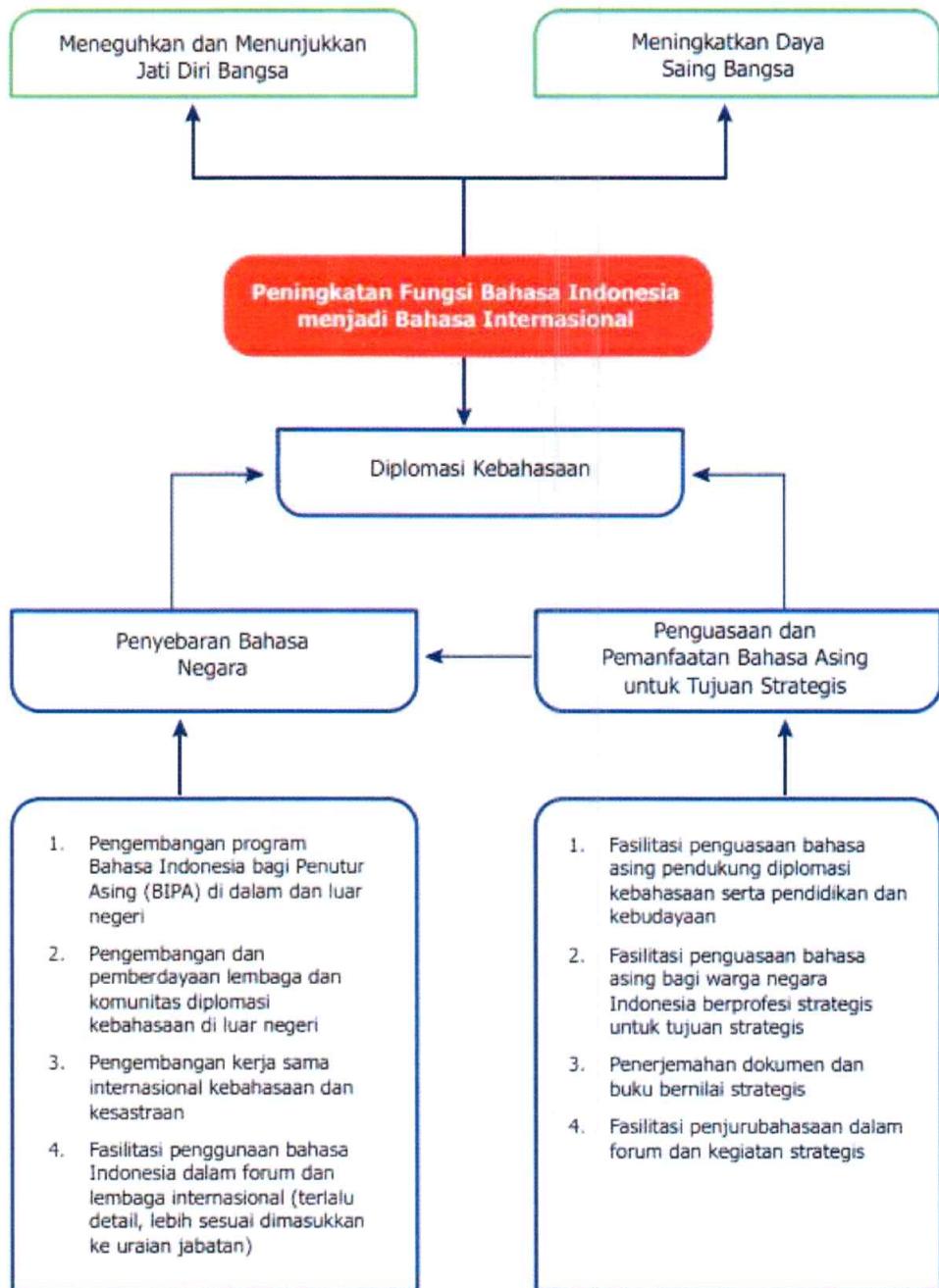
22 Februari 2022. Strategi baru ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, MGMP, KKG, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, duta bahasa, dan keluarga. Dalam implementasinya, revitalisasi bahasa dilaksanakan berdasarkan model yang sesuai dengan situasi kebahasaan di wilayah tertentu.

Fokus kebijakan ketiga berkaitan dengan internasionalisasi bahasa Indonesia. Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, strategi Lingua Franca Plus ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan

Program BIPA merupakan salah satu upaya diplomasi kebahasaan yang dilakukan dengan menyebarkan bahasa negara melalui jalur pendidikan. Dalam pengembangan program BIPA, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki peran dalam penyusunan regulasi, serta pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi secara kelembagaan kepada penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sasaran akhir fasilitasi kelembagaan itu adalah pemelajar BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Fasilitasi BIPA di luar negeri secara langsung juga berdampak pada negara yang Lembaga di dalamnya mengajarkan Bahasa Indonesia

Program lain yang menjadi bagian dari upaya internasionalisasi bahasa Indonesia adalah program penerjemahan dan penjurubahasaan. Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan program penerjemahan buku dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia dilaksanakan untuk mendukung pembelajaran BIPA. Sementara itu, penerjemahan buku dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dilakukan untuk menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke masyarakat global. Untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan sumber

daya manusia yang handal, baik di BPP Bahasa secara khusus maupun di masyarakat. Dalam konteks ini, BPP Bahasa telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerbitkan lima Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi penerjemah dan juru bahasa.



Strategi Pelaksanaan Program

Untuk melaksanakan program bidang kebahasaan dan kesrastraan, BPP Bahasa menetapkan strategi pelaksanaan program melalui platform **Kelompok**

Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP). Platform ini merupakan upaya fungsionalisasi para tenaga fungsional di lingkungan BPP Bahasa, baik satker pusat maupun satker UPT, agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan minat dan kepakarannya dalam suatu bidang keahlian dan layanan profesional kebahasaan dan kesastraan tertentu.

Pola kerja KKLP bersifat fungsional, lintas struktur, dan holistik-integratif dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Fungsional

Melalui prinsip ini, KKLP bekerja menurut kepakaran fungsional keilmuan para anggotanya yang dikelompokkan menurut hasil pemetaan jenis-jenis kepakaran guna mengukuhkan kepakaran individu dan kelompok serta mengoptimalkan layanan yang dapat diberikan oleh anggota KKLP kepada mitra kerjanya.

b. Lintas Struktur (Pusat-UPT)

Dengan prinsip ini, KKLP dibentuk berdasarkan kepakaran anggotanya yang dapat tersebar di satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan BPP Bahasa. Melalui KKLP, pegawai fungsional di satuan kerja pusat dan UPT akan dikumpulkan di dalam kelompok kepakaran tertentu guna memberikan layanan profesional yang optimal.

c. Holistik-Integratif

Melalui prinsip ini, KKLP menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan kepakaran dan layanan dalam ‘satu atap-satu rangkaian’ mulai dari kegiatan (1) analisis-sintesis substansi kebahasaan dan kesastraan, (2) pelatihan untuk peningkatan kapasitas anggota, (3) diseminasi, publikasi, sampai dengan penyediaan layanan profesional yang dapat diberikan kepada mitra kerjanya.

Berdasarkan jenis kepakaran yang ada di BPP Bahasa, terdapat tujuh kelompok kepakaran dan layanan profesional, yaitu (1) KKLP Perkamus dan Peristilahan, (2) KKLP Pelindungan dan Pemoderna, (3) KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), (4) KKLP Literasi, (5) KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, (6) KKLP Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), dan (7) KKLP Penerjemahan.

Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional



Selanjutnya, dengan mengacu pada tiga agenda utama BPP Bahasa, KKLP bekerja di bawah koordinasi satuan kerja pusat dengan pembagian tugas sebagai berikut.

No.	Bidang	KKLP		Pengampu
1.	Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	a.	Perkamusan dan Peristilahan	Pusbanglin
		b.	Literasi	Pusbin
		c.	Pembinaan dan Bahasa Hukum	Pusbin
		d.	Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	Pusbin
2.	Pelindungan Bahasa Daerah	a.	Pelindungan dan Pemodernan	Pusbanglin
3.	Internasionalisasi Bahasa Indonesia	a.	Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Pustanda
		b.	Penerjemahan	Pustanda

Arah Kebijakan dan Strategi BPP Bahasa

No.	Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Kemendikbudristek	Arah Kebijakan BPP Bahasa	Strategi	Pelaksana
1.	Peningkatan budaya literasi	Pengarusutamaan bahasa dan kebudayaan dalam pendidikan;	Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan	Meningkatkan kualitas program kebahasaan dan kesastraan melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)	1. KKLP Perkamusan dan Peristilahan 2. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 3. KKLP Literasi 4. KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
2.	Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	Penggunaan bahasa Indonesia yang berkualitas di kancah nasional dan internasional;	Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	1. KKLP BIPA 2. KKLP Penerjemahan	KKLP Pelindungan dan Pemodernan
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan.	Pelindungan bahasa daerah		

Program dan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan fokus kebijakan dan strategi pelaksanaan program, terdapat prioritas kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan pendanaan yang memadai. Beberapa prioritas tersebut ditampilkan dalam gambar di bawah ini.



Pada **fokus kebijakan pertama (literasi kebahasaan dan kesastraan)**, terdapat prioritas yang dikerjakan tiap tahun. Pada tahun 2022, BPP Bahasa mencetak dan mengirimkan buku pengayaan sebanyak 12.887.162 eksemplar yang didistribusikan ke 13.572 sasaran (PAUD dan SD) di wilayah 3T. Pencetakan dan

pengiriman buku pengayaan dilanjutkan dengan pendampingan pemanfaatan buku. Kegiatan-kegiatan tersebut didanai melalui Pagu Alokasi Anggaran TA 2022 dan tambahan anggaran dari BA BUN. Pada tahun 2022 juga diluncurkan aplikasi-aplikasi kebahasaan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, seperti superaplikasi Halo Bahasa dan Sipebi (aplikasi penyuntingan bahasa Indonesia). Selain itu, dilaksanakan pula pengujian kemahiran berbahasa Indonesia kepada siswa, guru, dan para pemangku kepentingan dengan menggunakan UKBI Adaptif Merdeka.

Dalam rangka mendukung penguatan literasi, pada tahun 2023 terdapat agenda prioritas berupa pemberian **bantuan pemerintah untuk komunitas kebahasaan dan kesusastraan**, termasuk komunitas literasi. Komunitas-komunitas tersebut merupakan wahana berkarya bagi para pegiat bahasa dan sastra. Dari komunitas tersebut lahir para penulis-penulis yang mampu menginspirasi generasi muda agar mampu berkarya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, keberadaan komunitas sastra bervariasi. Sebagian di antaranya sangat potensial dan prospektif dalam mengembangkan bibit-bibit penulis muda. Untuk komunitas yang berpotensi menjadi wahana kreatif itulah, pemerintah perlu mengulurkan tangan agar bakat-bakat yang ada tidak hilang karena kurangnya sarana, prasarana, maupun kegiatan. Peran pemerintah dalam rangka memberdayakan komunitas-komunitas seperti ini sangat diharapkan sehingga komunitas dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat.

Pada tahun 2023 juga terdapat agenda penting, yaitu **Kongres Bahasa Indonesia XII**. Kongres Bahasa Indonesia (KBI) merupakan forum akbar kebahasaan yang dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun. Kongres pertama dilaksanakan di Surakarta pada tahun 1938, sedangkan kongres terakhir dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2018. Dalam forum ini dibahas perkembangan mutakhir ilmu kebahasaan dan kesusastraan. Dari forum ini dihasilkan rekomendasi yang menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan para pemangku kepentingan kebahasaan dan kesusastraan.



Sementara itu, penguatan literasi pada tahun 2024 diarahkan pada optimalisasi layanan kebahasaan, terutama pemantapan produk kodifikasi bahasa, pembinaan intensif terhadap lembaga pengguna bahasa, peluasan pengguna UKBI Adaptif Merdeka, dan pendampingan SD dan PAUD dalam pemanfaatan buku bacaan.

Pada **fokus kebijakan kedua (pelindungan bahasa daerah)**, tahun 2022 hingga 2024 dimanfaatkan untuk menindaklanjuti peluncuran Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Implementasi model pelindungan bahasa dan sastra daerah diperluas wilayahnya, dari 12 provinsi (tahun 2022) menjadi 20 provinsi (tahun 2023) dan 34 provinsi (tahun 2024). Pada akhir periode Renstra, diharapkan revitalisasi bahasa daerah menjadi sebuah gerakan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Pada tahun 2023, terdapat agenda peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional (*International Mother Language Day*). Hari Bahasa Ibu Internasional diperingati di seluruh dunia pada tanggal 21 Februari setiap tahun. Peringatan itu menandai kepedulian warga dunia terhadap keberadaan bahasa daerah yang kian lama kian mengkhawatirkan. Bahkan, secara khusus PBB menetapkan tahun 2022—2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah untuk menggerakkan semua pemangku kepentingan agar bersamasama melestarikan bahasa daerah. Dalam kaitannya dengan hal itu, pada tahun 2023 Indonesia bersama dengan UNESCO akan menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Kegiatan diselenggarakan di tingkat nasional dan internasional. Puncak peringatan diagendakan di markas UNESCO di Paris, Prancis dengan menampilkan Mendikbudristek sebagai pembicara kunci pada forum tersebut.

Sementara itu, pada **fokus kebijakan ketiga (internasionalisasi bahasa Indonesia)**, terdapat agenda prioritas berupa **penyusunan peta jalan** penginternasionalan bahasa Indonesia. Selanjutnya, program dan kegiatan tiap tahun dilaksanakan berdasarkan peta jalan tersebut untuk memperkuat diplomasi kebahasaan yang selama ini telah dijalankan melalui fasilitasi Lembaga penyelenggara BIPA dan penerjemahan lintasbahasa.

Dalam hal dukungan manajemen, terdapat agenda prioritas yang perlu disokong penuh, yaitu (1) Penyediaan gedung/kantor bagi UPT, (2) Penyelesaian regulasi tentang jabatan fungsional Widyabasa, (3) Peningkatan kompetensi pegawai, (4)

Penyusunan indeks pembangunan bidang kebahasaan, dan (5) Evaluasi program 2020—2024 (termasuk evaluasi KBI).

Berkaitan dengan penyediaan gedung/kantor bagi UPT (balai/kantor bahasa), prioritas pertama ditujukan pada UPT yang telah memperoleh izin prinsip dari Presiden untuk membuka blokir moratorium pembangunan gedung/kantor. Dukungan pendanaan bagi UPT-UPT tersebut perlu diprioritaskan pada tahun 2023. Bagi UPT lain, upaya penyediaan tanah/gedung/kantor dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan data, baik izin prinsip maupun RKBMN. Pada akhir periode Renstra, diharapkan semua UPT telah menempati gedung/kantor yang layak karena UPT tersebut merupakan garda terdepan dalam hal pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa di masyarakat. Satuan-satuan kerja tersebut mengemban berbagai amanat regulasi. Luas wilayah kerja tiap UPT juga sangat luas (satu sampai dua provinsi). Unit-unit tersebut merupakan wajah BPP Bahasa (Kemendikbudristek) di daerah sehingga keberadaannya perlu diperhatikan. Dengan fasilitas yang memadai, UPT tersebut dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat dan lebih bermartabat sebagai representasi Kemendikbudristek.

Berkaitan dengan jabatan fungsional Widyabasa, perlu ditempuh langkah ekstra untuk menyelesaikan semua regulasi yang diperlukan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menginisiasi kemunculan jabatan fungsional Widyabasa sebagai salah satu strategi dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme SDM yang memiliki kepakaran di bidang kebahasaan dan kesastraan. Inisiasi tentang jabatan fungsional Widyabasa merupakan langkah strategis untuk mengisi rumpang nama kepakaran di bidang kebahasaan dan kesastraan yang dari segi pelaksanaan tugas dan kepakarannya sebenarnya telah lama diemban oleh pegawai di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Melalui penetapan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola jabatan fungsional Widyabasa. Secara khusus jabatan fungsional Widyabasa mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Jabatan ini merupakan jabatan fungsional kategori keahlian yang meliputi Widyabasa Ahli

Pertama, Widyabasa Ahli Muda, Widyabasa Ahli Madya, dan Widyabasa Ahli Utama. Pada tahun 2022 telah dilakukan pengangkatan sebanyak 183 widyabasa dengan kategori widyabasa pertama, widyabasa muda dan widyabasa madya.



Berkaitan dengan peningkatan kompetensi pegawai, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan organisasi atas kompetensi yang harus dimiliki para pegawai. Selanjutnya, pengembangan kompetensi didasarkan pada peta kompetensi yang disusun tersebut. Pengembangan kompetensi ditujukan bagi pegawai teknis yang tergabung dalam KKLP maupun pegawai administratif yang mendukung terselenggaranya roda organisasi.

Berkaitan dengan penyusunan indeks pembangunan bidang kebahasaan, perlu ditempuh langkah-langkah sistematis dalam mewujudkan indeks yang akan digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan bidang kebahasaan ini. Penyusunan indeks diagendakan pada tahun awal tahun 2023 sehingga dapat digunakan sebagai indikator kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ketika menyusun rencana strategis pada periode 2025—2029.

Berkaitan dengan evaluasi program, perlu dilakukan analisis evaluatif untuk mengetahui pencapaian dan permasalahan dalam melaksanakan program sepanjang tahun 2020—2024. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kongres bahasa Indonesia dari tahun ke tahun. Momentum akhir Renstra tahun 2024 digunakan untuk melakukan evaluasi besar terhadap program kebahasaan dan kesastraan sebagai pijakan kokoh dalam perencanaan Renstra periode setelahnya.

A.2.6 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
1.	RSKKNI bidang pengajaran BIPA	Penguatan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	2022
2.	Peraturan tentang standar penyelenggaraan program BIPA	Penguatan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan program BIPA	2024
3.	Peraturan tentang peta jalan internasionalisasi bahasa Indonesia	Sebagai rujukan pelaksanaan program penginternasionalan bahasa indonesia	2023
4.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Sastra	Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan teks sastra	2022
5.	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Penerjemahan dan Penjurubahasaan	Pelaksanaan aturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional dalam bidang penerjemahan dan penjurubahasaan	2023
6.	Revisi Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	UKBI masih bersifat imbauan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya	2023
7.	Peraturan tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia	Penguatan kebijakan BPP Bahasa dalam pengawasan bahasa untuk melaksanakan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	2023
8.	Peraturan tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan PUEBI, PUPI, dan pedoman lainnya	2022
9.	Revisi PP Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pengurangan tarif mahasiswa dan penyesuaian tarif penutur asing	2023
10.	Peraturan tentang tarif PNBP di lingkungan Kemendikbudristek	Penambahan tarif nol dalam PNBP UKBI sangat penting untuk mewujudkan peningkatan kemahiran mahasiswa dan pemangku kebijakan	2023
11.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata Istilah	Penguatan kebijakan BPP Bahasa dalam fungsi pengembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah	2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
12.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pembaku dan Pengodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia	Pentingnya aturan mengenai Standar Kompetensi Penyusun Kaidah Bahasa Indonesia	2024
13.	Revisi Permendikbud 44 Nomor 2020 tentang Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemendikbudristek	Penambahan sasaran penerima banpem agar mencakupi juga komunitas kebahasaan dan kesastraan	2022
14.	Perpres tentang Pembudayaan Literasi	Tindaklanjut UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, serta PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017	2024
15.	Permendikbudristek tentang pedoman kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai pedoman bagi unit kerja dalam melakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	2022
16.	Perpres tentang tunjangan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan menentukan besaran jumlah tunjangan fungsional jabatan fungsional Widyabasa	2023
17.	Permendikbudristek tentang uji kompetensi jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan terkait kompetensi yang dibutuhkan pegawai untuk menduduki jabatan fungsional Widyabasa	2022
18.	Permendikbudristek tentang pedoman <i>inpassing</i> jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan dalam menentukan proses <i>inpassing</i> jabatan fungsional Widyabasa	2022

A.2.7 Kerangka Kelembagaan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kemendikbudristek menjadi lembaga strategis dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berdaya saing melalui pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra. Oleh karena itu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh Sekretariat Badan dan tiga pusat, yaitu Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra (Pusbanglin), Pusat Pembinaan

Bahasa dan Sastra (Pusbin), dan Pusat Penguanan dan Pemberdayaan Bahasa (Pustanda), serta 30 unit pelaksana teknis (UPT), yaitu balai bahasa dan kantor bahasa yang tersebar di 30 Provinsi. Secara prinsip, Balai Bahasa dan Kantor Bahasa merupakan pelaksana tugas teknis dalam pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, berikut ini nama balai dan kantor bahasa di 30 provinsi.

No	Balai Bahasa (III/a)	No	Kantor Bahasa (IV/a)
1.	Balai Bahasa Provinsi Aceh	1.	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau
2.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	2.	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	3.	Kantor Bahasa Provinsi Jambi
4.	Balai Bahasa Provinsi Riau	4.	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu
5.	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	5.	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
6.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	6.	Kantor Bahasa Provinsi Banten
7.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	7.	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
8.	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	8.	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
9.	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	9.	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur
10.	Balai Bahasa Provinsi Bali	10.	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
11.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	11.	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo
12.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	12.	Kantor Bahasa Provinsi Maluku
13.	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	13.	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara
14.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara		
15.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah		
16.	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan		
17.	Balai Bahasa Provinsi Papua		

Saat ini, sebanyak 17 balai bahasa memiliki status sebagai lembaga eselon III/a dan sebanyak 13 kantor bahasa memiliki status sebagai lembaga eselon IV/a. Perbedaan status eselonisasi balai/kantor bahasa tersebut perlu menjadi perhatian karena baik balai maupun kantor bahasa menyelenggarakan tugas yang sama, yaitu melaksanakan pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya. Balai dan kantor bahasa juga merupakan perwakilan pemerintah pusat yang memiliki cakupan wilayah kerja satu provinsi atau lebih. Oleh sebab

itu, peningkatan status eselonisasi kantor bahasa menjadi prioritas yang perlu segera diupayakan dalam periode Renstra 2020—2024.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bahasa dan Kantor Bahasa berkoordinasi dengan

1. unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kemendikbudristek,
2. pemerintah daerah provinsi,
3. pemerintah daerah kabupaten/kota, dan
4. unit organisasi lainnya di luar Kemendikbudristek.

Masih adanya perbedaan eselon di UPT merupakan tantangan tersendiri bagi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, karena dari sisi tugas dan fungsi pada Balai Bahasa dan Kantor Bahasa tidak ada perbedaan. Evaluasi terkait eselonisasi kantor bahasa paling cepat akan dilaksanakan pada tahun 2023 karena adanya penambahan beberapa tugas dan fungsi baru pada balai/kantor bahasa. Alat ukur evaluasi tersebut berdasarkan pada capaian kinerja tiap unit.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berikut ini bagan struktur organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Struktur Organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Untuk memperjelas bagan organisasi di atas, berikut ini tabel penanggung jawab program dan kegiatan di lingkungan BPP Bahasa.

Kode Program	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
6	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2020	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2021	Kegiatan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
2022	Kegiatan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
6702	Kegiatan Penguatan dan Diplomasi Kebahasaan	Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa didukung oleh sumber daya manusia yang tersebar di 30 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah pegawai BPP Bahasa mengalami penurunan akibat ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengharuskan semua pejabat fungsional peneliti berpindah ke BRIN. Setelah 215 pejabat fungsional peneliti pindah ke BRIN, pegawai BPP Bahasa saat ini sebanyak 1.140 orang. Jumlah tersebut terdiri atas pejabat struktural sebanyak 56 orang yaitu 1 orang pejabat pimpinan tinggi madya, 4 orang pejabat pimpinan tinggi pratama, 17 pejabat administrator, dan 34 orang pejabat pengawas, pejabat fungsional sebanyak 274 orang, dan pelaksana sebanyak 830 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai dengan tingkat pendidikan S-3 sebanyak 18 orang, S-2 sebanyak 241 orang, S-1 sebanyak 686 orang, D-3 sebanyak 63 orang, D-1 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 124 orang, SLTP sebanyak 3 orang, dan SD sebanyak 2 orang. Dengan berkurangnya jumlah sumber daya manusia di lingkungan BPP Bahasa, diperlukan upaya-upaya sistematis dalam pengelolaan SDM Aparatur. Secara rinci, kondisi pegawai BPP Bahasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Unit Kerja	Pejabat Struktural						Jabatan		Tingkat Pendidikan						Pangkat/Golongan			Jml		
		Eselon			Pengajar	Pelaksana	9-3	S-2	S-1	D-3	D-1	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II				
		Ia	IIa	IIIa	IVa	IVb															
		1	4	17	0	34	0	260	924	1B	241	686	63	1	124	3	2	102	952	84	1.140
1	Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1							1									1		1	
2	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa		1		1		9	81	0	9	57	11	1	13	0	1	4	76	12	92	
3	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra		1		1		16	55	2	18	43	5		2	1		10	56	5	73	
4	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra		1		1		9	54	2	21	30	7		5			13	47	5	65	
5	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa		1		1		16	38	2	8	42	1		3			3	53		56	
6	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur		1	1	1		13	24	-	14	14	3		8	-	-	5	33	1	39	
7	Balai Bahasa Provinsi Bali		1	1	1		11	17	1	9	9	1		11	-	1	4	22	4	30	
8	Balai Bahasa Provinsi Aceh		1	1	1		3	33	1	6	24	3		4	-	-	3	33	2	38	
9	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara		1	1	1		5	32	2	14	20	-		3	-	-	4	34	1	39	
10	Balai Bahasa Provinsi Riau		1	1	1		18	14	-	7	20	3		3	1	-	3	28	3	34	
11	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat		1	1	1		9	18	1	9	19	-		-	-	-	2	25	2	29	
12	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan		1	1	1		25	13	-	16	14	3		6	1	-	1	33	6	40	
13	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat		1	1	1		15	19	1	9	20	1		5	-	-	2	33	1	36	
14	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah		1	1	1		4	32	1	12	14	2		9	-	-	8	26	4	38	
15	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta		1	1	1		4	31	-	8	19	-		10	-	-	5	29	3	37	
16	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat		1	1	1		6	17	-	3	13	1		8	-	-	1	19	5	25	
17	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah		1	1	1		5	25	-	3	23	3		3	-	-	2	28	2	32	
18	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan		1	1	1		12	15	1	8	16	1		3	-	-	1	25	3	29	
19	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara		1	1	1		6	13	-	8	7			6	-	-	3	12	6	21	
20	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah		1	1	1		3	12	1	2	10	2		2	-	-	3	14	-	17	
21	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan		1	1	1		13	19	0	10	17	1		6	-	0	7	25	2	34	
22	Balai Bahasa Provinsi Papua		1	1	1		5	25	-	5	22	3		2	-	-	4	26	2	32	
23	Kantor Bahasa Provinsi Jambi			1	11	24	1	9	23	-				3	-	-	4	29	3	36	
24	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu			1	1	17	-	2	16	-		1	-	-	1	17	1	19			
25	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau			1	3	16	-	1	17	2		-	-	-	-	-	18	2	20		
26	Kantor Bahasa Provinsi Kep. Bangka Belitung			1	-	11	-	1	10	-		1	-	-	-	-	11	1	12		
27	Kantor Bahasa Provinsi Lampung			1	5	24	-	9	17	1		3	-	-	3	26	1	30			
28	Kantor Bahasa Provinsi Banten			1	3	17	-	1	18	2		-	-	-	-	-	20	1	21		
29	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur			1	8	16	-	6	17	1		1			1	22	2	25			
30	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat				1	16	14	-	4	22	3		2	-	-	0	29	2	31		
31	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur				1	0	14	-	1	14	-		-	-	-	-	15	-	15		
32	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara				1	1	26	-	5	21	1		1	-	-	2	26	0	28		
33	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo					1	2	13	-	1	18	1		-	-	-	1	14	1	16	
34	Kantor Bahasa Provinsi Maluku					1	2	23	-	1	25	-		-	-	-	26	-	26		
35	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara					1	1	22	1	2	20	1		-	-	1	22	1	24		

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Berbagai permasalahan/hambatan yang mangakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan

dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembangkan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kemendikbudristek) periode 2020—2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pemerintahan yang berkelas dunia sejalan dengan Visi Indonesia 2045.

Sasaran reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020—2024, yaitu terciptanya birokrasi di Kemendikbudristek yang bersih dan akuntabel serta terciptanya birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni

1. Manajemen Perubahan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada area manajemen perubahan melakukan transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja ASN melalui aplikasi Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu (GESIT) yang memberikan informasi layanan publik, layanan kepegawaian, dan layanan administrasi lembaga.

2. Deregulasi Kebijakan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam pelaksanaan deregulasi kebijakan telah mengidentifikasi dan menganalisis aturan yang berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan agar tidak ada regulasi yang tumpang tindih atau berbenturan.

3. Penataan dan Penguatan

Organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam penataan dan penguatan organisasi telah melakukan evaluasi organisasi dan mengusulkan naskah akademik perubahan organisasi untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

4. Penataan Tata Laksana

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam mewujudkan penataan tata laksana yang efisien dan efektif serta prosedur kerja yang jelas dan terukur telah menyusun peta proses bisnis level IV.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka penataan sistem manajemen SDM meningkatkan kompetensi pegawai agar terwujud SDM aparatur yang profesional.

6. Penguatan Akuntabilitas

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka penguatan akuntabilitas telah melaksanakan peningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

7. Penguatan Pengawasan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka penguatan pengawasan telah membentuk unit pengendali gratifikasi sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan berusaha untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan publik dengan cara melakukan evaluasi pelayanan secara berkala.

Untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus meningkatkan layanan kepada masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan layanan prima tersebut, yaitu dengan memanfaatkan berbagai aplikasi, misalnya Halo Bahasa dan Sipebi (aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia). Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut bertujuan agar layanan dan produk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa lebih mudah diakses oleh pengguna layanan dan lebih luas jangkauannya.

Dari sisi sumber daya manusia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan peningkatan kompetensi secara bertahap bagi seluruh pegawai. Dengan adanya pengelompokan kepakaran diharapkan kebutuhan dan pelaksanaan kompetensi seluruh pegawai lebih maksimal dan nantinya akan meningkatkan kualitas layanan.

Selain aplikasi dan SDM, satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa didorong untuk menjadi satuan kerja berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Tiap tahun, sebanyak lima satuan kerja diusulkan untuk mendapatkan status ZI-WBK dan satu satuan kerja ditargetkan memperoleh predikat tersebut. Makin banyak satuan kerja yang berpredikat ZI-WBK, makin menunjukkan kinerja organisasi yang baik sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan.

Pemenuhan Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, semua satuan kerja di BPP Bahasa perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu prasarana yang sangat penting ialah ketersediaan gedung/kantor sebagai tempat kerja utama. Berdasarkan kepemilikan tanah dan gedung, terdapat **empat kategori** satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa, yaitu

- a. memiliki tanah dan bangunan;
- b. memiliki bangunan yang berdiri di tanah pemerintah provinsi;
- c. memiliki tanah, tetapi berkantor di UPT Kemendikbudristek; dan
- d. belum memiliki tanah dan bangunan gedung kantor sendiri.

Informasi tentang kepemilikan prasarana satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Nama Satuan Kerja	Tanah	Sertifikat	Pinjam Pakai	Penggunaan Sementara	Menempat Satker Kemendikbudristek
1	Sekretariat Badan Bahasa	V	V			
2	BBP Jawa Barat	V	V			
3	BBP Jawa Tengah	V	V			
4	BBP D. I. Yogyakarta	V	V			
5	BBP Jawa Timur	V	V			
6	BBP Aceh	V	V			
7	BBP Sumatera Utara	V	V			
8	BBP Sumatera Barat	V	V			
9	BBP Riau	V	V			
10	KBP Jambi			V		
11	BBP Sumatera Selatan	V				
12	KBP Lampung	V	V			
13	BBP Kalimantan Barat	V	V			
14	BBP Kalimantan Tengah	V				
15	BBP Kalimantan Selatan	V	V			
16	KBP Kalimantan Timur	V				
17	BBP Sulawesi Utara			V		
18	BBP Sulawesi Tengah	V				
19	BBP Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	V	V			
20	KBP Sulawesi Tenggara	V	V			
21	KBP Maluku	V	V			V
22	BBP Bali	V	V			
23	KBP Nusa Tenggara Barat	V	V			
24	KBP Nusa Tenggara Timur					V
25	BBP Papua			V		
26	KBP Bengkulu	V	V			V
27	KBP Maluku Utara	V	V			V
28	KBP Banten	V	V			V
29	KBP Kepulauan Bangka Belitung	V	V			V
30	KBP Gorontalo	V	V			V
31	KBP Kepulauan Riau	V	V			V
32	Pusat Pengembangan dan Pelindungan					V
33	Pusat Pembinaan					V
34.	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa				V	

Berdasarkan data kepemilikan prasarana tanah/gedung kantor di atas, terdapat empat **strategi umum** yang dapat ditempuh guna mewujudkan prasarana gedung/kantor penunjang tugas dan fungsi, yaitu

1. menggunakan gedung/kantor UPT Kemendikbudristek;
2. menggunakan gedung kantor milik pemerintah daerah dengan sistem pinjam pakai;

3. mengupayakan hibah tanah/gedung dari pemerintah daerah; dan
4. membangun gedung/kantor sendiri.

Sementara itu, perlu ditempuh strategi khusus yang sesuai dengan kategori masing-masing.

Untuk satuan kerja berkategori A (memiliki tanah dan bangunan), dilakukan pemeliharaan gedung melalui anggaran pemeliharaan yang disetujui dalam RKBMN. Sementara itu, untuk satuan kerja berkategori B (memiliki bangunan yang berdiri di tanah pemerintah provinsi), strategi yang ditempuh ialah:

1. Berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan meyakinkan pemerintah setempat melalui program dan output—output nyata bahwa BPP Bahasa penting untuk pengembangan daerah dan berkontribusi langsung untuk pengembangan masyarakat.
2. Meminta hibah dan fasilitasi sarana prasarana penunjang program BPP Bahasa yang berkontribusi dalam pengembangan daerah dan masyarakat secara langsung.
3. Melaksanakan pengadaan tanah pengganti sebagai modal tukar guling dengan pemerintah setempat melalui penganggaran DIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Untuk satuan kerja berkategori C (memiliki tanah, tetapi berkantor di UPT Kemendikbudristek), strategi yang perlu ditempuh ialah:

1. Menunjukkan komitmen tentang keberpihakan anggaran untuk rencana pembangunan gedung melalui dokumen resmi.
2. Mengajukan proses izin prinsip atau pembukaan moratorium pembangunan gedung dari Presiden Republik Indonesia sesuai dengan kemampuan dan komitmen kesediaan anggaran.
3. Memanfaatkan skema Bangun Guna Serah (BGS), yaitu pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya, bangunan dan/atau sarana berikut fasilitas tersebut diserahkan kembali setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan.
4. Memanfaatkan skema Bangun Serah Guna (BSG), yaitu pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Strategi penyelesaian kategori D (belum memiliki tanah dan bangunan gedung kantor sendiri) dilakukan melalui:

1. Berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan meyakinkan pemerintah setempat melalui program dan output—output nyata bahwa BPP Bahasa penting untuk pengembangan daerah dan berkontribusi langsung untuk pengembangan masyarakat.
2. Meminta hibah dan fasilitasi sarana prasarana penunjang program BPP Bahasa yang berkontribusi dalam pengembangan daerah dan masyarakat secara langsung.
3. Menggunakan dan memanfaatkan aset tidak digunakan (idle) Kemendikbudristek dan Kementerian Keuangan.
4. Melaksankaan pengadaan tanah dan bangunan melalui APBN.

A.2.8 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan sasaran-sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pembangunan bidang kebahasaan. Keberhasilan sasaran diukur dengan indikator-indikator kinerja. Di bab ini sasaran dan indikator kinerja ditampilkan berdasarkan dua periode pelaksanaan, yaitu (1) Sasaran dan indikator tahun 2020—2021 dan (2) Sasaran dan indikator tahun 2022—2024.

Sasaran dan Indikator Tahun 2020—2021

Pada periode 2020—2021, terdapat sasaran dan indikator serta target kinerja sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Angka Dasar	Target	
				2020	2021
SS 4 Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan					
IKSS 4.1	Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	Skor	505	510	515
IKSS 4.2	Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	Orang	17.000	34.000	50.000
SS 5 Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel					
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB	A	A
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	81	85	87

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Angka Dasar	Target	
				2020	2021
SP 1 Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia					
IKP 1.1	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	Per센	42	42	44
IKP 1.2	Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Per센	16	26	35
SP 2 Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah					
IKP 2.1	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	Indeks	55,03	58,2	61,4
SP 3 Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah					
IKP 3.1	Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	Indeks	0,54	0,55	0,56
SP 4 Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional					
IKP 4.1	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	Negara	29	30	31
IKP 4.2	Jumlah Pemelajar BIPA	Orang	70.865	75.865	80.865
SP 5 Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas					
IKP 5.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB	Predikat	B	BB	BB
IKP 5.2	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	2	5	5
IKP 5.3	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Nilai	90	91	92

Kode	Sasaran kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Angka Dasar	Target			
				2020	2021		
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra						
SK	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia						
IKK	Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	Baterai	18	22	27		
IKK	Jumlah Acuan Kebahasaan dan Kesastraan	Naskah	15	18	25		
IKK	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan	Naskah	82	89	96		
IKK	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	Dokumen	4	43	32		
SK	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia						
IKK	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Kosakata	112.538	130.030	147.522		
SK	Meningkatnya Jumlah Partisipan Aktif dalam Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan						
IKK	Jumlah Lembaga Terfasilitasi secara Kebahasaan	Lembaga	211	323	435		
IKK	Jumlah Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Orang	773	993	1.213		
IKK	Jumlah Bahan Pengayaan Laboratorium Kebahasaan	Bahan	50	50	75		
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra						
SK	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik						
IKK	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	Lembaga	1.740	3.589	3.977		
SK	Tersedianya Buku Pengayaan untuk Mendukung Literasi Membaca						
IKK	Jumlah Buku Bermutu yang Diterjemahkan	Judul	113	100	125		
IKK	Jumlah Buku Pengayaan Literasi	Judul	661	711	786		
IKK	Jumlah Buku Pengayaan yang Digunakan dalam Pendidikan untuk Meningkatkan Literasi Membaca	Buku	60	120	180		
SK	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina						
IKK	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang	66.409	73.050	80.355		
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah						
SK	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah						
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	9.000	17.000	25.000		
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	9.000	17.000	25.000		
IKK	Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	Sastra	2	6	10		
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra						
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
IKK	Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	Predikat	B	BB	BB		
IKK	Jumlah Satker yang Dibina menuju WBK	Satker	5	5	2		
IKK	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Nilai	90	91	92		

Sasaran dan Indikator Tahun 2022—2024

Pada periode 2022—2024, terdapat sasaran dan indikator serta target kinerja sebagai berikut.

Kode	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SS 3	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan				
IKSS 3.1	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Indeks	69	75	81
IKSS 3.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59,7	61,2	62,7
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel				
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	BB	A	A	A
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	81	83	85	87

KODE	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Angka Dasar	Target		
				2022	2023	2024
SP	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesrastraan					
IKP 3.1.1	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Persen	62	66	70	72
IKP 3.1.2	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persen	43,90	59,93	75,96	91,99
SP	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancalah internasional					
IKP 3.1.3	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Negara	47	48	49	50
SP	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah					
IKP 3.1	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	17,87	18,73	19,67	20,54
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi					
IKP 5.3.11	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A	A	A	A
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek					
IKP 5.4.9	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	1	2	3	4

Kode	Sasaran kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Angka Dasar (2020)	Target				
				2022	2023	2024		
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra							
SK	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra							
IKK	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	70	273	374	477		
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra							
IKK	Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	Model	-	47	53	61		
IKK	Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	6.842	12.393	15.405	19.193		
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra							
SK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan							
IKK	Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat	Produk	60	210	310	410		
IKK	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	41.833	105.657	108.932	112.309		
SK	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan							
IKK	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	2.626	1.395	1.395	1.395		
IKK	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	Lembaga	-	797	797	797		
6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan							
SK	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA							
IKK	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	91.146	141.045	166.045	191.045		
SK	Tersedianya produk diplomasi bahasa							
IKK	Jumlah produk penerjemahan	Produk	76	3.178	5.651	8.000		
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa							
SK	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa							
IKK	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	69,70	75,75	78,80	81,80		
IKK	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	5	5	5	5		

A.2.9 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka menjalankan amanat pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, diperlukan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan

pendanaan fungsi pendidikan. Salah satu ketentuan tersebut berkaitan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang mengubah struktur program dan kegiatan kementerian/lembaga.

Berkaitan dengan hal di atas, kerangka pendanaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020—2024 dibagi ke dalam tiga periode berikut ini.

Periode TA 2020

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Harian (juta)
023.13.10	Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	385,2
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	128,4
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	38
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	24,9
5288	Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	6,6
5289	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	187

Periode TA 2021

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Harian (juta)
023.DH	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	176,2
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	43,1
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	65,9
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	67
023.WA	Dukungan Manajemen	294,4
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	294,4
Total		470,6

Periode 2022—2024

Kode	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan		
		2022	2023	2024
023.DH	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan			
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	22,7	26,5	31
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	64,5	97,7	84,2
6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan	35	62	62,6
023.WA	Dukungan Manajemen			
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	283	358	401
Total		405,7	542,6	579,6

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (Audited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja negara pada instasi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

A.4. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Termasuk di dalam Belanja Dibayar Dimuka adalah Bantuan Pemerintah yang telah disalurkan kepada Pemda/Lembaga namun sampai dengan tanggal pelaporan Pemda/lembaga penerima belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau Berita Acara Serah Terima.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO diterapkan mulai tahun 2021 secara prospektif, setelah Pemerintah menerapkan Metode Harga Perolehan Terakhir pada tahun-tahun sebelumnya.

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap

pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut.

Tabel 3. Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp558.467.934.000. Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang disebabkan adanya Refocussing, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel B
Revisi Anggaran 2023

Uraian	Tahun 2023		Naik/Turun
	Anggaran Semula	Anggaran Revisi	
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	185.750.000	185.750.000	-
Jumlah Pendapatan			
Belanja			
Belanja Pegawai	155.434.341.000	144.721.742.000	10.712.599.000
Belanja Barang	329.654.781.000	335.778.603.000	(6.123.822.000)
Belanja Modal	73.378.812.000	67.974.303.000	5.404.509.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	558.467.934.000	548.474.648.000	9.993.286.000

Pagu anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebesar Rp558.467.934.000, kemudian terdapat revisi pagu menjadi 548.474.648.000 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Revisi pengalihan anggaran tukin Sekretariat BPP Bahasa ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Rp6.146.934.000.
2. Revisi pengembalian blokir AA ke BA BUN Rp1.305.766.000.
3. Revisi pengembalian sisa anggaran AA non belanja pegawai ke BA BUN Rp8.687.520.000.
4. Realokasi anggaran antar satker dan antar jenis belanja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Rp2.257.800.000

Realisasi Pendapatan
Rp4.085.276.071

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.085.276.071 dari estimasi pendapatan Rp185.750.000 atau 2199.34%. Pendapatan UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terdiri atas Pendapatan dari Pengelolaan BMN; Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan teknologi; Pendapatan Denda; dan Pendapatan Lain-lain. Rincian realisasi pendapatan adalah sebagai berikut.

Tabel B.1
Rincian Realisasi Pendapatan

Akun	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	237.345.539	396.247.795	(158.902.256)	(40,10%)
425129	Pendapatan dari Pemindahtempahan BMN Lainnya	35.667.999	189.243.238	(153.575.239)	(81,15%)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	306.288.100	92.734.800	213.553.300	230,28%
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2.275.700.000	-	2.275.700.000	100,00%
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	548.260.000	1.728.225.000	(1.179.965.000)	(68,28%)
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	90.392.274	52.456.250	37.936.024	72,32%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	44.800	158.280.913	(158.236.113)	(99,97%)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	221.485.130	31.778.932	189.706.198	596,96%
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	359.586.888	444.224.548	(84.637.660)	(19,05%)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	10.000.000	292.660.820	(282.660.820)	(96,58%)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	505.341	473.462	31.879	6,73%
425991	Penerimaan Kembali Persekut/Uang Muka Gaji	-	5.904.550	(5.904.550)	(100,00%)
Jumlah		4.085.276.071	3.392.230.308	693.045.763	20,43%

Dibandingkan tahun 2022 pendapatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengalami kenaikan sebesar 20,43%, pendapatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berasal dari:

1. Penjualan Peralatan dan Mesin Rp237.345.539 yang merupakan pendapatan dari hasil lelang aset yang dihapuskan berasal dari:
 - a. Sekretariat BPP Bahasa Rp53.152.110
 - b. Balai Bahasa Provinsi Yogyakarta Rp3.456.789
 - c. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Rp13.555.555
 - d. Balai Bahasa Provinsi Bali Rp13.365.554
 - e. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Rp5.550.000
 - f. Balai Bahasa Provinsi Papua Rp7.299.999
 - g. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Rp13.333.339
 - h. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara Rp10.599.999
 - i. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah Rp10.300.000
 - j. Kantor Bahasa Provinsi Jambi Rp5.777.777

- k. Kantor Bahasa Provinsi NTB Rp78.095.630
 - l. Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu Rp7.777.777
 - m. Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Rp15.081.010
- 2. Pendapatan dari Pemindahitan BMN Lainnya Rp35.667.999 yang merupakan pendapatan dari hasil lelang aset yang dihapuskan berasal dari:
 - a. Sekretariat BPP Bahasa Rp27.999.999
 - b. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat Rp6.365.000
 - c. Balai Bahasa Provinsi Aceh Rp1.303.000
- 3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Rp306.288.100 berasal dari:
 - a. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Rp157.989.800
 - b. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Rp148.298.300
- 4. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Rp2.275.700.000 berasal dari satker Pusat Pembinaan yang merupakan setoran hasil tes UKBI dengan tarif baru sesuai dengan PP No 22 Tahun 2023.
- 5. Pendapatan Pengembangan SDM Lainnya Rp548.260.000 berasal dari Pusat Pembinaan yang merupakan pendapatan dari tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dengan tarif yang masih menggunakan PP No 82 Tahun 2016
- 6. Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual Rp90.392.274 berasal dari satker Pusat Pengembangan dan Pelindungan Rp54.026.500 yang merupakan pendapatan royalti KBBI dan satker Balai Bahasa Yogyakarta Rp6.030.000 yang merupakan royalti Kamus Basa Jawa Edisi Kedua, serta Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Rp30.335.774 yang merupakan setoran atas temuan BPK RI.
- 7. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Rp44.800 berasal dari satker Balai Bahasa Yogyakarta yang merupakan denda keterlambatan pengiriman pengadaan laptop.
- 8. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL Rp221.485.130 yang berasal dari satker :
 - a. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Rp20.734.724;
 - b. Balai Bahasa Provinsi Yogyakarta Rp4.497.000;
 - c. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Rp43.430.500;
 - d. Balai Bahasa Bali Rp7.000.000;
 - e. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sebesar Rp1.911;
 - f. Pusat Pembinaan sebesar Rp1.081.098;

- g. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan Rp1.681.935;
 - h. Balai Bahasa Provinsi Papua Rp4.600.033;
 - i. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Rp1.918;
 - j. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Rp3.500.258;
 - k. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara Rp2.344;
 - l. Balai Bahasa Provinsi Riau Rp62.497.139;
 - m. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah Rp5.462.800;
 - n. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah Rp7.949.922;
 - o. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Rp1.840.000;
 - p. Kantor Bahasa Provinsi Jambi Rp5.307.226;
 - q. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Rp44.000.000;
 - r. Kantor Bahasa Provinsi NTB Rp4.960.000;
 - s. Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Rp4.555;
 - t. Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung Rp470;
 - u. Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu Rp1.830.000;
 - v. Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara Rp1.100.022; dan
 - w. Pusat Penguanan dan Pemberdayaan Bahasa Rp1.275.
9. Penerimaan kembali belanja barang TAYL Rp359.586.888 berasal dari:
- a. satker Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Rp4.053.264;
 - b. Balai Bahasa Provinsi Yogyakarta Rp2.428.000;
 - c. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Rp1.500.000;
 - d. Balai Bahasa Provinsi Bali Rp9.618.153;
 - e. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Rp33.432.154;
 - f. Balai Bahasa Provinsi Papua Rp3.082.000;
 - g. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Rp285.000;
 - h. Balai Bahasa Provinsi Aceh Rp9.516.329;
 - i. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Rp1.800.000;
 - j. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat Rp12.984.129;
 - k. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah Rp23.550.000;
 - l. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah Rp7.128.000;
 - m. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Rp11.967.500;
 - n. Kantor Bahasa Provinsi Lampung Rp122.580.000;
 - o. Kantor Bahasa Provinsi Jambi Rp6.549.209;

- p. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Rp17.320.000;
- q. Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara Rp20.962.500;
- r. Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu Rp7.617.600;
- s. Kantor Bahasa Provinsi Banten Rp4.045.000;
- t. Kantor Bahasa Provinsi Kep. Riau Rp4.290.000;
- u. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara Rp3.510.000;
- v. Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara Rp193.500; dan
- w. Kantor Bahasa Provinsi NTT Rp51.174.550.
10. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp10.000.000 berasal dari satker Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat.
11. Pendapatan Anggaran Lain-lain Rp505.341 berasal dari Pusat Pembinaan yang merupakan setoran kelebihan bayar biaya tes UKBI oleh peserta uji.

Realisasi Belanja
Negara
Rp538.953.306.544

B.2.Belanja

Realisasi Belanja UAPPA Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp538.953.306.544 atau 98,26% dari anggaran belanja sebesar Rp548.474.648.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel B.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

BELANJA	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	144.721.742.000	142.781.333.797	98,66%
Belanja Barang	335.778.603.000	328.249.674.322	97,76%
Belanja Modal	67.974.303.000	67.922.298.425	99,92%
Jumlah Belanja	548.474.648.000	538.953.306.544	98,26%

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp142.781.333.797 atau 98,66% dari anggaran Rp144.721.742.000. Realisasi belanja barang sebesar Rp328.249.674.322 atau sebesar 97,76% dari anggaran Rp335.778.603.000. Sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp67.922.298.425 atau 99,92% dari anggaran Rp67.974.303.000.

Tabel B.2.1
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

BELANJA	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja Pegawai	142.781.333.797	140.941.480.977	1.839.852.820	1,31%
Belanja Barang	328.249.674.322	356.955.557.349	(28.705.883.027)	(8,04%)
Belanja Modal	67.922.298.425	7.917.950.756	60.004.347.669	757,83%
Jumlah Belanja	538.953.306.544	505.814.989.082	33.138.317.462	6,55%

Realisasi belanja periode 31 Desember 2023 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,55%, terdapat kenaikan belanja signifikan yang berasal dari belanja modal dikarenakan pada tahun 2023 terdapat pembangunan gedung kantor pada satker Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dan Kantor Bahasa Provinsi Maluku.

Perbandingan kenaikan/penurunan di masing-masing satker adalah sebagai berikut

No	Satker	2023	2022	Naik/Turun	%
1	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	124.879.316.153	103.096.911.237	21.782.404.916	21,13%
2	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	8.392.073.391	6.444.955.399	1.947.117.992	30,21%
3	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	10.377.257.404	9.525.072.309	852.185.095	8,95%
4	BALAI BAHASA BALI	10.375.421.384	8.608.215.423	1.767.205.961	20,53%
5	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	37.452.110.315	17.841.226.963	19.610.883.352	109,92%
6	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	38.096.271.907	158.593.035.093	(120.496.763.186)	(75,98%)
7	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	6.565.624.475	5.718.428.820	847.195.655	14,82%
8	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	8.556.264.460	5.525.143.742	3.031.120.718	54,86%
9	BALAI BAHASA PAPUA	9.085.793.428	8.971.657.998	114.135.430	1,27%
10	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	13.312.179.458	6.691.469.332	6.620.710.126	98,94%
11	BALAI BAHASA JAWA BARAT	11.920.438.375	9.715.142.426	2.205.295.949	22,70%
12	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	15.952.059.337	9.354.447.108	6.597.612.229	70,53%
13	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	10.228.827.538	8.390.603.541	1.838.223.997	21,91%
14	BALAI BAHASA RIAU	7.234.377.879	6.729.798.934	504.578.945	7,50%
15	BALAI BAHASA ACEH	8.866.129.470	6.153.753.170	2.712.376.300	44,08%
16	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	9.242.851.957	5.460.238.245	3.782.613.712	69,28%
17	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	6.519.361.026	4.973.294.375	1.546.066.651	31,09%
18	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	7.242.712.827	8.096.407.233	(853.694.406)	(10,54%)
19	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	10.641.316.859	9.259.767.348	1.381.549.511	14,92%
20	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	5.442.555.299	4.218.165.892	1.224.389.407	29,03%
21	KANTOR BAHASA LAMPUNG	8.218.013.422	5.764.117.570	2.453.895.852	42,57%
22	KANTOR BAHASA JAMBI	6.624.649.741	5.786.630.051	838.019.690	14,48%
23	KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	7.981.459.782	7.003.678.235	977.781.547	13,96%
24	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	9.028.996.455	8.580.146.487	448.849.968	5,23%
25	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	6.943.541.352	5.307.648.446	1.635.892.906	30,82%
26	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4.304.542.973	3.297.032.710	1.007.510.263	30,56%
27	KANTOR BAHASA BENGKULU	6.749.321.971	3.190.956.662	3.558.365.309	111,51%
28	KANTOR BAHASA BANTEN	6.386.867.829	4.469.002.337	1.917.865.492	42,91%
29	KANTOR BAHASA GORONTALO	29.778.193.065	5.129.537.191	24.648.655.874	480,52%
30	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	8.142.050.496	6.386.867.587	1.755.182.909	27,48%
31	KANTOR BAHASA MALUKU	38.215.210.447	8.436.160.884	29.779.049.563	352,99%
32	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	5.312.799.198	4.043.339.330	1.269.459.868	31,40%
33	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	7.333.745.502	6.045.699.269	1.288.046.233	21,31%
34	PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA	33.550.971.369	29.006.437.735	4.544.533.634	15,67%
	Jumlah	538.953.306.544	505.814.989.082	33.138.317.462	6,55%

Belanja Pegawai
Rp142.781.333.797

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2021 adalah masing-masing sebesar sebesar Rp142.781.333.797 dan Rp140.941.480.977. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,31 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya penerimaan pegawai Pegawai Pemerintah dengan Penjanjian Kerja (P3K) dan adanya pengangkatan pejabat fungsional.

Tabel B.3
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	53.341.612.400	54001269462	(659.657.062)	(1,22%)
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	843.347	894381	(51.034)	(5,71%)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3.648.948.150	3679368200	(30.420.050)	(0,83%)
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1.153.843.052	1152030051	1.813.001	0,16%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	809.458.000	701385000	108.073.000	15,41%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	873.596.000	4102639000	(3.229.043.000)	(78,71%)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	99.006.066	215456013	(116.449.947)	(54,05%)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3.053.154.780	3101676180	(48.521.400)	(1,56%)
511129	Belanja Uang Makan PNS	6.590.437.000	7323506000	(733.069.000)	(10,01%)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2.477.919.325	2168230000	309.689.325	14,28%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	8.899.500	0	8.899.500	100,00%
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	188	0	188	100,00%
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.620.000	0	1.620.000	100,00%
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	217.260	0	217.260	100,00%
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1.110.000	0	1.110.000	100,00%
512211	Belanja Uang Lembur	1.444.937.000	1417596600	27.340.400	1,93%
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	69.094.785.403	62922760090	6.172.025.313	9,81%
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	14.501.326	0	14.501.326	100,00%
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	166.445.000	154670000	11.775.000	7,61%
Jumlah		142.781.333.797	140.941.480.977	1.839.852.820	1,31%

Pada tahun 2023 terdapat pengangkatan pegawai P3K 1 orang dan pengangkatan ke jabatan fungsional sebanyak 173 orang sehingga menyebabkan kenaikan tunjangan kinerja yang cukup signifikan sebesar Rp6.172.025.313, dengan rincian pengangkatan pegawai per satker sebagai berikut.

No.	UNIT KERJA	NAMA JABATAN	PNS	P3K
1	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1 Orang	
2	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	Penerjemah Ahli Madya	1 Orang	
3	Pusat Penguanan dan Pemberdayaan Bahasa	Penerjemah Ahli Muda	2 Orang	
4	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Penerjemah Ahli Pertama	1 Orang	
5	Pusat Penguanan dan Pemberdayaan Bahasa	Penerjemah Ahli Pertama	1 Orang	
6	Sekretariat BPP Bahasa	Perencana Ahli Madya	1 Orang	
7	Sekretariat BPP Bahasa	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	1 Orang
8	Sekretariat BPP Bahasa	Pranata Humas Ahli Muda	1 Orang	
9	Balai Bahasa Provinsi Aceh	Widyabasa Ahli Madya	1 Orang	
10	Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Widyabasa Ahli Madya	2 Orang	
11	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Widyabasa Ahli Madya	4 Orang	
12	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Widyabasa Ahli Madya	2 Orang	
13	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	Widyabasa Ahli Madya	1 Orang	
14	Balai Bahasa Provinsi Riau	Widyabasa Ahli Madya	1 Orang	
15	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Widyabasa Ahli Madya	2 Orang	
16	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Widyabasa Ahli Madya	3 Orang	
17	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	Widyabasa Ahli Madya	1 Orang	
18	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	Widyabasa Ahli Madya	1 Orang	
19	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Widyabasa Ahli Madya	5 Orang	
20	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Widyabasa Ahli Madya	6 Orang	
21	Pusat Penguanan dan Pemberdayaan Bahasa	Widyabasa Ahli Madya	1 Orang	
22	Balai Bahasa Provinsi Aceh	Widyabasa Ahli Muda	5 Orang	
23	Balai Bahasa Provinsi Bali	Widyabasa Ahli Muda	1 Orang	
24	Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Widyabasa Ahli Muda	4 Orang	
25	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	Widyabasa Ahli Muda	2 Orang	
26	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Widyabasa Ahli Muda	2 Orang	
27	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Widyabasa Ahli Muda	6 Orang	
28	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	Widyabasa Ahli Muda	3 Orang	
29	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	Widyabasa Ahli Muda	5 Orang	
30	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	Widyabasa Ahli Muda	1 Orang	
31	Balai Bahasa Provinsi Papua	Widyabasa Ahli Muda	2 Orang	
32	Balai Bahasa Provinsi Riau	Widyabasa Ahli Muda	4 Orang	
33	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Widyabasa Ahli Muda	5 Orang	
34	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Widyabasa Ahli Muda	2 Orang	
35	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	Widyabasa Ahli Muda	3 Orang	
36	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	Widyabasa Ahli Muda	7 Orang	
37	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Widyabasa Ahli Muda	1 Orang	
38	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Widyabasa Ahli Muda	1 Orang	
39	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Widyabasa Ahli Muda	1 Orang	
40	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	Widyabasa Ahli Muda	3 Orang	
41	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	Widyabasa Ahli Muda	1 Orang	
42	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Widyabasa Ahli Muda	3 Orang	
43	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	Widyabasa Ahli Muda	1 Orang	
44	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Widyabasa Ahli Muda	8 Orang	
45	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Widyabasa Ahli Muda	8 Orang	
46	Pusat Penguanan dan Pemberdayaan Bahasa	Widyabasa Ahli Muda	3 Orang	
47	Balai Bahasa Provinsi Aceh	Widyabasa Ahli Pertama	6 Orang	
48	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	Widyabasa Ahli Pertama	1 Orang	
49	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Widyabasa Ahli Pertama	1 Orang	
50	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	Widyabasa Ahli Pertama	2 Orang	
51	Balai Bahasa Provinsi Riau	Widyabasa Ahli Pertama	1 Orang	
52	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Widyabasa Ahli Pertama	2 Orang	
53	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Widyabasa Ahli Pertama	1 Orang	
54	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Widyabasa Ahli Pertama	4 Orang	
55	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Widyabasa Ahli Pertama	4 Orang	
56	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Widyabasa Ahli Pertama	1 Orang	
57	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	Widyabasa Ahli Pertama	1 Orang	
58	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Widyabasa Ahli Pertama	2 Orang	
59	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Widyabasa Ahli Pertama	1 Orang	
60	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	Widyabasa Ahli Pertama	4 Orang	
61	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	Widyabasa Ahli Pertama	5 Orang	
62	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Widyabasa Ahli Pertama	4 Orang	
63	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Widyabasa Ahli Pertama	6 Orang	
64	Pusat Penguanan dan Pemberdayaan Bahasa	Widyabasa Ahli Pertama	5 Orang	
65	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1 Orang	
66	Sekretariat BPP Bahasa	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1 Orang	

TOTAL

173 Orang 1 Orang

Selanjutnya realisasi pagu dan realisasi belanja pegawai per satker adalah sebagai berikut.

No.	Satker	Pagu	Belanja	Pengembalian	Belanja Netto
1	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	75.122.848.000	74.961.234.972	5.155.566	74.956.079.406
2	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	2.689.598.000	2.682.190.842	3.730.428	2.678.460.414
3	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	2.471.167.000	2.470.446.801	375	2.470.446.426
4	BALAI BAHASA BALI	2.109.574.000	1.847.984.635	7.000.000	1.840.984.635
5	PUTUS PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	4.489.212.000	4.247.071.729	2.201	4.247.069.528
6	PUTUS PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	4.103.014.000	3.798.217.470	1.675.827	3.796.541.643
7	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	2.230.379.000	2.157.504.009	3.321.178	2.154.182.831
8	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	2.014.805.000	1.991.593.014	821	1.991.592.193
9	BALAI BAHASA PAPUA	2.043.409.000	2.043.322.026	431	2.043.321.595
10	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	2.739.066.000	2.684.743.656	578	2.684.743.078
11	BALAI BAHASA JAWA BARAT	2.739.981.000	2.622.588.146	26.100.367	2.596.487.779
12	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	2.802.829.000	2.733.427.839	-	2.733.427.839
13	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	2.555.992.000	2.554.669.495	142.188	2.554.527.307
14	BALAI BAHASA RIAU	2.435.138.000	2.434.213.419	-	2.434.213.419
15	BALAI BAHASA ACEH	2.639.516.000	2.607.062.993	920.744	2.606.142.249
16	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	2.857.930.000	2.698.594.651	839	2.698.593.812
17	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1.897.436.000	1.887.175.610	107.551	1.887.068.059
18	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1.195.843.000	1.136.279.590	6.405.468	1.129.874.122
19	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	2.029.801.000	2.021.877.064	248	2.021.876.816
20	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1.242.971.000	1.240.587.627	1.096	1.240.586.531
21	KANTOR BAHASA LAMPUNG	1.927.106.000	1.888.244.108	686	1.888.243.422
22	KANTOR BAHASA JAMBI	2.269.844.000	2.254.863.057	190.358	2.254.672.699
23	KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1.701.811.000	1.670.909.843	1.109	1.670.908.734
24	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	2.118.740.000	2.116.220.612	751	2.116.219.861
25	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	1.867.998.000	1.861.769.686	270	1.861.769.416
26	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	687.983.000	687.781.438	-	687.781.438
27	KANTOR BAHASA Bengkulu	1.157.595.000	1.140.058.077	364	1.140.057.713
28	KANTOR BAHASA BANTEN	1.174.488.000	1.153.581.531	-	1.153.581.531
29	KANTOR BAHASA GORONTALO	988.294.000	972.585.583	290	972.585.293
30	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	1.268.456.000	1.264.640.061	864	1.264.639.197
31	KANTOR BAHASA MALUKU	1.399.216.000	1.389.910.166	4.400.750	1.385.509.416
32	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1.137.998.000	1.104.999.137	326	1.104.998.811
33	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	957.890.000	948.376.435	286	948.376.149
34	PUTUS PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA	3.653.814.000	3.565.771.240	805	3.565.770.435
jumlah		144.721.742.000	142.840.496.562	59.162.765	142.781.333.797

Belanja Barang

Rp328.249.674.322

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar masing-masing sebesar Rp328.249.674.322 dan Rp356.955.557.349. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 8,04% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. pada tahun 2023 tidak terdapat anggaran yang berasal dari BA BUN;
2. adanya pengalihan belanja barang ke belanja modal untuk pembangunan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dan Kantor Bahasa Provinsi Maluku.

**Tabel B.4
Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022**

URAIAN	2023	2022	Naik Turun	%
Belanja Barang Operasional	27.171.310.029	25.282.521.373	1.888.788.656	7,47%
Belanja Barang Non Operasional	58.489.267.242	37.457.206.724	21.032.060.518	56,15%
Belanja Barang Persediaan	4.823.088.859	2.591.807.948	2.231.280.911	86,09%
Belanja Jasa	68.769.720.308	48.876.367.436	19.893.352.872	40,70%
Belanja Pemeliharaan	15.369.658.715	13.237.765.213	2.131.893.502	16,10%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	149.523.858.860	104.105.162.194	45.418.696.666	43,63%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	3.653.424.759	1.016.518.987	2.636.905.772	259,41%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	313.920.000	124.268.681.974	(123.954.761.974)	(99,75%)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	135.425.550	119.525.500	15.900.050	13,30%
Jumlah	328.249.674.322	356.955.557.349	(28.705.883.027)	(8,04%)

Realiasi belanja barang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp328.249.674.322 atau 97,76% dari anggaran sebesar Rp335.778.603.000. Berikut perbandingan realisasi belanja dengan pagu belanja adalah sebagai berikut.

URAIAN	Anggaran	Realisasi Belanja	Pengembalian	Netto	%
Belanja Barang Operasional	27.616.433.000	27.172.450.029	1.140.000	27.171.310.029	98,39%
Belanja Barang Non Operasional	59.925.827.000	58.528.570.390	39.303.148	58.489.267.242	97,60%
Belanja Barang Persediaan	4.881.040.000	4.823.088.859	-	4.823.088.859	98,81%
Belanja Jasa	69.811.762.000	68.829.103.704	59.383.396	68.769.720.308	98,51%
Belanja Pemeliharaan	15.771.524.000	15.392.028.383	22.369.668	15.369.658.715	97,45%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	153.545.367.000	150.844.799.326	1.320.940.466	149.523.858.860	97,38%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	3.775.350.000	3.711.296.099	57.871.340	3.653.424.759	96,77%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	315.300.000	313.920.000	-	313.920.000	99,56%
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada	136.000.000	135.425.550	-	135.425.550	99,58%
Jumlah	335.778.603.000	329.750.682.340	1.501.008.018	328.249.674.322	97,76%

Pagu dan realisasi belanja barang masing-masing satker adalah sebagai berikut.

No.	Satker	Pagu	Belanja	Pengembalian	Belanja Netto	%
1	SEKRETARIAT BPP BAHASA	47.346.303.000	45.893.280.465	550.462.327	45.342.818.138	95,77%
2	BALAI BAHASA YOGYAKARTA	5.659.026.000	5.602.553.167	1.933.940	5.600.619.227	98,97%
3	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	7.857.623.000	7.789.631.628	14.837.650	7.774.793.978	98,95%
4	BALAI BAHASA BALI	8.561.381.000	8.442.647.373	35.278.624	8.407.368.749	98,20%
5	PUSBANGLIN	32.812.982.000	31.931.429.368	19.332.581	31.912.096.787	97,25%
6	PUTSAR PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	35.797.431.000	34.608.137.561	308.407.297	34.299.730.264	95,82%
7	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	4.341.182.000	4.302.307.510	38.000.866	4.264.306.644	98,23%
8	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	6.559.849.000	6.454.810.255	4.691.988	6.450.118.267	98,33%
9	BALAI BAHASA PAPUA	6.875.898.000	6.875.692.327	5.520.494	6.870.171.833	99,92%
10	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	10.176.373.000	10.078.184.380	450.000	10.077.734.380	99,03%
11	BALAI BAHASA JAWA BARAT	9.058.730.000	8.974.013.900	-	8.974.013.900	99,06%
12	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	13.066.014.000	13.054.284.998	-	13.054.284.998	99,91%
13	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	7.149.605.000	7.081.374.231	8.124.000	7.073.250.231	98,93%
14	BALAI BAHASA RIAU	4.696.119.000	4.688.663.460	1.470.000	4.687.193.460	98,81%
15	BALAI BAHASA ACEH	6.161.852.000	6.075.970.660	11.626.500	6.064.344.160	98,42%
16	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	5.955.050.000	5.875.078.145	-	5.875.078.145	98,66%
17	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	4.350.009.000	4.343.617.567	4.842.500	4.338.775.067	99,74%
18	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	6.192.985.000	5.994.812.305	-	5.994.812.305	96,80%
19	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	7.813.022.000	7.788.008.872	-	7.788.008.872	99,68%
20	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	4.122.687.000	4.099.586.006	4.630.000	4.094.956.006	99,33%
21	KANTOR BAHASA LAMPUNG	6.228.630.000	6.202.353.000	-	6.202.353.000	99,58%
22	KANTOR BAHASA JAMBI	4.170.897.000	4.125.326.066	3.475.544	4.121.850.522	98,82%
23	KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	6.279.244.000	6.179.421.048	-	6.179.421.048	98,41%
24	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	6.478.161.000	6.517.541.554	58.319.335	6.459.222.219	99,71%
25	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	4.995.179.000	4.949.292.236	24.094.150	4.925.198.086	98,60%
26	KANTOR BAHASA BANGKA BELITUNG	3.601.668.000	3.565.939.335	7.820.000	3.558.119.335	98,79%
27	KANTOR BAHASA Bengkulu	5.446.364.000	5.384.354.578	-	5.384.354.578	98,86%
28	KANTOR BAHASA BANTEN	5.111.019.000	5.110.005.567	-	5.110.005.567	99,98%
29	KANTOR BAHASA GORONTALO	4.287.756.000	4.203.451.412	7.328.450	4.196.122.962	97,86%
30	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	6.828.488.000	6.803.386.299	4.770.000	6.798.616.299	99,56%
31	KANTOR BAHASA MALUKU	7.176.478.000	7.111.969.532	20.073.585	7.091.895.947	98,82%
32	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	4.120.193.000	4.054.211.187	6.300.000	4.047.911.187	98,25%
33	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	6.409.788.000	6.263.787.227	-	6.263.787.227	97,72%
34	PUSTANDA	30.090.617.000	29.325.559.121	359.218.187	28.966.340.934	96,26%
JUMLAH		335.778.603.000	329.750.682.340	1.501.008.018	328.249.674.322	97,76%

Belanja Modal
Rp67.922.298.425

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp67.922.298.425 dan Rp7.917.950.756. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 757,83% dibandingkan TA 2022 disebabkan adanya renovasi penambahan ruang Gedung Kantor, pembelian peralatan mesin, dan yang signifikan adalah untuk pembangunan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dan kantor Bahasa Provinsi Maluku. Berikut perbandingan realisasi anggaran belanja modal tahun 2023 dan tahun 2022.

**Tabel B.5
Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022**

Akun	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.582.274.697	2.616.678.250	10.965.596.447	419,07%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.726.779.293	3.392.246.358	49.334.532.935	1454,33%
536111	Belanja Modal Lainnya	-	73.927.000	(73.927.000)	(100,00%)
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	33.680.000	-	33.680.000	100,00%
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	680.000	-	680.000	100,00%
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	65.900.000	36.950.000	28.950.000	78,35%
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1.165.709.568	1.651.803.948	(486.094.380)	(29,43%)
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	347.274.867	146.345.200	200.929.667	137,30%
Jumlah		67.922.298.425	7.917.950.756	60.004.347.669	757,83%

Rincian pagu dan realisasi belanja modal per satker adalah sebagai berikut.

No.	Satker	Pagu	Realisasi	%
1	SEKRETARIAT BPP BAHASA	4.581.506.000	4.580.418.609	99,98%
2	BALAI BAHASA YOGYAKARTA	113.000.000	112.993.750	99,99%
3	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	132.200.000	132.017.000	99,86%
4	BALAI BAHASA BALI	127.200.000	127.068.000	99,90%
5	PUSBANGLIN	1.306.100.000	1.292.944.000	98,99%
6	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	147.800.000	147.135.000	99,55%
7	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	115.000.000	114.554.000	99,61%
8	BALAI BAHASA PAPUA	172.300.000	172.300.000	100,00%
9	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	549.709.000	549.702.000	100,00%
10	BALAI BAHASA JAWA BARAT	350.000.000	349.936.696	99,98%
11	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	165.232.000	164.346.500	99,46%
12	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	601.500.000	601.050.000	99,93%
13	BALAI BAHASA RIAU	113.200.000	112.971.000	99,80%
14	BALAI BAHASA ACEH	196.300.000	195.643.061	99,67%
15	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	669.180.000	669.180.000	100,00%
16	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	293.640.000	293.517.900	99,96%
17	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	118.200.000	118.026.400	99,85%
18	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	832.206.000	831.431.171	99,91%
19	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	107.200.000	107.012.762	99,83%
20	KANTOR BAHASA LAMPUNG	127.500.000	127.417.000	99,93%
21	KANTOR BAHASA JAMBI	248.300.000	248.126.520	99,93%
22	KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	131.359.000	131.130.000	99,83%
23	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	453.569.000	453.554.375	100,00%
24	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	156.700.000	156.573.850	99,92%
25	KANTOR BAHASA BANGKA BELITUNG	59.100.000	58.642.200	99,23%
26	KANTOR BAHASA BENGKULU	225.100.000	224.909.680	99,92%
27	KANTOR BAHASA BANTEN	123.400.000	123.280.731	99,90%
28	KANTOR BAHASA GORONTALO	24.635.397.000	24.609.484.810	99,89%
29	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	78.980.000	78.795.000	99,77%
30	KANTOR BAHASA MALUKU	29.741.036.000	29.737.805.084	99,99%
31	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	160.000.000	159.889.200	99,93%
32	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	122.000.000	121.582.126	99,66%
33	PUSTANDA	1.020.389.000	1.018.860.000	99,85%
Jumlah		67.974.303.000	67.922.298.425	99,92%

Realisasi belanja modal pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebesar Rp67.922.298.425 atau 99,92% dari pagu anggaran. Perbandingan realisasi belanja modal dengan pagu anggaran adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Anggaran	Belanja	Pengembalian	Belanja Netto	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.623.830.000	13.582.274.697	-	13.582.274.697	99,69%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.727.584.000	52.726.779.293	-	52.726.779.293	100,00%
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	33.680.000	33.680.000	-	33.680.000	100,00%
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	680.000	680.000	-	680.000	100,00%
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	65.900.000	65.900.000	-	65.900.000	100,00%
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1.165.711.000	1.165.709.568	-	1.165.709.568	100,00%
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	356.918.000	347.764.867	490.000	347.274.867	97,30%
Jumlah		67.974.303.000	67.922.788.425	490.000	67.922.298.425	99,92%

Belanja Modal Tanah
Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar 0. Pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi belanja modal tanah pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp 13.582.954.697

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp13.582.954.697 mengalami kenaikan sebesar 419,09 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.616.678.250. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2023 untuk membeli perlengkapan kantor berupa PC, laptop, meja, kursi, dan peralatan kantor lainnya untuk menunjang pekerjaan pegawai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	Naik Turun	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.582.274.697	2.616.678.250	10.965.596.447	419,07%
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	680.000	0	680.000	100,00%
Jumlah	13.582.954.697	2.616.678.250	10.966.276.447	419,09%

Belanja modal
Gedung dan
Bangunan sebesar
Rp 54.339.343.728

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 54.339.343.728 dan Rp 5.227.345.506. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 939,52 persen dibandingkan Realisasi TA 2022.

Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Pembangunan Gedung Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dan Kantor Bahasa Provinsi Maluku.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

URAIAN	2023	2022	Naik Turun	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.726.779.293	3.392.246.358	49.334.532.935	1454,33%
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	65.900.000	36.950.000	28.950.000	78,35%
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	1.165.709.568	1.651.803.948	(486.094.380)	(29,43%)
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	347.274.867	146.345.200	200.929.667	137,30%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	33.680.000	0	33.680.000	100,00%
Jumlah	54.339.343.728	5.227.345.506	49.111.998.222	939,52%

Belanja modal Jalan,
Irigasi dan jaringan
Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Belanja modal
lainnya Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp73.927.000. Tidak terdapat belanja modal lainnya pada tahun 2023 pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Perbandingan Realisasi Belanja modal lainnya tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

URAIAN	2023	2022	Naik Turun	%
Belanja Modal Lainnya	0	73.927.000	(73.927.000)	(100,00%)
Jumlah	0	73.927.000	(73.927.000)	(100,00%)

Belanja bantuan
sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 . Tidak terdapat anggaran belanja bantuan sosial pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Aset Lancar
Rp2.642.152.115

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.642.152.115 dan Rp2.130.663.299. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Dibandingkan 31 Desember 2022 terjadi penurunan sebesar Rp511.488.816 atau 24.01%. Kenaikan tersebut disebabkan karena naiknya saldo piutang bukan pajak dan belanja barang dibayar dimuka.

Rincian Aset Lancar pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel C.1
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022

NAMA PERKIRAAN	Catatan	Jumlah		Kenaikan	
		2023	2022	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR	C.1				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	5.777.777	(5.777.777)	(100.00%)
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	500.000	(500.000)	(100.00%)
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	358.062.000	180.191.600	177.870.400	98.71%
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.5	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.1.7	(1.790.310)	(900.958)	(889.352)	(98.71%)
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.8	205.426.540	8.706.478	196.720.062	2.259.47
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.1.9	-	3.519.000	(3.519.000)	(100.00%)
Persediaan	C.1.10	2.080.453.885	1.932.869.402	147.584.483	7.64%
JUMLAH ASET LANCAR		2.642.152.115	2.130.663.299	511.488.816	24.01%

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum

dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. Seluruh sisa UP dan TUP telah disetorkan ke kas negara.

Tabel C.1.1
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	Naik Turun	%
Uang Tunai	0	0	0	0,00%
Rekening Bank	0	0	0	0,00%
Jumlah	0	0	0	0,00%

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp5.777.777, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan tahun 2022 sebesar Rp5.777.777 berasal dari satker Kantor Bahasa Provinsi Jambi yang merupakan hasil lelang inventaris kantor dan telah disetorkan seluruhnya ke kas negara pada tanggal 6 Januari 2023 dengan NTPN 71B1C61QUQ8C9L3A.

Tabel C.1.2
Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	Naik Turun	%
Uang Tunai	0	0	0	0,00%
Rekening Bank	0	5.777.777	(5.777.777)	(100,00%)
Jumlah	0	5.777.777	(5.777.777)	(100,00%)

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp500.000. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel C.1.3
Perbandingan Kas Lainnya dan setara Kas TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	Naik Turun	%
Kas lainnya di Benadahara Pengeluaran	0	500.000	(500.000)	(100,00%)
Kas lainnya di Benadahara Penerimaan	0	0	0	0,00%
Kas lainnya dari hibah	0	0	0	0,00%
Jumlah	0	500.000	(500.000)	(100,00%)

Piutang Bukan Pajak
Rp358.062.000

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp358.062.000 dan Rp180.191.600. Saldo piutang bukan pajak berasal dari satker Balai Bahasa Provinsi Yogyakarta Rp4.225.000 yang merupakan piutang atas Royalti Kamus Basajawa CV. Kanisius dan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Rp353.837.000 yang merupakan piutang Royalti KBBI CV. Adi Perkasa Rp217.098.750 dan PT. Balai Pustaka Rp136.738.250,00.

Tabel C.1.4
Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	Naik Turun	%
Piutang PNBP	358.062.000	0	358.062.000	100,00%
Piutang Lainnya	0	180.191.600	(180.191.600)	(100,00%)
Jumlah	358.062.000	180.191.600	177.870.400	98,71%

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian lancar tagihan perpendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR)
Rp0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1.5

Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2022 dan 2021

URAIAN	2023	2022	Naik Turun	%
Bagian Lancar TP	0	0	0	0,00%
Bagian Lancar TGR	0	0	0	0,00%
Jumlah	0	0	0	0,00%

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua helas) hulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Bagian Lancar Tagihan Penjualan angsuran (TPA) pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-Piutang
Bukan Pajak
Rp(1.790.310)

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar masing-masing Rp(1.790.310) dan Rp(900.958), yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur. Saldo penyisihan piutang tidak tertagih-piutang bukan pajak berasal dari satker Balai Bahasa Provinsi Yogyakarta Rp(21.125) dan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Rp(1.769.185). Penyisihan piutang tidak tertagih-piutang bukan pajak merupakan penyisihan sebesar 0,5% dari piutang bukan pajak.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih herdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.1.7
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jk. Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	358.062.000	0,5%	1.790.310
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	358.062.000		1.790.310
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	358.062.000		1.790.310

Beban yang Harus
Dibayar di Muka
Rp205.426.540

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp205.426.540 dan Rp8.706.478. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari harang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun harang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.1.8

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022

SATKER	URAIAN	2023	2022	Naik Turun	%
Sekretariat BPP Bahasa	Potongan Tunjangan pegawai bulan Desember	23.668.840	8.706.478	14.962.362	171,85%
Pusat Pengembangan dan Pelindungan	Bantuan Pemerintah Belum LPJ	181.757.700	0	181.757.700	100,00%
Jumlah		205.426.540	8.706.478	196.720.062	2259,47%

Belanja dibayar di muka pada satker Sekretariat BPP Bahasa Rp23.668.840 merupakan potongan tunjangan kinerja pegawai bulan Desember 2023 yang dibayarkan secara penuh.

Belanja dibayar di muka pada satker Pusat Pengembangan dan Pelindungan merupakan bantuan pemerintah fasilitasi Lembaga/komunitas sastra yang belum

menyampaikan LPJ sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Bantuan	Penerima	Provinsi	Jumlah Banper	Tahap I	Tahap II	Laporan Akhir
Fasilitasi Komunitas Juli						
	1 Forum Penulis Bacaan Anak	Jawa Barat	64.728.000	45.309.600	19.418.400	laporan tahap I dana 70%, belum ada laporan akhir (100%)
	2 Plak Plik Ngataku	Sulawesi Tengah	132.831.000	92.981.700	39.849.300	laporan tahap I dana 70%, belum ada laporan akhir (100%)
	3 Yayasan Cita Cerita Anak	Jawa Barat	101.820.000	71.274.000	30.546.000	laporan tahap I dana 70%, belum ada laporan akhir (100%)
	4 Yayasan Forum Komunitas Kreatif Sibolga	Sumatra Utara	69.470.000	48.629.000	20.841.000	laporan tahap I dana 70%, belum ada laporan akhir (100%)
Fasilitasi Komunitas September	5 Yayasan Indonesia Buku	DI Yogyakarta	126.440.000	88.508.000	37.932.000	laporan tahap I dana 70%, belum ada laporan akhir (100%)
	6 Komunitas Sastra dan Pelestari Tradisi Rawung Sastra	Jawa Timur	110.570.000	77.399.000	33.171.000	laporan tahap I dana 70%, belum ada laporan akhir (100%)
	Jumlah		605.859.000	424.101.300	181.757.700	

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp3.519.000.

Tidak terdapat saldo pendapatan yang masih harus diterima pada tahun 2023.

Persediaan
Rp2.080.453.885

C.1.10 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/ atau untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.080.453.885 dan Rp1.932.869.402 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1.10
Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Persediaan	2023	2022
Barang Konsumsi	592.819.228	508.433.642
Bahan untuk Pemeliharaan	30.478.642	17.494.561
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.456.461.675	1.400.810.899
Bahan Baku	396.340	489.300
Persediaan Lainnya	298.000	2.492.000
Suku Cadang	-	3.149.000
Jumlah	2.080.453.885	1.932.869.402

Seluruh persediaan Rp2.080.453.885 berada dalam pengusahaan satker.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang Konsumsi meliputi Persediaan Alat Tulis Kantor.

2. Bahan untuk Pemeliharaan meliputi Persediaan alat-alat kebersihan dan rumah tangga.
3. Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat meliputi Buku Cetakan Terbitan Badan Bahasa yang harus diserahkan kepada masyarakat.
4. Bahan Baku meliputi persediaan semen, pasir, cat, dan bahan bangunan, dan
5. Persediaan lainnya meliputi persediaan obat-obatan dan komponen peralatan lainnya.

Saldo Persediaan berasal dari satker:

No.	Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	99.854.700
2	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	8.450.800
3	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	39.192.600
4	BALAI BAHASA BALI	2.382.500
5	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	69.014.821
6	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	62.667.356
7	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	28.657.250
8	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	3.080.000
9	BALAI BAHASA PAPUA	11.629.000
10	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	238.709.195
11	BALAI BAHASA JAWA BARAT	237.000.000
12	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	293.957.095
13	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	401.701.129
14	BALAI BAHASA RIAU	700.000
15	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	162.601.103
16	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1.877.200
17	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	26.179.500
18	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1.926.850
19	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	29.336.116
20	KANTOR BAHASA LAMPUNG	35.362.030
21	KANTOR BAHASA JAMBI	21.428.550
22	KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	3.536.500
23	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	3.475.700
24	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	80.409.133
25	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.088.950
26	KANTOR BAHASA BENGKULU	53.306.000
27	KANTOR BAHASA GORONTALO	6.253.200
28	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	67.416.605
29	KANTOR BAHASA MALUKU	8.713.500
30	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	36.830.549
31	PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA	43.715.953
Jumlah		2.080.453.885

Aset Tetap
Rp1.258.772.062.870

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar sebesar Rp1.258.772.062.870 dan Rp1.218.487.890.931. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Direktorat Jenderal Akuntansi berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Dibandingkan 31 Desember 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp40.284.171.939 atau 3.31%.

Rincian Aset Tetap Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel C.2
Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 2022

NAMA PERKIRAAN	Catatan	Jumlah		Kenaikan	
		2023	2022	Jumlah	%
ASET TETAP	C.2				
Tanah	C.2.1	892.987.805.493	892.768.938.210	218.867.283	0.02%
Peralatan dan Mesin	C.2.2	158.307.919.167	147.411.157.040	10.896.762.127	7.39%
Gedung dan Bangunan	C.2.3	334.999.285.032	335.724.660.464	(725.375.432)	(0.22%)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	4.792.998.750	4.862.923.450	(69.924.700)	(1.44%)
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	8.324.566.234	8.286.679.684	37.886.550	0.46%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	50.506.171.610	4.924.747.073	45.581.424.537	925.56%
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(191.146.683.416)	(175.491.214.990)	(15.655.468.426)	8.92%
JUMLAH ASET TETAP		1.258.772.062.870	1.218.487.890.931	40.284.171.939	3.31%

Terdapat *to do list* Ketidaksesuaian Kode barang Vs Kode Barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Nama Sumber	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Urutan Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No SP2D
1	137544	SEKRETARIAT BPP BAHASA	BAST NONKONTRAKTUAL	00025	13-04-2023	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Layanan Prasarana Internal, Belanja Modal, Belanja ATK, Kegiatan Pengadaan Toren Air Sentral dalam rangka Rehab/remova Gedung Bangunan	4010130999	1	2.000.000	2.000.000	230881701003951
2	137544	SEKRETARIAT BPP BAHASA	BAST NONKONTRAKTUAL	00028	17-04-2023	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Perjudian Paket Meeting dalam kota fullboard kegiatan telah dokumen tender pengadaan toren air di Hotel Holiday Inn, Matraman, Jakarta, tanggal 5-7 April 2023 a.n Syahabudin dkk.	4010130999	1	9.134.000	9.134.000	230881303004961
3	137544	SEKRETARIAT BPP BAHASA	BAST NONKONTRAKTUAL	00041	07-08-2023	521111	Belanja Keperluan Kantor	Pembelian Printer Thermal Mesin Antran	3100203003	1	1.180.000	1.180.000	230881303011497
4	137544	SEKRETARIAT BPP BAHASA	BAST NONKONTRAKTUAL	00060	26-10-2023	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pembelian Shamizu Semi Jet 250 bit Pompa Air	3010305010	1	1.494.000	1.494.000	230881303017764
5	621672	BALAI BAHASA JAWA BARAT	BAST NONKONTRAKTUAL	00011	05-04-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembelian 6 Unit Speaker Tua	3050206008	6	717.450	4.304.700	230221301004823
6	621672	BALAI BAHASA JAWA BARAT	BAST NONKONTRAKTUAL	00012/UP_TU_621672_2023	26-09-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembelian Gordyn PVC set	3050206058	11	260.000	2.860.000	230221301014222
7	621690	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	BAST KONTRAKTUAL	002-BASTP/2023	31-03-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Perangkat Fasilitas Kantor Tahun Anggaran 2023.	3050201008	20	900.000	18.000.000	230041304000897
8	621690	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	BAST KONTRAKTUAL	002-BASTP/2023	31-03-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pekerjaan Pengadaan Perangkat Fasilitas Kantor Tahun Anggaran 2023.	3050201003	40	700.000	28.000.000	230041304000897
9	621708	BALAI BAHASA RIAU	BAST NONKONTRAKTUAL	00011	03-05-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pengadaan 25 Iunit Meja Aula Lipat dan 50 Unit Kursi Aula	3050201003	50	395.000	19.750.000	230081303005964
10	621729	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	BAST NONKONTRAKTUAL	00012/R	10-10-2023	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Aset Pemeliharaan	4010101001	1	103.753.582	103.753.582	2301413020064
11	680544	KANTOR BAHASA BENGKULU	BAST NONKONTRAKTUAL	00018	29-03-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Pembelian Meja, Kursi, dan Rak Buku	3050201003	4	783.020	3.132.080	230161302001728
12	680544	KANTOR BAHASA BENGKULU	BAST NONKONTRAKTUAL	00036	30-05-2023	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	BAST Pembelian Belanja Modal	3050201003	30	550.000	16.500.000	230161302003440

Tanah
Rp892.987.805.493

C.2.1 Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp892.987.805.493 dan Rp892.768.938.210 dengan luas 156.960 m².

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	892.768.938.210
Mutasi tambah:	218.867.283
Mutasi kurang:	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	892.987.805.493

Terdapat mutasi tanah pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dengan transaksi sebagai berikut :

1. Terdapat transaksi hibah masuk pada satker Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 3.253,04 m² senilai Rp218.867.283 sesuai dengan BAST Nomor 066/BA/BPKAD/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang berlokasi di Jalan Gubernur H. Bastari, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang.
2. Terdapat transaksi koreksi perubahan kuantitas (m²) sebesar 3.252 m² terkait pencatatan hibah masuk dimana pencatatan awal sebesar 1 m² pada Balai Bahasa Sumatera Selatan.

Dari ke-34 satuan kerja yang telah tercatat dalam aplikasi SAKTI, terdapat 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja yang sudah memiliki tanah sebagai aset Badan Bahasa. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran CaLBMN Badan Bahasa.

Peralatan dan Mesin
Rp158.307.919.167

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp158.307.919.167 dan Rp147.411.157.040.

Rincian mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	147.411.157.040
Mutasi tambah:	21.364.529.778
Mutasi kurang:	(10.467.767.651)

Saldo per 31 Desember 2023	158.307.919.167
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(130.143.177.573)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	28.164.741.594

Rincian mutasi tambah peralatan dan mesin per satker sebagai berikut.

No	Satker	Keterangan	Jumlah
1	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Reklasifikasi Masuk	3.678.000
2	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Transfer Masuk	4.486.210.572
3	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	86.804.000
4	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Pembelian	2.544.370.100
5	BALAI BAHASA YOGYAKARTA	Transfer Masuk	46.851.562
6	BALAI BAHASA YOGYAKARTA	Pembelian	112.993.750
7	BALAI BAHASA SULSEL	Transfer Masuk	46.851.562
8	BALAI BAHASA SULSEL	Pembelian	132.017.000
9	BALAI BAHASA BALI	Saldo Awal	1.900.000
10	BALAI BAHASA BALI	Pembelian	119.718.000
11	BALAI BAHASA BALI	Reklasifikasi Masuk	32.688.000
12	BALAI BAHASA BALI	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	72.198.540
13	BALAI BAHASA BALI	Transfer Masuk	46.851.562
14	BALAI BAHASA BALI	Perolehan Lainnya	1.900.000
15	BALAI BAHASA BALI	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	7.350.000
16	PUSBANLIN	Pembelian	1.292.944.000
17	PUSBANLIN	Transfer Masuk	46.851.562
18	BALAI BAHASA SUMBAR	Pembelian	147.135.000
19	BALAI BAHASA SUMBAR	Transfer Masuk	46.851.562
20	BALAI BAHASA KALSEL	Pembelian	114.554.000
21	BALAI BAHASA KALSEL	Transfer Masuk	46.851.562
22	BALAI BAHASA PAPUA	Perolehan Lainnya	1.180.000
23	BALAI BAHASA PAPUA	Reklasifikasi Masuk	1.180.000
24	BALAI BAHASA PAPUA	Pembelian	172.300.000
25	BALAI BAHASA PAPUA	Transfer Masuk	46.851.562
26	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.665.000
27	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	17.760.000
28	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	Transfer Masuk	46.851.562
29	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	Pembelian	548.037.000
30	BALAI BAHASA JAWA BARAT	Reklasifikasi Masuk	30.726.300
31	BALAI BAHASA JAWA BARAT	Transfer Masuk	46.851.562
32	BALAI BAHASA JAWA BARAT	Pembelian	342.771.996
33	BALAI BAHASA JAWA BARAT	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	2.860.000
34	BALAI BAHASA JATENG	Pembelian	164.346.500
35	BALAI BAHASA JATENG	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	41.680.500
36	BALAI BAHASA JATENG	Transfer Masuk	46.851.562
37	BALAI BAHASA SUMUT	Pembelian	555.050.000
38	BALAI BAHASA SUMUT	Transfer Masuk	46.851.562
39	BALAI BAHASA RIAU	Transfer Masuk	46.851.562
40	BALAI BAHASA RIAU	Reklasifikasi Masuk	32.280.000
41	BALAI BAHASA RIAU	Pembelian	93.221.000
42	BALAI BAHASA ACEH	Transfer Masuk	46.851.562
43	BALAI BAHASA ACEH	Reklasifikasi Masuk	41.536.000
44	BALAI BAHASA ACEH	Pembelian	195.643.061
45	BALAI BAHASA SUMSEL	Transfer Masuk	46.851.562
46	BALAI BAHASA SUMSEL	Reklasifikasi Masuk	9.971.000
47	BALAI BAHASA SUMSEL	Pembelian	669.180.000
48	BALAI BAHASA KALBAR	Reklasifikasi Masuk	10.198.900
49	BALAI BAHASA KALBAR	Saldo Awal	31.500.000

50	BALAI BAHASA KALBAR	Pembelian	293.517.900
51	BALAI BAHASA KALBAR	Transfer Masuk	46.851.562
52	BALAI BAHASA SULTENG	Pembelian	118.026.400
53	BALAI BAHASA SULTENG	Transfer Masuk	46.851.562
54	BALAI BAHASA KALTENG	Reklasifikasi Masuk	45.197.000
55	BALAI BAHASA KALTENG	Pembelian	831.431.171
56	BALAI BAHASA KALTENG	Transfer Masuk	46.851.562
57	BALAI BAHASA SULUT	Pembelian	107.012.762
58	BALAI BAHASA SULUT	Transfer Masuk	46.851.562
59	KANTOR BAHASA LAMPUNG	Pembelian	127.417.000
60	KANTOR BAHASA LAMPUNG	Reklasifikasi Masuk	86.500.000
61	KANTOR BAHASA LAMPUNG	Transfer Masuk	46.851.562
62	KANTOR BAHASA JAMBI	Transfer Masuk	46.851.562
63	KANTOR BAHASA JAMBI	Pembelian	248.126.520
64	KANTOR BAHASA JAMBI	Reklasifikasi Masuk	18.859.320
65	KANTOR BAHASA KALTIM	Reklasifikasi Masuk	9.580.000
66	KANTOR BAHASA KALTIM	Pembelian	131.130.000
67	KANTOR BAHASA KALTIM	Transfer Masuk	46.851.562
68	KANTOR BAHASA NTB	Pembelian	419.874.375
69	KANTOR BAHASA NTB	Transfer Masuk	46.851.562
70	KANTOR BAHASA SULTRA	Pembelian	156.573.850
71	KANTOR BAHASA SULTRA	Transfer Masuk	46.851.562
72	KANTOR BAHASA BABEL	Transfer Masuk	46.851.562
73	KANTOR BAHASA BABEL	Pembelian	58.642.200
74	KANTOR BAHASA BENGKULU	Reklasifikasi Masuk	103.300.000
75	KANTOR BAHASA BENGKULU	Pembelian	205.277.600
76	KANTOR BAHASA BENGKULU	Transfer Masuk	46.851.562
77	KANTOR BAHASA BENGKULU	Saldo Awal	5.665.000
78	KANTOR BAHASA BANTEN	Pembelian	122.600.731
79	KANTOR BAHASA BANTEN	Reklasifikasi Masuk	119.870.731
80	KANTOR BAHASA BANTEN	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	680.000
81	KANTOR BAHASA BANTEN	Transfer Masuk	46.851.562
82	KANTOR BAHASA GORONTALO	Pembelian	2.461.344.675
83	KANTOR BAHASA GORONTALO	Transfer Masuk	46.851.562
84	KANTOR BAHASA MALUT	Pembelian	78.795.000
85	KANTOR BAHASA MALUT	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	29.189.374
86	KANTOR BAHASA MALUT	Transfer Masuk	46.851.562
87	KANTOR BAHASA MALUKU	Transfer Masuk	46.851.562
88	KANTOR BAHASA MALUKU	Pembelian	37.200.000
89	KANTOR BAHASA KEPRI	Transfer Masuk	46.851.562
90	KANTOR BAHASA KEPRI	Reklasifikasi Masuk	30.580.500
91	KANTOR BAHASA KEPRI	Pembelian	159.889.200
92	KANTOR BAHASA NTT	Reklasifikasi Masuk	61.818.750
93	KANTOR BAHASA NTT	Transfer Masuk	46.851.562
94	KANTOR BAHASA NTT	Pembelian	121.582.126
95	PUSTANDA	Pembelian	982.860.000
96	PUSTANDA	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	36.000.000
97	PUSTANDA	Transfer Masuk	46.851.562
98	PUSTANDA	Penggunaan Kembali BMN yg sudah dihentikan	19.360.000
JUMLAH			21.364.529.778

Rincian mutasi kurang peralatan dan mesin per satker sebagai berikut.

No	Satker	Uraian	Jumlah
1	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Reklasifikasi Keluar	(3.678.000)
2	PUSBANGLIN	Transfer Keluar	(4.439.359.010)
3	PUSBANGLIN	Internal Transfer Keluar	(517.829.390)
4	BALAI BAHASA JAWA BARAT	Reklasifikasi Keluar	(30.726.300)
5	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	Koreksi Pencatatan	(41.680.500)
6	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	Hibah Keluar	(19.526.000)
7	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(145.147.718)
8	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	Reklasifikasi Keluar	(34.242.500)
9	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	Transfer Keluar	(1.857.029.154)
10	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	Koreksi Pencatatan	(17.760.000)
11	BALAI BAHASA ACEH	Reklasifikasi Keluar	(41.536.000)
12	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(46.456.600)
13	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(159.575.000)
14	BALAI BAHASA RIAU	Reklasifikasi Keluar	(32.280.000)
15	BALAI BAHASA RIAU	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(326.442.252)
16	KANTOR BAHASA JAMBI	Reklasifikasi Keluar	(18.859.320)
17	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(328.359.750)
18	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	Reklasifikasi Keluar	(9.971.000)
19	KANTOR BAHASA LAMPUNG	Reklasifikasi Keluar	(86.500.000)
20	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	Reklasifikasi Keluar	(10.198.900)
21	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(400.652.878)
22	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	Reklasifikasi Keluar	(45.197.000)
23	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(250.012.500)
24	KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	Reklasifikasi Keluar	(9.580.000)
25	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(427.487.800)
26	KANTOR BAHASA MALUKU	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(152.667.000)
27	BALAI BAHASA BALI	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(3.090.000)
28	BALAI BAHASA BALI	Reklasifikasi Keluar	(32.688.000)
29	BALAI BAHASA BALI	Koreksi Pencatatan	(1.900.000)
30	KANTOR BAHASA NTT	Reklasifikasi Keluar	(61.818.750)
31	BALAI BAHASA PAPUA	Reklasifikasi Keluar	(1.180.000)
32	BALAI BAHASA PAPUA	Koreksi Pencatatan	(1.180.000)
33	KANTOR BAHASA BENGKULU	Reklasifikasi Keluar	(103.300.000)
34	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(58.378.748)
35	KANTOR BAHASA BANTEN	Reklasifikasi Keluar	(119.870.731)
36	KANTOR BAHASA BANTEN	Penghapusan	(79.006.350)
37	KANTOR BAHASA GORONTALO	Koreksi Pencatatan	(505.000.000)
38	KANTOR BAHASA GORONTALO	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(17.020.000)
39	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	Reklasifikasi Keluar	(30.580.500)
JUMLAH			(10.467.767.651)

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp334.999.285.032 dan Rp335.724.660.464. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	335.724.660.464
Mutasi tambah:	75.062.055.772
Mutasi kurang:	(75.787.431.204)
Saldo per 31 Desember 2023	334.999.285.032
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(58.748.641.100)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	276.110.457.642

Terdapat mutasi tambah dengan rincian sebagai berikut.

No	Satker	Keterangan	Jumlah
1	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Pengembangan Melalui KDP	1.634.093.924
2	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	404.316.705
3	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Transfer Masuk	72.262.267.671
4	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	Koreksi Susulan	119.820.000
5	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	Koreksi Susulan	175.186.290
6	BALAI BAHASA RIAU	Perolehan Lainnya	101.300.000
7	BALAI BAHASA RIAU	Koreksi Susulan	101.300.000
8	BALAI BAHASA ACEH	Koreksi Susulan	126.337.600
9	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	103.753.582
10	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	33.680.000
JUMLAH			75.062.055.772

1. Terdapat transaksi pembelian pada satker Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berupa kesalahan penggunaan akun gedung dan bagunan sebagai akibat dari kontrak per termin bangunan toren air yang semula akun akan didetaikan sebagai pengembangan langsung tetapi tidak bisa dikarenakan nilainya dibawah nilai kapitalisasi sehingga pendetaikannya sebagai gedung baru. Sesuai dengan arahan DJKN harus direklas ke KDP
2. Terdapat transaksi transfer masuk pada satker Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berupa bangunan Gedung kantor permanen, bangunan gedung instalasi lainnya, bangunan lainnya, bangunan parkir terbuka permanen, asrama permanen, rumah negara dalam proses penggolongan B, rumah negara dalam proses penggolongan E yang berasal dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sesuai dengan BAST nomor 1593/I2/LK.01.03/2023 dikarenakan Kebijakan internal Sekretariat Badan Bahasa untuk pemeliharaan gedung dilakukan oleh Sekretariat Badan Bahasa.
3. Terdapat transaksi perolehan lainnya pada satker Balai Bahasa Provinsi Riau berupa kesalahan pencatatan atas kapitalisasi pengembangan gedung dari belanja

pemeliharaan, seharusnya input di koreksi susulan pengembangan, akan tetapi diinput diperolehan lainnya menjadi gedung baru.

4. Terdapat transaksi perolehan reklasifikasi dari ekstra ke intra pada satker Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berupa akun yang terbentuk dari akun belanja 533111 (belanja modal gedung dan bangunan), dikarenakan terdapat kesalahan penggunaan kode barang yang diinput oleh modul komitmen. Komitmen menginput menggunakan kode barang gedung yang tidak dapat didetailkan dengan transaksi pengembangan gedung sehingga operator aset harus mendetailkan menjadi gedung baru dan direklas menjadi akun KDP.
5. Terdapat transaksi pengembangan nilai aset (langsung) pada satker berikut:
 - a. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berupa
 - Sebesar Rp77.358.120,- berupa kapitalisasi pengembangan langsung terhadap bangunan toren air Sentul;
 - Sebesar Rp126.699.840,- berupa pembayaran pelunasan pelengerjaan pelaksanaan renovasi ruang Kepala Badan;
 - Sebesar Rp191.124.745,- berupa pembayaran termin 1 pelaksanaan renovasi ruang Kepala Badan.
 - b. Balai Bahasa Provinsi Sematera Selatan berupa pencatatan kapitalisasi gedung dan bangunan menggunakan belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pekerjaan bongkar pasang kamar mandi lantai I dan II, pengecatan, perbaikan pintu lantai I dan II, pekerjaan bongkar septi tank dan perbaikan, pasang sunblast, kamar mandi kepala, pekerjaan bongkar kaca lantai II, pekerjaan pasang palfond lantai II;
 - c. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa pencatatan kapitalisasi gedung dan bangunan menggunakan belanja barang operasional lainnya berupa berupa pekerjaan perbaikan pengantian atap pojok literasi yang berada di gedung dan bangunan dengan NUP 3.
6. Terdapat transaksi pengembangan melalui KDP pada satker Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berupa:
 - a. Sebesar Rp786.897.074,- merupakan pekerjaan atau kegiatan, rapat, perjadin, belanja ATK, dan belanja lainnya yang timbul dari pekerjaan renovasi ruang Kepala Badan;
 - b. Sebesar Rp847.196.850,- merupakan pekerjaan atau kegiatan, rapat, perjadin, belanja ATK, dan belanja lainnya yang timbul dari pekerjaan bangunan toren air Sentul.
7. Terdapat transaksi koreksi susulan pada satker berikut:

- a. Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan pencatatan kapitalisasi aset atas belanja non aset bangunan gedung kantor permanen;
- b. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara merupakan pencatatan kapitalisasi aset atas belanja non aset bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen;
- c. Balai Bahasa Provinsi Riau merupakan kesalahan pencatatan atas kapitalisasi pengembangan gedung dari belanja pemeliharaan, seharusnya input dikoreksi susulan pengembangan, akan tetapi diinput diperolehan lainnya menjadi gedung baru.
- d. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pencatatan kapitalisasi aset atas belanja non aset bangunan gedung kantor permanen.

Uraian mutasi kurang sebagai berikut.

No	Satker	Keterangan	Jumlah
1	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Koreksi Pencatatan	(86.492.120)
2	PUSBANGLIN	Transfer Keluar	(72.262.267.671)
3	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	Hibah Keluar	(3.337.371.413)
4	BALAI BAHASA RIAU	Koreksi Pencatatan	(101.300.000)
Jumlah			(75.787.431.204)

1. Terdapat transaksi transfer keluar pada satker Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dari Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sesuai dengan BAST nomor 1593/I2/LK.01.03/2023 dikarenakan kebijakan internal Sekretariat Badan Bahasa untuk pemeliharaan gedung dilakukan Sekretariat Badan Bahasa.
2. Terdapat transaksi hibah keluar pada satker Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah berupa hibah gedung dan bangunan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai BAST nomor 030/0012437/2023 tanggal 8 Agustus 2023.
3. Terdapat transaksi koreksi pencatatan pada satker berikut:
 - a. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebesar Rp88.492.120,- yang terdiri dari:
 - sebesar Rp86.492.120,- berupa pembayaran konsultan perencana bangunan toren air pada Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
 - sebesar Rp2.000.000,- berupa pembelian ATK bangunan toren air pada Balai Bahasa Provinsi Riau yang merupakan kesalahan pencatatan atas kapitalisasi pengembangan gedung dari belanja pemeliharaan,

- seharusnya input di koreksi susulan pengembangan, akan tetapi diinput diperolehan lainnya menjadi gedung baru;
- b. Balai Bahasa Provinsi Riau sebesar Rp101.300.000,-.
 4. Terdapat transaksi penghapusan reklassifikasi dari ekstra ke intra pada satker Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berupa kesalahan penggunaan kode akun barang yang dicatat dalam modul komitmen yang seharusnya dicatat sebagai KDP.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp4.792.998.750

C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.792.998.750 dan Rp4.862.923.450 dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4.862.923.450
Mutasi tambah:	2.151.017.290
Mutasi kurang:	(2.220.941.990)
Saldo per 31 Desember 2023	4.792.998.750
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(2.068.206.743)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.724.792.007

Terdapat transaksi transfer masuk yang dilakukan oleh satker Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berasal dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra sesuai dengan BAST nomor 1593/I2/LK.01.03/2023 dikarenakan terdapat kebijakan internal Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk pemeliharaan gedung yang berlokasi di Sentul dilakukan oleh Sekretariat Badan Bahasa.

Uraian mutasi kurang sebagai berikut.

No	Satker	Keterangan	Jumlah
1	PUSBANLIN	Transfer Keluar	(1.104.108.290)
2	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	Hibah Keluar	(64.149.700)
3	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(5.775.000)
4	PUSBANLIN	Transfer Keluar	(1.046.909.000)
JUMLAH			(2.220.941.990)

1. Terdapat transaksi transfer keluar pada satker Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra yang diberikan kepada Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sesuai dengan BAST nomor

- 1593/I2/LK.01.03/2023 dikarenakan kebijakan internal Sekretariat Badan Bahasa untuk pemeliharaan gedung dilakukan oleh Sekretariat Badan Bahasa.
2. Terdapat transaksi penghentian aset dari penggunaan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
 3. Terdapat transaksi hibah keluar yang dilakukan oleh satker Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah berupa hibah gedung dan bangunan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai BAST nomor 030/0012437/2023 tanggal 8 Agustus 2023.

Rincian aset tetap Jalan, Jaringan, irigasi dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp8.324.566.234

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp8.324.566.234 dan Rp8.286.679.684. Aset tetap tersebut berupa buku perpustakaan serta barang bercorak kesenian (alat musik modern/band). Mutasi pada Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	8.286.679.684
Mutasi tambah:	49.996.800
Mutasi kurang:	(12.110.250)
Saldo per 31 Desember 2023	8.324.566.234
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(186.658.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	8.137.908.234

Terdapat mutasi tambah untuk aset tetap lainnya berupa perolehan lainnya pada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat Rp49.996.800.

Terdapat mutasi kurang untuk aset tetap lainnya berupa penghentian aset dari penggunaan Rp(12.110.250) pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.

Rincian aset tetap aset tetap lainnya dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp50.506.171.610 dan Rp4.924.747.073, KDP ini merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4.924.747.073
Mutasi tambah:	56.028.230.470
Mutasi kurang:	(10.446.805.933)
Saldo per 31 Desember 2023	50.506.171.610
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	50.506.171.610

Uraian mutasi tambah KDP adalah sebagai berikut.

No	Satker	Keterangan	Jumlah
1	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Pengembangan KDP	1.379.305.704
2	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Perolehan/Penambahan KDP	166.296.100
3	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Koreksi Nilai KDP Bertambah	88.492.120
4	KANTOR BAHASA BANTEN	Perolehan/Penambahan KDP	680.000
5	KANTOR BAHASA GORONTALO	Pengembangan KDP	7.979.546.566
6	KANTOR BAHASA GORONTALO	Koreksi Nilai KDP Bertambah	8.811.542.009
7	KANTOR BAHASA GORONTALO	Perolehan/Penambahan KDP	8.181.377.497
8	KANTOR BAHASA GORONTALO	Perolehan Lainnya KDP	1.019.661.152
9	KANTOR BAHASA MALUKU	Perolehan/Penambahan KDP	10.856.270.030
10	KANTOR BAHASA MALUKU	Pengembangan KDP	14.504.858.126
11	KANTOR BAHASA MALUKU	Perolehan Lainnya KDP	3.040.201.166
JUMLAH			56.028.230.470

Uraian mutasi kurang KDP adalah sebagai berikut.

No	Satker	Keterangan	Jumlah
1	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Pengembangan Melalui KDP	(1.634.093.924)
2	KANTOR BAHASA BANTEN	Penghapusan/Penghentian KDP	(680.000)
3	KANTOR BAHASA GORONTALO	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(490.000)
4	KANTOR BAHASA GORONTALO	Penghapusan/Penghentian KDP	(8.811.542.009)
Jumlah			(10.446.805.933)

Rincian KDP pada satker Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebagai berikut.

KDP Badan Bahasa ditahun 2023 ini Terdiri dari 4 satuan kerja yaitu:

1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

- Pembangunan KDP dimulai pada tahun 2008, mendapatkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan setelah tahun 2008 yaitu pada tahun 2010, setelah penambahan anggaran dana yang diterima masih belum mencukupi untuk penyelesaian pembangunannya, dan saat posisi akhir Semester I tahun 2020

ini KDP Balai Bahasa Jawa Timur senilai Rp441.262.600.- berupa Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan terdiri dari ruang kerja kantor dan perpustakaan.

- b. Progres penyelesain KDP ini sampai pada tahap Rekomendasi dan hasil rapat dengan PU agar dapat menganggarkan penyelesaian KDP.
- c. Dalam proses penganggaran penyelesaian KDP, usulan anggaran penyelesaian ditolak oleh DJA dikarenakan KDP berdiri di atas tanah Pinjam Pakai milik pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- d. Pada saat ini Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur telah menempati tanah dan bangunan ex PP PAUD Dikmas Jawa Timur.
- e. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur berencana akan menghibahkan gedung dan KDP ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proses pengusulan hibah telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek.

2. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat

- a. Pembangunan KDP Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat dimulai pada tahun 2008 dikarenakan terkait keterbatasan anggaran bangunan tersebut tidak selesai dibangun. KDP Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat senilai Rp833.471.769.- berupa Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan. Kondisi saat akhir tahun 2018 KDP Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat sudah sampai tahap rekomendasi PU untuk melanjutkan pembangunan, Badan Bahasa akan menganggarkan penyelesaian KDP. Perlu dilakukan building assesmet berupa penilaian kelayakan bangunan berdasarkan tahapan dari bangunan untuk menilai (assessing) kinerja suatu bangunan, mulai dari yang kualitatif sampai yang kuantitatif.
- b. KDP berdiri di atas tanah milik Badan Bahasa.
- c. Pada tahun 2021, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat mendapatkan anggaran untuk meneruskan pembangunan gedung tersebut senilai Rp3.437.892.900,-. Akan tetapi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dan mengerjakan sebesar Rp1.776.381.856,- atau sebesar 40,718% dari nilai kontrak.
- d. Pada perencanaan awal tahun 2005 pembangunan gedung Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat direncanakan untuk wisma setinggi 4 lantai, sedangkan untuk tahun 2021 terdapat perubahan desain dimana pembangunan gedung tersebut hanya setinggi 2 lantai dan kegunaannya untuk ruang kerja (lantai 1) dan untuk aula (lantai 2).

3. Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo

- a. KDP tersebut merupakan pencatatan pembangunan gedung kantor dan mulai dicatat pada tahun 2022.
- b. KDP tersebut berdiri diatas tanah Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.
- c. KDP Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Progres per 31 Desember 2023 sebesar 74,47%, Pembangunan KDP dilanjutkan di tahun 2024 dengan perpanjangan masa kontrak kurang lebih 60 hari dengan rencana selesai 100% di bulan Februari 2024.
- d. Nilai KDP sebesar Rp17.825.084.827

4. Kantor Bahasa Provinsi Maluku

- a. KDP tersebut merupakan pencatatan pembangunan gedung kantor dan mulai dicatat pada tahun 2022.
- b. KDP tersebut berdiri diatas tanah Kantor Bahasa Provinsi Maluku.
- c. KDP Kantor Bahasa Provinsi Maluku Progres per 31 Desember 2023 sebesar 95,47%, Pembangunan KDP dilanjutkan di tahun 2024 dengan perpanjangan masa kontrak kurang lebih 30 hari dengan rencana selesai 100% di bulan Januari 2024.
- d. Pembangunan KDP Kantor Bahasa Provinsi Maluku sudah selesai 100% pada tanggal 26 Januari 2024 dengan nomor BAST 0126/I5.29/LK.00.00/2024.
- e. Nilai KDP sebesar Rp29.629.970.558.

Terdapat 2 KDP yang tidak memiliki progres Pembangunan pada tahun 2023 (pembangunan terhenti) dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Nilai Buku	Perolehan KDP	Jenis Aset yang akan Dibaslikan	Waktu Penggerjan KDP Terhenti	Rencana Penyelesaian KDP	Kendala Penyelesaian KDP	Progress s.d. 31 Desember 2023				
										Belum Selesai		Capaian %	Rencana Penyelesaian KDP	Keterangan
Selesai	Belum Selesai													
1	BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	1.689.600	2008	Gedung dan Bangunan	2010	2024	KDP berdiri di atas tanah pinjam pakai milik Pemerintah Provinsi	-	V	40%	2024	KDP direncanakan untuk dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur
	BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2	800.000										
	BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	3	2.600.000										
	BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	4	16.781.000										
	BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	5	19.590.400										
	BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	6	157.961.600										
	BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	7	118.471.200										
	BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	8	118.471.200										
2	BALAI BAHASA PADANG	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	9	4.897.600										
														pada tahun 2022 dan 2023 tidak dapat dianggarkan karena DJA menolak menganggarkan dikarenakan penyedia belum melakukan pembayaran atas denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran, baru selesai dibayar lunas tahun 2023 sehingga dapat dianggarkan kembali penyelesaian di tahun 2024

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp(191.146.683.416)

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(191.146.683.416) dan Rp(175.491.214.990). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontrak akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel C.2.7
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	892.987.805.493	-	892.987.805.493
2.	Peralatan dan Mesin	158.307.919.167	(130.143.177.573)	28.164.741.594
3.	Gedung dan Bangunan	334.999.285.032	(58.748.641.100)	276.250.643.932
4.	Jalan dan Jembatan	651.400.000	(648.645.858)	2.754.142
5.	Irigasi	1.364.143.000	(437.911.810)	926.231.190
6.	Jaringan	2.777.455.750	(981.649.075)	1.795.806.675
7.	Aset Tetap Lainnya	8.324.566.234	(186.658.000)	8.137.908.234
8.	Konstruksi Dalam pengerjaan	50.506.171.610	-	50.506.171.610
Jumlah		1.449.918.746.286	(191.146.683.416)	1.258.772.062.870

Piutang Jangka Panjang
Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Piutang jangka panjang pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perpendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) sebesar Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR)

Tuntutan Perpendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaianya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya.

Tidak terdapat TP/TGR di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Tagihan penjualan
angsuran sebesar Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran adalah penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-Piutang
jangka Panjang Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perpendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas Aset Lainnya, aset Tak Berwujud dan piutang.

Tidak terdapat penyisihan piutang tak tertagih pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Aset Lainnya
Rp22.454.880.260

C.4 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp22.454.880.260 dan Rp5.824.440.324 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Terdapat kenaikan nilai Aset Lainnya sebesar Rp16.630.439.936 atau 285.53%. Kenaikan tersebut berupa penambahan asset tak berwujud berupa lisensi pada satker Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa.

Aset Lainnya pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Tabel C.4
Rincian Aset Lainnya

Nama Perkiraan	Catatan	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
ASET					
Aset Lainnya	C.4				
Aset Tak Berwujud	C.4.1	8.998.693.806	2.337.365.447	6.661.328.359	284.99%
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.4.2	10.832.183.000	-	10.832.183.000	100.00%
Aset Lain-lain	C.4.3	11.747.572.590	18.896.450.736	(7.148.878.146)	(37.83%)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	(9.123.569.136)	(15.409.375.859)	6.285.806.723	(40.79%)
JUMLAH ASET LAINNYA		22.454.880.260	5.824.440.324	16.630.439.936	285.53%

Selanjutnya dijelaskan rincian aset lainnya sebagai berikut.

Aset Tak Berwujud
Rp8.998.693.806

C.4.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp8.998.693.806 dan Rp2.337.365.447.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2.337.365.447
Mutasi tambah:	6.870.228.359
Mutasi kurang:	(208.900.000)
Saldo per 31 Desember 2023	8.998.693.806
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(2.727.644.467)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	6.271.049.339

Terdapat mutasi tambah Aset Tak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:

1. reklassifikasi masuk software komputer Rp34.242.500 pada satker Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
2. internal transfer masuk software komputer pada satker Pusat Pengembangan dan Pelindungan Rp 179.200.000
3. perolehan lainnya lisensi pada satker Pusat Penguanan dan Pemberdayaan Bahasa Rp6.656.785.859

Terdapat mutasi kurang asset tak berwujud dengan rincian sebagai berikut:

1. penghentian aset dari penggunaan software komputer Rp(29.700.000) pada satker Balai Bahasa Sumatera Selatan.

2. internal transfer keluar software komputer pada satker Pusat Pengembangan dan Pelindungan Rp 179.200.000

Aset Tak Berwujud terdiri atas Software dan Aset Tak Bewujud Lainnya berasal dari 13 Satker, terdiri dari:

3. Sekretariat Badan Bahasa sebesar Rp292.380.000 berupa aset tak berwujud lainnya karya Badan Bahasa sebanyak 1 unit berupa Video Profil Badan Bahasa (2016).
4. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat
 - a. Software sebanyak 3 buah senilai Rp151.790.000, yaitu :
 - a.1. Software pangdat;
 - a.2. Software salapan (senarai arsip laporan kegiatan dasbor pegawai) berbasis web;
 - a.3. Aplikasi salapan berbasis android.
 - b. Aset Tak Berwujud Lainnya sebanyak 2 buah senilai Rp71.401.000, yaitu:
 - b.1. Master aplikasi android urban kamus;
 - b.2. Aplikasi sarasa (sarana tanya jawab bahasa dan sastra) berbasis ponsel pintar (android).
5. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah senilai Rp45.649.000 berupa software sebanyak 23 buah yaitu:
 - a. Software LJK TUKBI (1 buah,);
 - b. Software computer (1 buah);
 - c. Microsoft office tambahan (21 buah).
6. Balai Bahasa Provinsi Yogyakarta senilai Rp112.390.000 berupa software sebanyak 4 buah yaitu:
 - a. Aplikasi laman Balai Bahasa Provinsi DI Yogyakarta;
 - b. Aplikasi database;
 - c. Aplikasi kepegawaian;
 - d. Aplikasi jurnal widya sastra.
7. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur senilai Rp83.242.500 sebanyak 1 buah software yaitu berupa aplikasi pendataan terintegrasi.
8. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 buah software berupa software tempat ujian berbahasa pada Laboratorium Uji Bahasa senilai Rp22.890.300.

9. Balai Bahasa Provinsi Riau sebanyak 1 buah software berupa software tempat ujian berbahasa pada Laboratorium Uji Bahasa senilai Rp26.167.250.
10. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 buah software berupa software tempat ujian berbahasa pada Laboratorium Uji Bahasa senilai Rp84.150.000.
11. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 26 buah software berupa software Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI) senilai Rp65.360.797.
12. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 11 buah software berupa software tempat ujian berbahasa pada Laboratorium Uji Bahasa senilai Rp68.399.600.
13. Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 1 buah software berupa software tempat ujian berbahasa pada Laboratorium Uji Bahasa senilai Rp770.000.
14. Pusat Pengembangan dan Pelindungan senilai Rp1.153.197.500 sebanyak 19 buah software yaitu
 - a. aplikasi korpus Bahasa Indonesia;
 - b. software microsoft office;
 - c. software windows server (2 buah);
 - d. aplikasi bank soal UKBI;
 - e. aplikasi pengujian UKBI daring;
 - f. UKBI dalam jaringan;
 - g. aplikasi acuan berbahasa;
 - h. pengelolaan data informasi si peta;
 - i. aplikasi UKBI adaptif;
 - j. aplikasi pangkalan data kamus;
 - k. aplikasi uji coba dinamis UKBI;
 - l. aplikasi registrasi kebahasaan dan kesastraan;
 - m. aplikasi KBBI daring;
 - n. aplikasi thesaurus tematis Bahasa Indonesia;
 - o. aplikasi ensiklopedia sastra Indonesia;
 - p. aplikasi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI);
 - q. aplikasi Vitalisasi Bahasa (VIBA);
 - r. aplikasi sistem laboratorium.
15. Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa senilai Rp6.820.905.859 sebanyak 2 buah software yaitu

a. Modul Wawasan Indonesia;

b. Aplikasi BIPA Daring.

dan lisensi sebanyak 504 buah yaitu lisensi atas buku terbitan penerbit luar negeri.

Dana yang Dibatasi penggunaannya
Rp10.832.183.000

C.4.2 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun pihak di luar pemerintah. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merupakan dana pada rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan gedung kantor.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp10.832.183.000 dan Rp0. Saldo dana yang dibatasi penggunaannya berasal dari satker Kantor Bahasa Provinsi Maluku Rp4.339.476.928 yang merupakan dana pada RPATA untuk pembangunan gedung kantor yang baru selesai baru akhir Januari 2024 dan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Rp6.492.706.072 untuk pembangunan gedung kantor yang akan selesai pada bulan Februari 2024.

Aset lain-lain sebesar
Rp11.747.572.590

C.4.3 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp11.747.572.590 dan Rp18.896.450.736. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	18.896.450.736
Mutasi tambah:	2.365.402.496
Mutasi kurang:	(9.514.280.642)
Saldo per 31 Desember 2023	11.747.572.590
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(6.395.924.669)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	5.351.647.921

Uraian mutasi tambah sebagai berikut.

No	Satker	Keterangan	Jumlah
1	BALAI BAHASA YOGYAKARTA	Penghentian Aset Dari Penggunaan	145.147.718
2	BALAI BAHASA BALI	Penghentian Aset Dari Penggunaan	3.090.000
3	BALAI BAHASA BALI	Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	2.527.000

4	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	159.575.000
5	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	250.012.500
6	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	46.456.600
7	BALAI BAHASA RIAU	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	326.442.252
8	BALAI BAHASA SUMSEL	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	346.245.000
9	BALAI BAHASA SULTENG	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	427.487.800
10	BALAI BAHASA KALTENG	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	400.652.878
11	KANTOR BAHASA GORONTALO	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	17.020.000
12	KANTOR BAHASA MALUT	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	58.378.748
13	KANTOR BAHASA MALUKU	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	152.667.000
14	BALAI BAHASA SUMSEL	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	29.700.000
Jumlah			2.365.402.496

Uraian mutasi kurang sebagai berikut.

No	Satker	Keterangan	Jumlah
1	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(2.027.044.150)
2	SEKRETARIAT BPP BAHASA	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(4.279.642.101)
3	PUSTANDA	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(19.360.000)
4	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(108.586.700)
5	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(234.238.771)
6	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(162.131.000)
7	BALAI BAHASA RIAU	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(198.246.927)
8	KANTOR BAHASA JAMBI	Penghapusan	(50.480.000)
9	KANTOR BAHASA JAMBI	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(67.708.400)
10	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	Penghapusan	(50.028.000)
11	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(401.858.878)
12	KANTOR BAHASA MALUKU	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(152.667.000)
13	BALAI BAHASA BALI	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(72.198.540)
14	BALAI BAHASA BALI	Penghapusan	(6.441.250)
15	BALAI BAHASA BALI	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(765.034.540)
16	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(431.273.600)
17	BALAI BAHASA PAPUA	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(168.062.211)
18	KANTOR BAHASA BENGKULU	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(137.415.100)
19	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(29.189.374)
20	KANTOR BAHASA BANTEN	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(600.000)
21	KANTOR BAHASA GORONTALO	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(152.074.100)
JUMLAH			(9.514.280.642)

Akumulasi
penyusutan/amortisasi
asset lainnya sebesar
Rp(9.123.569.136)

C.4.4 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp(9.123.569.136) dan Rp(15.409.375.859). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas

dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel C.4.4
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Uraian Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Software	1.978.126.947	(1.903.766.885)	74.360.062
2	Lisensi	6.656.785.859	(531.497.582)	6.125.288.277
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	363.781.000	(292.380.000)	71.401.000
4	Dana di Rekening Penampungan-K/L	10.832.183.000	0	10.832.183.000
5	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	6.582.580.210	(5.788.402.789)	794.177.421
6	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5.164.992.380	(607.521.880)	4.557.470.500
Jumlah		31.578.449.396	(9.123.569.136)	22.454.880.260

Kewajiban Jangka Pendek
Rp4.133.596.912

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp4.133.596.912 dan Rp181.254.627. Terjadi kenaikan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp3.952.342.285 atau 2,180.55%. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada tabel berikut

Tabel C.5
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

NAMA PERKIRAAN	Catatan	Jumlah		Kenaikan	
		2023	2022	Jumlah	%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5				
Uang Muka dari KPPN	C.5.1				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	4.111.154.094	143.814.310	3.967.339.784	2,758.65%
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.3	22.442.818	36.940.317	(14.497.499)	(39.25%)
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.4	-	500.000	(500.000)	(100.00%)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		4.133.596.912	181.254.627	3.952.342.285	2,180.55%

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp4.111.154.094

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.111.154.094 dan Rp143.814.310.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, dan progress atas pekerjaan RPATA per 31 Desember 2023. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.5.2
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Kode Akun	Satker	Jumlah	Uraian	Jumlah
212112	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	9.322.300	Pembayaran pemakaian listrik bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024	8.660.300
			Pemakaian langganan telpon bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024	662.000
212112	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	30.641.161	Hutang belanja langganan daya dan jasa listrik bulan Desember 2023	29.220.306
			Hutang belanja barang Langganan Telepon bulan Desember 2023 (0246921187)	1.008.185
			Hutang belanja barang tagihan telepon bulan Desember 2023 (0246921187)	412.670
212112	KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	10.454.665	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar - Tagihan Listrik Bulan Desember 2023 dengan nomor pelanggan 231001258328 sebesar Rp8.931.883,-	8.931.883
			Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar - Tagihan Air Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur (660087) dengan nomor pelanggan 1122153 sebesar Rp103.700,-	103.700
			Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar - Tagihan Telepon Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur (660087) dengan nomor pelanggan 1566995997 sebesar Rp1.419.082,-	1.419.082
212112	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	873.650	Jurnal atas beban langganan air bulan Desember 2023	873.650
212191	KANTOR BAHASA MALUKU	3.040.201.166	Untuk mencatat Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan (RPATA) yang belum dilaksanakan pembayaran.	3.040.201.166
212191	KANTOR BAHASA GORONTALO	1.019.661.152	Untuk mencatat Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan (RPATA) yang belum dilaksanakan pembayaran.	1.019.661.152
		Jumlah	4.111.154.094	4.111.154.094

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp22.442.818

C.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp22.442.818 dan Rp36.940.317.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka disajikan sebagai berikut.

Tabel C.5.3

Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2022

No	Satker	Jumlah	Keterangan
1.	Sekretariat Badan Bahasa	Rp3.982.918	Sewa ATM
2.	Balai Bahasa Jawa Tengah	Rp9.059.900	Pendidikan PAUD
3.	Pusat Pembinaan	Rp-9.400.000	Biaya tes UKBI yang pelaksanaannya di bulan Januari 2024
Rp22.442.818			

Utang jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.5.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp500.000, tidak terdapat saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Ekuitas
Rp1.279.735.498.333

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.279.735.498.333 dan Rp1.226.261.739.927. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.590.231.014 dan Rp1.831.416.735 atau mengalami Kenaikan sebesar 96,04%. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel D.1

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penuruan	%
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	330.185.599	55.794.483	274.391.116	491,79%
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	2.266.300.000	-	2.266.300.000	100,00%
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	548.260.000	1.728.225.000	(1.179.965.000)	(68,28%)
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	444.935.274	47.050.250	397.885.024	845,66%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	44.800	-	44.800	100,00%
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	505.341	347.002	158.339	45,63%
JUMLAH		3.590.231.014	1.831.416.735	1.758.814.279	96,04%

Dibandingkan 31 Desember 2022, pendapatan periode 31 Desember 2023 mengalami Kenaikan sebesar 96,04% hal ini disebabkan seiring dengan berakhirnya PPKM dan pandemi covid 19 jumlah peserta tes UKBI pada pusat Pembinaan Bahasa, Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa mulai meningkat dibandingkan tahun 2022.

Rincian pendapatan per akun adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berasal dari satker Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Rp23.897.499 yang merupakan sewa tempat mesin ATM, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Rp157.989.800 dan satker Balai Bahasa Jawa Tengah Rp148.98.300 yang merupakan sewa gedung untuk TK dan PAUD.
2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi berasal dari satker Pusat Pembinaan Rp2.266.300.000 yang merupakan pendapatan UKBI dengan tarif baru sesuai dengan PP 22 tahun 2023.
3. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya berasal dari satker Pusat Pembinaan Rp548.260.000 yang merupakan pendapatan UKBI

yang disetor sebelum bulan Juni 2023 dengan menggunakan tarif sesuai PP 18 Tahun 2016.

4. Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual Rp444.935.274 merupakan pendapatan dari royalti KBBI pada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Rp407.863.500, Balai Bahasa Yogyakarta Rp6.736.000 yang merupakan royalti Kamus Basa Jawa dan Sekretariat BPP Bahasa Rp30.335.774 yang merupakan setoran atas temuan BPK.
5. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berasal dari satker Balai Bahasa Provinsi D.I Yogyakarta Rp44.800. yang merupakan denda keterlambatan pengiriman pengadaan laptop.
6. Pendapatan anggaran lain-lain berasal dari satker Pusat Pembinaan Rp505.341 yang merupakan setoran selisih lebih biaya mengikuti tes UKBI oleh peserta uji.

Beban Pegawai
Rp142.790.615.211

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp142.790.615.211 dan Rp140.727.712.726. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel D.2
Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	53.339.838.800	53.973.513.762	(633.674.962)	(1,17%)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	842.923	891.603	(48.680)	(5,46%)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	3.648.948.150	3.676.901.500	(27.953.350)	(0,76%)
511122	Beban Tunj. Anak PNS	1.153.843.052	1.151.234.971	2.608.081	0,23%
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	809.458.000	701.385.000	108.073.000	15,41%
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	907.644.800	3.922.447.400	(3.014.802.600)	(76,86%)
511125	Beban Tunj. PPh PNS	99.006.066	214.045.263	(115.039.197)	(53,75%)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	3.053.154.780	3.101.676.180	(48.521.400)	(1,56%)
511129	Beban Uang Makan PNS	6.582.406.000	7.319.428.000	(737.022.000)	(10,07%)
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	166.445.000	154.670.000	11.775.000	7,61%
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2.477.919.325	2.168.175.000	309.744.325	14,29%
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	8.899.500	-	8.899.500	100,00%
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	188	-	188	100,00%
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.620.000	-	1.620.000	100,00%
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	217.260	-	217.260	100,00%
511628	Beban Uang Makan PPPK	1.110.000	-	1.110.000	100,00%
512211	Beban Uang Lembur	1.444.937.000	1.417.596.600	27.340.400	1,93%
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	69.079.823.041	62.925.747.447	6.154.075.594	9,78%
512414	Beban Pegawai/Tunjangan/Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	14.501.326	-	14.501.326	100,00%
JUMLAH		142.790.615.211	140.727.712.726	2.062.902.485	1,47%

Dibandingkan tahun 2022 beban belanja pegawai periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,47% disebabkan adanya penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pengangkatan Jabatan Fungsional.

Beban Persediaan
Rp2.624.320.406

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.624.320.406 dan Rp2.663.963.439. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel D.3
Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
593111	Beban Persediaan konsumsi	2.598.929.406	2.489.530.247	109.399.159	4,39%
593131	Beban Persediaan bahan baku	21.798.200	74.310.660	(52.512.460)	(70,67%)
593149	Beban Persediaan Lainnya	3.592.800	100.122.532	(96.529.732)	(96,41%)
JUMLAH		2.624.320.406	2.663.963.439	(39.643.033)	(1,49%)

Dibandingkan tahun 2022 Beban persediaan per 31 Desember 2023 mengalami Penurunan sebesar (1,49%) disebabkan berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek, Poliklinik yang sebelumnya di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berpindah di bawah Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek sehingga baik pembelian maupun pencatatan yang semula dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dilakukan oleh Biro Umum.

Beban Barang dan
Jasa
Rp147.518.085.840

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp147.518.085.840 dan Rp111.652.714.975. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang maupun jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Tabel D.4
Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
521111	Beban Keperluan Perkantoran	16.380.684,966	15.012.163,975	1.368.520,991,00	9,12%
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	21.000,342	93.774,850	(72.774.508,00)	(77,61%)
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	177.897,157	295.947,299	(118.050.142,00)	(39,89%)
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	8.699.149,000	8.109.163,250	589.985,750,00	7,28%
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1.858.636,836	806.926,984	1.051.709,852,00	130,34%
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30.358,078	964.543,015	(934.184.937,00)	(96,85%)
521211	Beban Bahan	33.417.210,104	21.877.922,572	11.539.287,532,00	52,74%
521213	Beban Honor Output Kegiatan	4.304.205,500	4.178.132,000	126.073,500,00	3,02%
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	7.532.029,669	6.846.124,285	685.905,384,00	10,02%
521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	12.877.141,419	3.520.055,992	9.357.085,427,00	265,82%
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	51.955,000	959.071,875	(907.116.875,00)	(94,58%)
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	37.942,800	-	37.942,800,00	100,00%
522111	Beban Langganan Listrik	3.723.109,352	3.120.313,663	602.795,689,00	19,32%
522112	Beban Langganan Telepon	611.558,069	567.915,501	43.642,568,00	7,68%
522113	Beban Langganan Air	218.114,407	274.797,981	(56.683.574,00)	(20,63%)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.273.005,506	1.264.934,506	8.071.000,00	0,64%
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	41.992,960	83.261,713	(41.268.753,00)	(49,57%)
522131	Beban Jasa Konsultan	89.843,400	74.250.000	15.593.400,00	21,00%
522141	Beban Sewa	6.033.438,693	5.069.421,804	964.016.889,00	19,02%
522151	Beban Jasa Profesi	19.348.281,600	17.207.520,500	2.140.761.100,00	12,44%
522191	Beban Jasa Lainnya	30.664.872,952	20.841.495,232	9.823.377.720,00	47,13%
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	29.600.000	422.979,978	(393.379.978,00)	(93,00%)
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	96.058.030	61.998.000	34.060.030,00	54,94%
JUMLAH		147.518.085,840	111.652.714,975	35.865.370,865,00	32,12%

Dibandingkan tahun 2022 beban barang dan jasa per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 32,12%, hal ini dikarenakan secara umum anggaran di tahun 2023 lebih tinggi daripada tahun 2022 dan pelaksanaan kegiatan di 2023 telah terlaksana secara efektif.

Beban Pemeliharaan
Rp15.135.542,299

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.135.542,299 dan Rp10.516.948,390. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel D.5
Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.175.499,267	5.026.834,843	4.148.664,424	82,53%
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.896.405,427	4.683.899,490	212.505,937	4,54%
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.199,795	109.321,180	21.878,615	20,01%
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	516.810,534	412.461,593	104.348,941	25,30%
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	117.651,380	60.000,000	57.651,380	96,09%
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	294.811,896	223.361,284	71.450,612	31,99%
593114	Beban Persediaan suku cadang	3.164.000	1.070.000	2.094.000	195,70%
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-	0,00%
JUMLAH		15.135.542,299	10.516.948,390	4.618.593,909	43,92%

Dibandingkan tahun 2022 beban pemeliharaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 43,92%.

Rincian beban pemeliharaan per satker adalah sebagai berikut.

No.	Satker	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	3.116.753,370	2.232.726,397	884.026,973	39,59%
2	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	287.270,919	186.101,318	101.169,601	54,36%
3	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	217.594,329	365.069,425	(147.475,096)	(40,40%)
4	BALAI BAHASA BALI	510.340,412	378.343,930	131.996,482	34,89%
5	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	240.774,021	262.507,577	(21.733,556)	(8,28%)
6	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	248.387,531	242.129,907	6.257,624	2,58%
7	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	352.153,160	183.365,050	168.788,110	92,05%
8	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	278.193,112	105.953,700	172.239,412	162,56%
9	BALAI BAHASA PAPUA	281.984,128	412.154,987	(130.170,859)	(31,58%)
10	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1.739.251,199	136.526,696	1.602.724,503	1.173,93%
11	BALAI BAHASA JAWA BARAT	325.268,745	130.861,800	194.406,945	148,56%
12	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	3.122.483,246	374.377,770	2.748.105,476	734,05%
13	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	177.991,273	189.330,572	(11.339,299)	(5,99%)
14	BALAI BAHASA RIAU	114.651,067	155.162,486	(40.511,419)	(26,11%)
15	BALAI BAHASA ACEH	289.801,824	284.525,372	5.276,452	1,85%
16	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	240.111,338	157.451,485	82.659,853	52,50%
17	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	263.671,666	183.356,939	80.314.727	43,80%
18	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	233.812,025	241.764,560	(7.952,535)	(3,29%)
19	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	231.765,964	371.930,900	(140.164,936)	(37,69%)
20	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	310.059,393	303.623,552	6.435,841	2,12%
21	KANTOR BAHASA LAMPUNG	430.381,050	428.657,000	1.724,050	0,40%
22	KANTOR BAHASA JAMBI	226.728,007	320.291,069	(93.563,062)	(29,21%)
23	KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	162.448,400	204.760,122	(42.311,722)	(20,66%)
24	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	230.399,430	262.052,060	(31.652,630)	(12,08%)
25	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	353.856,327	280.950,120	72.906,207	25,95%
26	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	64.665,300	110.770,000	(46.104,700)	(41,62%)
27	KANTOR BAHASA Bengkulu	149.336,422	147.890,450	1.445,972	0,98%
28	KANTOR BAHASA BANTEN	225.177,900	125.337,100	99.840,800	79,66%
29	KANTOR BAHASA GORONTALO	85.397,014	110.180,900	(24.783,886)	(22,49%)
30	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	122.159,622	80.648,878	41.510,744	51,47%
31	KANTOR BAHASA MALUKU	69.137,114	47.530,000	21.607,114	45,46%
32	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	74.178,783	82.533,550	(8.354,767)	(10,12%)
33	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	160.843,317	171.057,368	(10.214,051)	(5,97%)
34	PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA	198.514,891	1.247.025,350	(1.048.510,459)	(84,08%)
JUMLAH		15.135.542,299	10.516.948,390	4.618.593,909	43,92%

Beban Perjalanan
Dinas
Rp153.173.683.619

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp153.173.683.619 dan Rp105.121.681.181. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel D.6
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
524111	Beban Perjalanan Biasa	37.553.092,728	31.951.601,547	5.601.491,181,00	17,53%
524112	Beban Perjalanan Tetap	1.530.085,302	1.889.943,298	(359.857,996,00)	(19,04%)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.295.340,800	7.311.208,020	1.984.132,780,00	27,14%
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	54.802.535,204	23.157.779,749	31.644.755,455,00	136,65%
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	46.339.204,826	39.765.314,580	6.573.890,246,00	16,53%
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	3.554.542,759	1.016.518,987	2.538.023,772,00	249,68%
524212	Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	98.882.000	-	98.882.000,00	100,00%
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19			29.315.000	(29.315.000,00)
JUMLAH		153.173.683,619	105.121.681,181	48.052.002,438,00	45,71%

Dibandingkan tahun 2022 beban perjalanan dinas per 31 Desember 2023 mengalami Kenaikan sebesar 45,71%.

Rincian belanja perjalanan dinas per satker adalah sebagai berikut.

No.	Satker	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	25.198.791,906	18.800.499,844	6.398.292,062	34,03%
2	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	2.160.088,709	968.405,378	1.191.683,331	123,06%
3	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	4.527.002,301	3.514.066,637	1.012.935,664	28,83%
4	BALAI BAHASA BALI	3.176.949,112	2.559.928,937	617.020,175	24,10%
5	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	15.083.347,872	4.084.360,627	10.998.987,245	269,30%
6	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	19.922.355,354	19.929.583,087	(7.227.733)	(0,04%)
7	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1.619.825,772	1.146.685,750	473.140,022	41,26%
8	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	3.536.708,480	1.526.501,000	2.010.207,480	131,69%
9	BALAI BAHASA PAPUA	4.022.101,780	4.009.043,835	13.057.945	0,33%
10	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	3.523.682,591	1.465.918,968	2.057.763,623	140,37%
11	BALAI BAHASA JAWA BARAT	2.952.094,300	2.626.964,900	325.129,400	12,38%
12	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	3.759.599,530	2.924.630,900	834.968.630	28,55%
13	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	3.473.061,892	2.586.834,257	886.227,635	34,26%
14	BALAI BAHASA RIAU	1.590.088,289	1.155.924,243	434.164,046	37,56%
15	BALAI BAHASA ACEH	2.895.081,936	1.355.801,257	1.539.280,679	113,53%
16	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	2.328.623,167	891.998,793	1.436.624,374	161,06%
17	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1.987.736,444	944.641,154	1.043.095,290	110,42%
18	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	3.358.135,352	1.121.368,600	2.236.766.752	199,47%
19	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	3.847.786,941	3.597.977,300	249.809.641	6,94%
20	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1.975.363,712	1.031.081,381	944.282.331	91,58%
21	KANTOR BAHASA LAMPUNG	3.294.627,320	1.398.965,700	1.895.661.620	135,50%
22	KANTOR BAHASA JAMBI	1.294.093,297	791.598,850	502.494,447	63,48%
23	KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	3.570.508,596	2.771.561,053	798.947.543	28,83%
24	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	2.074.952,926	2.539.348,551	(464.395.625)	(18,29%)
25	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	1.436.753,620	1.092.769,100	343.984.520	31,48%
26	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.446.592,944	926.442,200	520.150.744	56,14%
27	KANTOR BAHASA Bengkulu	3.185.715,193	801.328.962	2.384.386.231	297,55%
28	KANTOR BAHASA BANTEN	1.530.669,189	879.099.039	651.570.150	74,12%
29	KANTOR BAHASA GORONTALO	2.057.721,515	910.970.900	1.146.750.615	125,88%
30	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	4.439.587,165	3.403.202,344	1.036.384.821	30,45%
31	KANTOR BAHASA MALUKU	2.751.057,200	1.754.986,100	996.071.100	56,76%
32	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	2.048.748,874	1.460.223.494	588.525.380	40,30%
33	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	3.699.635,166	2.630.187.910	1.069.447.256	40,66%
34	PUTUS PENGUATAN DAN PEMERDAYAAN BAHASA	9.404.595,174	7.518.780,130	1.885.815.044	25,08%
JUMLAH		153.173.683,619	105.121.681,181	48.052.002,438	45,71%

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp2.388.832.714

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.388.832.714 dan Rp126.878.395.336 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk buku cetakan terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diserahkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi

dalam hal meningkatkan mutu bahasa dan pemakainya sebagai penghela iptek dan penguat daya saing Indonesia serta meningkatkan kemajuan dan pelestarian bahasa dan budaya.

Tabel D.7
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	0	0,00%
593126	Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada	-	8.541.000	(8.541.000)	(100,00%)
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	2.388.832.714	126.869.854.336	(124.481.021.622)	(98,12%)
	JUMLAH	2.388.832.714	126.878.395.336	(124.489.562.622)	(98,12%)

Dibandingkan tahun 2022 Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 98,12% dikarenakan pada tahun 2022 terdapat tambahan anggaran dari BA BUN untuk pencetakan dan penyaluran buku GLN di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Beban bantuan sosial

Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Realisasi beban bantuan sosial tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp0. Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp20.423.310.660

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.423.310.660 dan Rp18.188.328.384. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel D. 9
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.457.636.510	10.813.767.844	643.868.666	5,95%
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.276.459.556	6.901.090.231	1.375.369.325	19,93%
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.508.286	2.754.143	2.754.143	100,00%
591312	Beban Penyusutan Irigasi	33.291.198	31.670.874	1.620.324	5,12%
591313	Beban Penyusutan Jaringan	124.836.700	125.679.058	(842.358)	(0,67%)
592115	Beban Amortisasi Software	113.770.000	193.658.625	(79.888.625)	(41,25%)
592116	Beban Amortisasi Lisensi	328.699.635	-	328.699.635	100,00%
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	83.108.775	119.707.609	(36.598.834)	(30,57%)
JUMLAH		20.423.310.660	18.188.328.384	2.234.982.276	12,29%

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp1.790.310

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp1.790.310 dan Rp(900.958). Saldo beban penyisihan piutang tak tertagih berasal dari satker Pusat Pengembangan dan Pelindungan Rp1.769.185 yang merupakan penyisihan piutang royalti KBBI dan Balai Bahasa Provinsi Yogyakarta Rp21.125 yang merupakan penyisihan piutang royalti kamus basajawa.

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(2.353.570.600)

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel D.11
Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik/Turun	%
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(2.798.499.818)	589.149.202	(3.387.649.020)	(575.01%)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	444.929.218	662.188.734	(217.259.516)	(32,81%)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(2.353.570.600)	1.251.337.936	(3.604.908.536)	(288,08%)

Pos Luar Biasa Rp0,-

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Periode Pelaporan per 31 Desember 2023 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah ekuitas awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp1.226.261.739.927 mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp53.473.758.406 sehingga jumlah ekuitas akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.279.735.498.333.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel E.1
Perbandingan Rincian Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022**

URAIAN	CATATAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
EKUITAS AWAL	E.1	1.226.261.739.927	880.429.455.290	345.832.284.637	39,28%
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(482.819.520.645)	(512.667.890.718)	29.848.370.073	(5,82%)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	41.300.844	(600.537.520)	641.838.364	(106,88%)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	3.000.000	(3.000.000)	(100,00%)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	680.000	0	680.000	100,00%
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.4	-	-	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	39.719.886	(760.852.659)	800.572.545	(105,22%)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	900.958	157.315.139	(156.414.181)	(99,43%)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	536.251.978.207	859.100.712.875	(322.848.734.668)	(37,58%)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		53.473.758.406	345.832.284.637	(292.358.526.231)	(84,54%)
EKUITAS AKHIR	E.6	1.279.735.498.333	1.226.261.739.927	53.473.758.406	4,36%

Ekuitas Awal

Rp1.226.261.739.927

27

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.226.261.739.927 dan Rp880.429.455.290. Dibandingkan dengan tahun 2022 nilai ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp345.832.284.637 atau 39,28% dari ekuitas awal 2022.

Defisit LO
Rp(482.819.520.645)
5)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(482.819.520.645) dan Rp(512.667.890.718). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak kumulatif
perubahan
kebijakan akuntansi
Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

Koreksi yang
Menambah/Mengurangi Ekuitas
Rp41.300.844

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp41.300.844 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN		%
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	41.300.844	(600.537.520)	641.838.364	(106,88%)	
PENYESUAIAN NILAI ASET	-	-	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	3.000.000	(3.000.000)	(100,00%)	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	680.000	0	680.000	100,00%	
SELISIH REVALUASI ASET	-	-	-	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	39.719.886	(760.852.659)	800.572.545	(105,22%)	
KOREKSI LAIN-LAIN	900.958	157.315.139	(156.414.181)	(99,43%)	

Selanjutnya akan dijelaskan per masing-masing uraian sebagai berikut:

Penyesuaian nilai
asset Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.000.000. Tidak terdapat saldo koreksi nilai persediaan di tahun 2023.

Koreksi atas
Reklasifikasi
Rp680.000

Selisih revaluasi
asset Rp0

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp39.719.886

E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Saldo Koreksi atas Reklasifikasi tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp680.000 dan Rp0. Koreksi atas reclasifikasi berasal dari satker Balai Bahasa Provinsi Riau yang merupakan koreksi atas kesalahan input nilai reclasifikasi keluar atas Focusing Screen/Layar LCD Projector.

E.4.4. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. Tidak terdapat selisih revaluasi aset pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

E.4.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp39.719.886 dan Rp(760.852.659). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena reevaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel E.4.4

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	7.061.015
Gedung dan Bangunan	246.157.600
Aset Tetap Lainnya	(213.498.729)
Jumlah	39.719.886

Rincian koreksi nilai aset non revaluasi per satker adalah sebagai berikut:

No.	Satker	Nilai	Keterangan
1	Balai Bahasa Bali	1.710.000	Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin
2	Balai Bahasa Kalimantan Selatan	119.820.000	Koreksi Susulan Bangunan Gedung Kantor Permanen
3	Balai Bahasa Jawa Timur	(6.660.000)	Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin
4	Balai Bahasa Jawa Timur	(10.700.782)	Reklasifikasi Masuk Software Komputer
5	Balai Bahasa Jawa Barat	2.860.000	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Gordyn/Kray
6	Balai Bahasa Jawa Tengah	(18.756.225)	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Genset
7	Balai Bahasa Aceh	126.337.600	Koreksi Susulan Bangunan Gedung Kantor Permanen
8	Balai Bahasa Kalimantan Barat	28.350.000	Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin

9	Kantor Bahasa Bengkulu	4.532.000	Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin
10	Kantor Bahasa Gorontalo	(4.974.760)	Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin
11	Pusat Penguanan dan Pemberdayaan Bahasa	(202.797.947)	Perolehan Lainnya Lisensi
		39.719.886	

Koreksi lain-lain
sebesar Rp900.958

E.4.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp900.958 dan Rp157.315.139.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel E.4.6

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	900.958
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	900.958

Koreksi lain-lain berasal dari satker Balai Bahasa Provinsi Papua Rp23.000, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Rp15.650, Balai Bahasa Provinsi Riau Rp151.450, Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Rp220.000, Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara Rp5.500, Kantor Bahasa Bengkulu Rp9.150, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Rp209.650, Balai Bahasa Provinsi Bali Rp35.000, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Rp130.500, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah Rp27.314, Kantor Bahasa Provinsi NTB Rp24.800, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah Rp39.744, dan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Rp9.200. Koreksi lain-lain merupakan koreksi atas beban penyisihan piutang tahun lalu yang diterima pembayarannya ditahun 2023.

Koreksi atas Entitas

Rp536.251.978.207

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp536.251.978.207 dan Rp859.100.712.875.

Rincian transaksi antar entitas adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	2023	2022
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	538.953.306.544	505.814.989.082
313121	Diterima dari Entitas Lain	(4.085.276.071)	(3.392.230.308)
313211	Transfer Keluar	(61.480.422.293)	(1.220.192.509)
313221	Transfer Masuk	62.645.502.744	356.341.894.110
391131	Pengesahan Hibah Langsung	218.867.283	1.556.252.500
JUMLAH		536.251.978.207	859.100.712.875

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditaghikan ke Ekuitas Akhir Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp4.085.276.071 sedangkan DKEL sebesar Rp538.953.306.544.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan ase/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp62.645.502.744 dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker Pengirim	Jenis	Nama Satker Penerima	Transfer Masuk
1	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	SEKRETARIAT BPP BAHASA	46.851.562
2	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA YOGYAKARTA	46.851.562
3	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA SULSEL	46.851.562
4	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA BALI	46.851.562
5	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	PUSBANGLIN	46.851.562
6	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA SUMBAR	46.851.562
7	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA KALSEL	46.851.562
8	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA PAPUA	46.851.562

9	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA JATIM	46.851.562
10	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA JABAR	46.851.562
11	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA JATENG	46.851.562
12	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA SUMUT	46.851.562
13	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA RIAU	46.851.562
14	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA ACEH	46.851.562
15	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA SUMSEL	46.851.562
16	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA KALBAR	46.851.562
17	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA SULTENG	46.851.562
18	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA KALTENG	46.851.562
19	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	BALAI BAHASA SULUT	46.851.562
20	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	KANTOR BAHASA LAMPUNG	46.851.562
21	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	KANTOR BAHASA JAMBI	46.851.562
22	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	KANTOR BAHASA KALTIM	46.851.562
23	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	KANTOR BAHASA NTB	46.851.562
24	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	KANTOR BAHASA SULTRA	46.851.562
25	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	KANTOR BAHASA BABEL	46.851.562
26	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	KANTOR BAHASA BENGKULU	46.851.562
27	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	KANTOR BAHASA BANTEN	46.851.562
28	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	KANTOR BAHASA GORONTALO	46.851.562
29	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	KANTOR BAHASA MALUT	46.851.562
30	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	KANTOR BAHASA MALUKU	46.851.562
31	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	KANTOR BAHASA KEP. RIAU	46.851.562
32	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	KANTOR BAHASA NTT	46.851.562
33	PUSDATIN	Peralatan dan Mesin	PUSTANDA	46.851.562
34	PUSBANGLIN	Peralatan dan Mesin	SEKRETARIAT BPP BAHASA	4.439.359.010
35	PUSBANGLIN	Gedung dan Bangunan	SEKRETARIAT BPP BAHASA	72.262.267.671
36	PUSBANGLIN	Irigasi	SEKRETARIAT BPP BAHASA	1.046.909.000
37	PUSBANGLIN	Jaringan	SEKRETARIAT BPP BAHASA	1.104.108.290
38	PUSBANGLIN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	SEKRETARIAT BPP BAHASA	(4.320.437.600)
39	PUSBANGLIN	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	SEKRETARIAT BPP BAHASA	(12.888.101.717)
40	PUSBANGLIN	Akumulasi Penyusutan Irigasi	SEKRETARIAT BPP BAHASA	(155.621.609)
41	PUSBANGLIN	Akumulasi Penyusutan Jaringan	SEKRETARIAT BPP BAHASA	(389.081.847)
				62.645.502.744

Sedangkan transfer keluar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp61.480.422.293 dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker Pengirim	Nama Akun	Transfer Keluar	Nama Satker Penerima
1	PUSBANGLIN	Peralatan dan Mesin	4.439.359.010	SEKRETARIAT BPP BAHASA
2	PUSBANGLIN	Gedung dan Bangunan	72.262.267.671	SEKRETARIAT BPP BAHASA
3	PUSBANGLIN	Irigasi	1.046.909.000	SEKRETARIAT BPP BAHASA

4	PUSBANGLIN	Jaringan	1.104.108.290	SEKRETARIAT BPP BAHASA
5	PUSBANGLIN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.320.437.600)	SEKRETARIAT BPP BAHASA
6	PUSBANGLIN	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(12.888.101.717)	SEKRETARIAT BPP BAHASA
7	PUSBANGLIN	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(155.621.609)	SEKRETARIAT BPP BAHASA
8	PUSBANGLIN	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(389.081.847)	SEKRETARIAT BPP BAHASA
9	BALAI BAHASA JATIM	Peralatan dan Mesin	25.020.000	LLDIKTI WILAYAH VII SURABAYA
10	BALAI BAHASA JATIM	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(25.020.000)	LLDIKTI WILAYAH VII SURABAYA
11	BALAI BAHASA JATIM	Peralatan dan Mesin	1.832.009.154	BBGP PROVINSI JAWA TIMUR
12	BALAI BAHASA JATIM	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.450.988.059)	BBGP PROVINSI JAWA TIMUR
61.480.422.293				

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN.

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp218.867.283. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel E.5.3

Pengesahan Hibah Langsung TA 2023

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	Balai Bahasa Sumatera Selatan	Barang	218.867.283
Jumlah			218.867.283

Pengesahan hibah pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan merupakan hibah tanah kantor yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Ekuitas Akhir

Rp1.279.735.498.333

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.279.735.498.333 dan Rp1.226.261.739.927.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Temuan dan tindak lanjut temuan BPK 2022 disampaikan dalam lampiran 16.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Pengungkapan atas Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA)

No	Nama Satker	Rincian Pekerjaan	Pengguna RPATA			Penyelesaian Pekerjaan			Pembayaran RPATA			Penitipan RPATA			Nilai Aset per 31 Des 2023 (Jika Ada)			Nilai Utang Per 31 Des 2023		
			No BAST	Nilai	Tanggal	No. BAST/BAPP	Nilai	Tanggal	No SP2D	Nilai SPM	Tanggal SP2D	No SP2D	Nilai	Tanggal	Nilai	Akun 6 digit	Nama Aset	Nilai	Akun 6 digit	
1	Kantor Bahasa Prov Maluku	Pembayaran Termin ke IV Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Bahasa Provinsi Maluku	2.819.489.000	20/12/23	1275/5.294.K.00/00/2023	1.968.003.322	31/12/23	245991302002308	2.819.489.000	02/02/24	-	-	-	-	-	1968.003.322	212191			
					0126/5.294.K.00/00/2024	851.485.678	26/01/24													
2	Kantor Bahasa Prov Maluku	Pembayaran Retensi (Penelitian) Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Bahasa Provinsi Maluku	1.409.744.500	20/12/23	1275/5.294.K.00/00/2023	984.001.661	31/12/23	245991302002310	1.409.744.500	05/02/24	-	-	-	-	-	29.629.970.558	136111	Konstruksi dalam Pengajaran	984.001.661	212191
					0126/5.294.K.00/00/2024	425.742.839	26/01/24													
3	Kantor Bahasa Prov Maluku	Pembayaran Jasa konsultan pengawas pembangunan gedung Kantor Bahasa Provinsi Maluku	110.423.428	21/12/23	1275/5.294.K.00/00/2023	88.196.183	31/12/23	245991302002509	110.423.428	06/03/24	-	-	-	-	-	88.196.183	212191			
					0127/5.294.K.00/00/2024	22.227.245	26/01/24													
4	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023	5.325.316.251	20/12/23	-	1.019.661.152	31/12/23	245991305000597	4.617.049.189	13/03/24	24050030100046	708.267.062	13/03/24	17.825.084.827	136111	Konstruksi Dalam Pengajaran	1.019.661.152	212191		
					186/Pengadaan/KBP/G/2024	3.597.388.037	29/02/24													
5	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023	-	1.065.063.250	20/12/23	-	-	-	-	-	-	24050030100047	1.065.063.250	13/03/24	-	-	-	-	-	-
6	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	-	102.326.571	20/12/23	-	-	-	-	-	-	24050030100048	102.326.571	13/03/24	-	-	-	-	-	-

- Realisasi belanja akun Covid-19 pada Semester II TA 2023

Pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa masih terdapat realisasi atas akun covid-19 pada Semester II TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut.

Akun	No.	Satker	Semester		Nilai	Pencairan Covid di semester II pada bulan	Keterangan	Penjelasan Realisasi Semester II
			I	II				
521131	1	BALAI BAHASA JAWA BARAT	6.565.800	2.750.900	9.316.700	Agustus	Pembelian Pulsa, (paket data dan komunikasi)	Aturan pengalihan semua akun covid ke akun yang lain baru terbit di bulan Agustus 2023, sedangkan rentang Januari s.d. Agustus sudah ada realisasi belanja akun COVID-19 sehingga pengalihan akun hanya dapat dilaksanakan pada sisa anggaran yang belum terrealisasi, sedangkan yang sudah terrealisasi tidak dapat serta merta diganti akun lain karena akan menyebabkan rugi minus belanja 52.
	2	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	250.000	250.000	500.000	Desember	Pembayaran penyediaan Zoom Meeting untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan secara hibrida maupun daring. Bentuk kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dan/atau peserta secara daring melalui Zoom Meeting.	Kegiatan telah dijadwalkan dan dilaksanakan menggunakan anggaran covid. Aturan pengalihan akun covid diketahui kemudian. Transaksi sudah terbaca pada akun covid sehingga tidak bisa dihilangkan atau dihapus.
	3	KANTOR BAHASA GORONTALO	1.057.240	1.367.113	2.424.353	Juli, September	digunakan untuk pembayaran lisensi zoom bulan 7 untuk pembayaran tagihan bulan Mei dan Juni sebesar Rp521.800. Bulan 9 untuk pembayaran tagihan Juli - September 2023 sebesar Rp845.313	Setelah transaksi dibukukan dalam anggaran covid, keluar aturan pengalihan akun covid ke sehari-hari. Karena sudah terlanjur dibukukan pada akun covid, maka tidak bisa dihilangkan atau dihapus.
	4	KANTOR BAHASA JAMBI	5.675.675		5.675.675		Pembayaran langganan zoom tahun 2023	transaksi dilakukan pada semester I Tahun 2023 (5 Mei 2023), tetapi masuk pembayaran semester II
	5	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	8.095.850		8.095.850		Realisasi belanja akun khusus Covid-19 (pembelian belanja pandemi covid pada bulan Januari 2023 (Hand sanitizer spray Rp497.500, vitamin dan penambah daya tahan tubuh Rp2.488.500, dan masker medis Rp1.250.000), dan bulan Februari 2023 (Penyantapan tagihan Rp470.000, masker medis Rp1.250.000, dan vitamin Rp2.139.850)	Tidak terdapat realisasi di semester II
	6	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	2.629.750	1.715.750	4.345.500	Juli, September, November, Desember	Operasional perkantoran pembayaran biaya lisensi pertemuan daring (paket zoom meeting)	Pembayaran biaya lisensi zoom meeting yang sudah terlanjur diangarkan menggunakan akun khusus covid
521241	1	KANTOR BAHASA BANTEN	12.525.000	9.430.000	21.955.000	Juli	pembayaran biaya Komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data peserta kegiatan	diharapkan mundur 1 bulan dari bulan pelaksanaan kegiatan, yaitu pada bulan Juli karena keterlambatan pengumpulan data nomor ponsel dari peserta ke panitia, sehingga pengiriman pulsa terkendala
	2	PUTUS PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA		15.000.000	15.000.000	Juli	Biaya paket data dan komunikasi kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kemahiran Berbahasa: Kelas Daring EYD V pada tanggal 7 Juli 2023 secara daring melalui aplikasi zoom	Aturan pengalihan akun covid ke akun yang lain baru diterima di bulan Agustus 2023
	3	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	15.000.000		15.000.000		Kegiatan Webinar Penyuluhan Kemahiran Berbahasa Indonesia yang pelaksanaannya dilaksanakan dalam bentuk pertemuan daring yang menghadirkan narasumber dan peserta secara daring melalui aplikasi zoom meeting, di mana peserta yang mengikuti kegiatan webinar tersebut di berikan penggantian pulsa atau paket data total Rp15.000.000,-	Tidak terdapat realisasi di semester II
522192	1	BALAI BAHASA SULAWESI TENGGARA	7.100.000		7.100.000		Pembayaran Narsum dan Moderator Kegiatan Kelas Daring Pembinaan Bahasa	Tidak terdapat realisasi di semester II
	2	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	6.700.000	15.800.000	22.500.000	Juli	Kegiatan Webinar Penyuluhan Kemahiran Berbahasa Indonesia yang pelaksanaannya dilaksanakan dalam bentuk pertemuan daring yang menghadirkan narasumber dan moderator secara daring melalui aplikasi zoom meeting, di mana narasumber dan moderator kegiatan webinar penyuluhan kemahiran berbahasa indonesia tersebut di berikan jasa narasumber dan moderator sebesar Rp6.700.000,- dan pelaksanaan kegiatan pembinaan lomba dan kurasi hasil resensi dan bedah buku di mana narasumber kegiatan tersebut di berikan jasa narasumber sebesar Rp15.800.000	Pelaksanaan kegiatan pembinaan lomba dan kurasi hasil resensi dan bedah buku di laksanakan pada semester dua karena merupakan kegiatan lanjutan dari pembinaan resensi sebelumnya yang dilaksanakan di sekolah pada bulan mei. Pembinaan lanjut melibatkan siswa terpilih dengan resensi tulisan terbaik. Kegiatan harus dilaksanakan dengan jeda waktu tertentu karena setiap pertemuan peserta diminta untuk membuat tulisan resensi dari buku yang berbeda sehingga dibutuhkan waktu lebih untuk peserta membaca buku dan menuliskan resensinya.
			65.599.315	46.313.763	111.913.078			

- Capaian Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional IV (Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan) dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas yaitu Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, 6 kegiatan prioritas yaitu Partisipan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Produk Kodifikasi Bahasa, Penutur Bahasa Terbina, Penutur Bahasa Teruji, Generasi Muda Terbina Program Literasi, dan Lembaga Terfasilitasi Program BIPA, yang tersebar di 32

Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp141.473.678.000 dan realisasi sebesar Rp139.740.253.267 dengan rincian output setiap satker sebagai berikut.

Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Badan Bahasa	Partisipan Pelindungan Bahasa dan Sastra	43.471.258.000	43.345.164.948	99,71	orang	4.956	7.881	159,02
	Produk Kodifikasi Bahasa	8.329.172.000	8.280.278.440	99,41	dokumen	68	87	127,94
	Penutur Bahasa Terbina	34.495.048.000	33.865.025.431	98,17	orang	8.920	13.348	149,64
	Penutur Bahasa Teruji	8.585.420.000	8.416.268.030	98,03	orang	86.028	282.951	328,91
	Generasi Muda Terbina Program Literasi	29.191.418.000	28.548.100.353	97,80	orang	14.437	23.386	161,99
	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	17.401.362.000	17.285.416.065	99,33	lembaga	250	387	154,80
Jumlah		141.473.678.000	139.740.253.267	98,77		114.659	328.040	286,10

- Saldo rekening per 31 Desember 2023.

NO	NAMA SATKER	BANK	NO REKENING	ATAS NAMA	SALDO PER 31 Des 2023
1	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Bank Negara Indonesia	9892114190071000	BPG 088 Pusat Pengembangan dan Pelindungan	-
2	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Pusat	9892116905191000	BPG 023 PUSTANDA	-
3	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,	694297411	BPN 008 Pusat Pembinaan	-
4	BALAI BAHASA ACEH	BSI	20 8100526217121000	BPG 001 BALAI BAHASA ACEH	-
5	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	BNI	9892116216901000	BPG 004 BALAI BAHASA MEDAN	-
6	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Bank Mandiri	8100126151011000	BPG 010 BB Sumbar	-
7	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	Mandiri	8100126217291000	BPG 014 BBSUMSEL	-
8	Balai Bahasa Provinsi Riau	BNI	9892116217081000	BPG BB Riau	-
9	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	BNI	9892116805901000	BPG 009 Kantor Bahasa Provinsi Kepri	-
10	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	PT. Bank BRI	060601000101309	BPG 012 Kantor Bahasa Prov. Jambi	-
11	KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, TANJUNGPURANG	652856600661000	BPG 017 KANTOR BAHASA PROV. LAMPUNG	-
12	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Mandiri	8100126805301000	BPG 015 KB BABEL	-

13	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	Bank Mandiri	1	8100126805441000	BPG 016 KANTOR BAHASA PROVINSI BENGKULU	-
14	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	Mandiri		'8100126217331000	BPG042BBKALBAR	-
15	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	BRI	1	652866217541000	BPG 043 BALAI BAHASA PROV KALTENG	-
16	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	BANK RAKYAT INDONESIA		323201000010306	BPG 045 BALAI BAHASA KALSEL	-
17	KANTOR BAHASA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	MANDIRI		8100126600871000	BPG 046 KB KALTIM	-
18	Kantor Bahasa Provinsi Banten	BRI		652856805511000	BPG 020 Kantor Bahasa Provinsi Banten	-
19	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	BRI		652856216721000	BPG 022 BALAI BAHASA BANDUNG	-
20	BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH	MANDIRI	20	8100126116861000	BPG 026 BBJATENG	-
21	BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	BNI KC RAWAMANGUN		9892114145621000	BPG 030 BB YOGYA	-
22	BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. JAKARTA		652856151391000	BPG 165 BALAI BAHASA SURABAYA	-
23	BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR	BNI KC SIDOARJO		79420710	BPN 165 BALAI BAHASA JAWA TIMUR	-
24	Balai Bahasa Provinsi Bali	BNI		0828700569	BPG 037 Balai Bahasa Bali	-
25	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	BNI 46 Cabang Mataram		9892116600911000	BPG 038 KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	-
26	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	BNI 46 Cabang Mataram		0803741312	BPN 038 Kantor Bahasa NTB	-
27	Kantor Bahasa Provinsi NTT	Bank Negara Indonesia		'9892116806081000	BPG 039 KB NTT	-
28	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	PT. BANK MANDIRI KC PALU SAM RATULANGI	20	8100126217401000	BPG BB 051 SULTENG	-

29	KANTOR BAHASA PROV. SULAWESI TENGGARA	BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)		652856601091000	BPG 060 KANTOR BAHASA PROV SULTRA	-
30	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	BNI		9892116805651000	BPG 050 KB GRTLO	-
31	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	Mandiri		8100126805721000	BPG 062 KB MALUT	-
32	Kantor Bahasa Prov. Maluku	Bank BRI Cabang Ambon		652866805861000	BPG 061 KANTOR BAHASA MALUKU	-
33	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Bank Rakyat Indonesia		652856217611000	BPG 0490 Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	-
34	Balai Bahasa Papua	BNI		9892116151221000	Balai Bahasa Prov Papua	-
35	Balai Bahasa Sulawesi Selatan	BRI		652854145711000	BPG 054 BALAI BAHASA UJUNG PANDANG	-
36	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	BNI		9892111375441000	BPG 088 Sekretariat Badan PP Bahasa	-

Jakarta,

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa.

E. Aminudin Aziz

NIP196711161992031001

Lampiran 1
Laporan Realisasi Anggaran
UAPPA Eselon I Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ESELON I

: BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA 13
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tgl Data : 17/05/24 6:27 AM
Tgl Cetak : 17/05/24 2:02 PM
Halaman : 1
lap_jra_face_es1_new

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	2023		2022	
			REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
A. Pendapatan Negara Dan Hibah						
I. Pendapatan Perpajakan						
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak						
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	185,750,000	4,085,276,071	3,899,526,071	2199	1,276,740,000	3,392,230,308
III. Pendapatan Hibah						
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	185,750,000	4,085,276,071	3,899,526,071	2199	1,276,740,000	3,392,230,308
B. Belanja Negara						
I. Belanja Pemerintah Pusat						
1. Belanja Pegawai	548,474,648,000	538,953,306,544	(9,521,341,456)	98	517,468,963,000	505,814,989,082
2. Belanja Barang	144,721,742,000	142,781,333,797	(1,940,408,203)	99	143,313,729,000	140,941,480,977
3. Belanja Modal	335,778,603,000	328,249,674,322	(7,528,928,678)	98	366,079,589,000	356,955,557,349
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	67,974,303,000	67,922,298,425	(52,004,575)	100	8,075,645,000	7,917,950,756
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa						
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**

**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 023
ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA 13**

Tgl Data : 17/05/24 6:27 AM
Tgl Cetak : 17/05/24 2:02 PM
Halaman : 2
lap_ira_face_es1_new

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN %	ANGGARAN	2023		2022	
					REALISASI	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN %	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Kelstimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	548,474,648,000	538,953,306,544	(9,521,341,456)	98	517,468,963,000	505,814,989,082	(11,653,973,918)	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Lampiran 2

**Neraca UAPPA Eselon I Badan
Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa Per 31 Desember 2023**

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 17/05/24 2:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_es1_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASSET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0	5,777,777	(5,777,777)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	500,000	(500,000)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	205,426,540	8,706,478	196,720,062	2,259.47
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	3,519,000	(3,519,000)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	358,062,000	180,191,600	177,870,400	98.71
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1,790,310)	(900,958)	(889,352)	98.71
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	356,271,690	179,290,642	176,981,048	98.71
Persediaan	2,080,453,885	1,932,869,402	147,584,483	7.64
JUMLAH ASSET LANCAR	2,642,152,115	2,130,663,299	511,488,816	24.01
ASSET TETAP				
Tanah	892,987,805,493	892,768,938,210	218,867,283	0.02
Peralatan dan Mesin	158,307,919,167	147,411,157,040	10,896,762,127	7.39
Gedung dan Bangunan	334,999,285,032	335,724,660,464	(725,375,432)	(0.22)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,792,998,750	4,862,923,450	(69,924,700)	(1.44)
Aset Tetap Lainnya	8,324,566,234	8,286,679,684	37,886,550	0.46
Konstruksi Dalam Penggerjaan	50,506,171,610	4,924,747,073	45,581,424,537	925.56
AKUMULASI PENYUSUTAN	(191,146,683,416)	(175,491,214,990)	(15,655,468,426)	8.92
JUMLAH ASSET TETAP	1,258,772,062,870	1,218,487,890,931	40,284,171,939	3.31
ASSET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	8,998,693,806	2,337,365,447	6,661,328,359	284.99
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	10,832,183,000	0	10,832,183,000	0.00
Aset Lain-lain	11,747,572,590	18,896,450,736	(7,148,878,146)	(37.83)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASSET LAINNYA	(9,123,569,136)	(15,409,375,859)	6,285,806,723	(40.79)
JUMLAH ASSET LAINNYA	22,454,880,260	5,824,440,324	16,630,439,936	285.53
JUMLAH ASSET	1,283,869,095,245	1,226,442,994,554	57,426,100,691	4.68
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	4,111,154,094	143,814,310	3,967,339,784	2,758.65
Pendapatan Diterima Dimuka	22,442,818	36,940,317	(14,497,499)	(39.26)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	500,000	(500,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,133,596,912	181,254,827	3,952,342,285	2,180.55
JUMLAH KEWAJIBAN	4,133,596,912	181,254,827	3,952,342,285	2,180.55
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,279,735,498,333	1,226,261,739,927	53,473,758,406	4.36
JUMLAH EKUITAS	1,279,735,498,333	1,226,261,739,927	53,473,758,406	4.36

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 17/05/24 2:02 PM

Halaman : 2

lap_neraca_es1_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH EKUITAS	1,279,735,498,333	1,226,261,739,927	53,473,758,406	4.36
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,283,869,095,245	1,226,442,994,554	57,426,100,691	4.68

Keterangan :

FINAL

Lampiran 3

Laporan Operasional UAPPA Eselon I

Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa Periode 31 Desember 2023

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 17/05/24 2:02 PM

Halaman : 1

lap_lo_es1

KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,590,231,014	1,831,416,735	1,758,814,279	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,590,231,014	1,831,416,735	1,758,814,279	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	3,590,231,014	1,831,416,735	1,758,814,279	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	142,790,615,211	140,727,712,726	2,062,902,485	-
Beban Persediaan	2,624,320,406	2,663,963,439	(39,643,033)	-
Beban Barang dan Jasa	147,518,085,840	111,652,714,975	35,865,370,865	-
Beban Pemeliharaan	15,135,542,299	10,516,948,390	4,618,593,909	-
Beban Perjalanan Dinas	153,173,683,619	105,121,681,181	48,052,002,438	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	2,388,832,714	126,878,395,336	(124,489,562,622)	-
Beban Bunga	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 17/05/24 2:02 PM

Halaman : 2

lap_lo_es1

Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	20,423,310,660	18,188,328,384	2,234,982,276	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1,790,310	900,958	889,352	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	484,056,181,059	515,750,645,389	(31,694,464,330)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(480,465,950,045)	(513,919,228,654)	33,453,278,609	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(2,798,499,818)	589,149,202	(3,387,649,020)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	267,235,761	591,268,810	(324,033,049)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	3,065,735,579	2,119,608	3,063,615,971	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	444,929,218	662,188,734	(217,259,516)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	445,211,218	665,188,734	(219,977,516)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	282,000	3,000,000	(2,718,000)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(2,353,570,600)	1,251,337,936	(3,604,908,536)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(482,819,520,645)	(512,667,890,718)	29,848,370,073	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(482,819,520,645)	(512,667,890,718)	29,848,370,073	-

Keterangan :

FINAL

Lampiran 4
Laporan Perubahan Ekuitas
UAPPA Eselon I Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa
Periode 31 Desember 2023

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 17/05/24 2:02 PM

Halaman : 1

lap_lpe_es1

EKUITAS AWAL	1,226,261,739,927	880,429,455,290	345,832,284,637	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(482,819,520,645)	(512,667,890,718)	29,848,370,073	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	41,300,844	(600,537,520)	641,838,364	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	3,000,000	(3,000,000)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	680,000	0	680,000	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	39,719,886	(760,852,659)	800,572,545	-
LAIN-LAIN	900,958	157,315,139	(156,414,181)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	536,251,978,207	859,100,712,875	(322,848,734,668)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	53,473,758,406	345,832,284,637	(292,358,526,231)	-
EKUITAS AKHIR	1,279,735,498,333	1,226,261,739,927	53,473,758,406	-

Keterangan :

FINAL

Lampiran 5
Neraca Percobaan Basis Kas
Tingkat Eselon I Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa
Per 31 Desember 2023

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 17/05/24 2:03 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_es1

1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditaghikan ke Entitas Lain	0	538,953,306,544
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,085,276,071	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	237,345,539
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	35,667,999
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	306,288,100
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2,275,700,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	548,260,000
3.0	425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	90,392,274
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	44,800
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	221,485,130
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	359,586,888
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,000,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	505,341
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	53,351,853,200	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	866,757	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3,652,269,030	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,153,843,052	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	811,220,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	912,216,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	99,006,066	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,053,154,780	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	6,590,437,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	166,445,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,483,115,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	8,899,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	188	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,620,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	217,260	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,110,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	1,444,937,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	69,094,785,403	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	14,501,326	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	16,384,268,616	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	21,000,342	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	177,897,157	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	8,700,289,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,858,636,836	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 17/05/24 2:03 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_es1

1	2	3	4	5
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,358,078	0
3.0	521211	Belanja Bahan	33,463,792,171	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,304,405,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,590,215,469	0
3.0	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	13,078,231,700	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	51,955,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	39,971,050	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,623,310,859	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	199,778,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	3,809,559,769	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	616,287,341	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	218,219,927	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,273,005,506	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	41,992,960	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	89,843,400	0
3.0	522141	Belanja Sewa	6,039,859,990	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	19,376,326,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	37,334,408,811	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	29,600,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,534,976,771	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	112,391,590	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,905,110,813	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,912,500	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131,199,795	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	516,810,534	0
3.0	523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	71,975,000	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	117,651,380	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38,032,046,435	0
3.0	524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1,533,852,549	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,321,590,800	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	55,196,723,555	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	46,760,585,987	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3,612,414,099	0
3.0	524212	Belanja Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	98,882,000	0
3.0	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	313,920,000	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	135,425,550	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,582,274,697	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 17/05/24 2:03 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_kas_es1

1	2	3	4	5
3.0	532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	680,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52,726,779,293	0
3.0	533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	65,900,000	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1,165,709,568	0
3.0	533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	347,764,867	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	33,680,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	10,240,800
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	23,410
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	3,320,880
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,762,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	38,620,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	5,195,675
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	1,140,000
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	11,582,067
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	199,500
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	8,189,000
3.1	521231	Pengembalian Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	19,332,581
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	6,828,599
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	1,739,100
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	6,421,297
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	31,644,400
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	12,750,000
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	13,664,282
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	8,705,386
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	478,353,707
3.1	524112	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	3,767,247
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	26,850,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	395,971,351
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	415,998,161
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	57,871,340
3.1	533118	Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	490,000
JUMLAH			544,599,243,398	544,599,243,398

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 17/05/24 2:03 PM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_kas_es1

Keterangan :

FINAL

Lampiran 6

Neraca Percobaan Basis Akrual

Tingkat Eselon I Badan Pengembangan

dan Pembinaan Bahasa

Per 31 Desember 2023

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 17/05/24 2:03 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

1	2	3	4	5
0.0	114111	Beban Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	23,668,840	0
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	181,757,700	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	358,062,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	1,790,310
0.0	117111	Barang Konsumsi	592,819,228	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	30,478,642	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1,456,461,675	0
0.0	117131	Bahan Baku	396,340	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	298,000	0
0.0	131111	Tanah	892,987,805,493	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	158,307,919,167	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	334,999,285,032	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	651,400,000	0
0.0	134112	Irigasi	1,364,143,000	0
0.0	134113	Jaringan	2,777,455,750	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	8,324,566,234	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	50,506,171,610	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	130,143,177,573
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	58,748,641,100
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	648,645,858
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	437,911,810
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	981,649,075
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	186,658,000
0.0	162151	Software	1,978,126,947	0
0.0	162161	Lisensi	6,656,785,859	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	363,781,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	10,832,183,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	6,582,580,210	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5,164,992,380	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	5,788,402,789
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,903,766,885
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	531,497,582
0.0	169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	292,380,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	607,521,880
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	51,291,776
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	4,059,862,318
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	13,042,818

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 17/05/24 2:03 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

1	2	3	4	5
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	9,400,000
0.0	313111	Ditaghikan ke Entitas Lain	0	538,953,306,544
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,085,276,071	0
0.0	313211	Transfer Keluar	61,480,422,293	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	62,645,502,744
0.0	391111	Ekuitas	0	1,226,261,739,927
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	253,218,615
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	213,498,729	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	900,958
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	218,867,283
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	680,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	231,567,762
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtempaan BMN Lainnya	0	35,667,999
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	330,185,599
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2,266,300,000
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	548,260,000
3.0	425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	444,935,274
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	44,800
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	75,342,330
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	359,586,888
3.0	425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,000,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	505,341
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	282,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	53,339,838,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	842,923	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	3,648,948,150	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,153,843,052	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	809,458,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	907,644,800	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	99,006,066	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	3,053,154,780	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	6,582,406,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	166,445,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2,477,919,325	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	8,899,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	188	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,620,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 17/05/24 2:03 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akhir_es1

1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	217,260	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,110,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	1,444,937,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	69,079,823,041	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	14,501,326	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	16,380,684,966	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	21,000,342	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	177,897,157	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	8,699,149,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,858,636,836	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,358,078	0
3.0	521211	Beban Bahan	33,417,210,104	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	4,304,205,500	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	7,532,029,669	0
3.0	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	12,877,141,419	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	51,955,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	37,942,800	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	3,723,109,352	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	611,558,069	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	218,114,407	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,273,005,506	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	41,992,960	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	89,843,400	0
3.0	522141	Beban Sewa	6,033,438,693	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	19,348,281,600	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	30,664,872,952	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	29,600,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,175,499,267	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,896,405,427	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131,199,795	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	516,810,534	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	117,651,380	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	37,553,092,728	0
3.0	524112	Beban Perjalanan Dinas Tetap	1,530,085,302	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,295,340,800	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	54,802,535,204	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	46,339,204,826	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	3,554,542,759	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 17/05/24 2:03 PM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

1	2	3	4	5
3.0	524212	Beban Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	98,882,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11,457,636,510	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,276,459,556	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5,508,286	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	33,291,198	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	124,836,700	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	113,770,000	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	328,699,635	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	83,108,775	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,598,929,406	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	294,811,896	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	3,164,000	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	2,388,832,714	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	21,798,200	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	3,592,800	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	282,000	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	1,790,310	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	96,058,030	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	3,065,735,579	0
JUMLAH			2,037,042,533,838	2,037,042,533,838

Keterangan :

FINAL

Lampiran 7

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

UAPPA Eselon I Badan Pengembangan

dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023

menurut Jenis Belanja/Akun

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

MENURUT JENIS BELANJA / AKUN

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I

: 023
: 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 17/05/24 2:07 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_iru_bel_akun_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	55,569,662,000	53,828,822,000	53,351,853,200	10,240,800	53,341,612,400	99,09	487,209,600
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,390,000	1,254,000	866,757	23,410	843,347	67,25	410,653
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,467,591,000	3,707,414,000	3,652,269,030	3,320,880	3,648,948,150	98,42	58,465,850
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,190,776,000	1,153,843,052	0	1,153,843,052	96,9	36,932,948	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,274,400,000	819,880,000	811,220,000	1,762,000	809,458,000	98,73	10,422,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	3,116,509,000	1,382,216,000	912,216,000	38,620,000	873,596,000	63,2	508,620,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	287,394,000	126,613,000	99,006,066	0	99,006,066	78,2	27,606,934
511125	Belanja Tunj. PPn PNS	3,191,012,000	3,090,269,000	3,053,154,780	0	3,053,154,780	98,8	37,114,220
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	9,994,250,000	7,091,825,000	6,590,437,000	0	6,590,437,000	92,93	501,388,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	195,545,000	166,445,000	166,445,000	0	166,445,000	100	0
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	2,530,304,000	2,543,780,000	2,483,115,000	5,195,675	2,477,919,325	97,41	65,860,675
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	81,442,522,000	73,949,294,000	72,274,425,885	59,162,765	72,215,263,120	97,68	1,734,030,880
5116	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111							
511611	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	9,367,000	8,899,500	0	8,899,500	95,01	467,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	2,000	188	0	188	9,4	1,812
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	220,000	217,260	0	217,260	98,75	2,740
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	2,205,000	1,110,000	0	1,110,000	50,34	1,095,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116							
5122	Belanja Lembur	0	13,414,000	11,846,948	0	11,846,948	88,32	1,567,052
512211	Belanja Uang Lembur	1,625,672,000	1,557,612,000	1,444,937,000	0	1,444,937,000	92,77	112,675,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122							
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1,625,672,000	1,557,612,000	1,444,937,000	0	1,444,937,000	92,77	112,675,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	72,366,147,000	69,186,902,000	69,094,785,403	0	69,094,785,403	99,87	92,116,597
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	14,520,000	14,501,326	0	14,501,326	99,87	18,674
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124							
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	14,719,010,000	16,615,623,000	16,384,268,616	0	16,384,268,616	98,61	231,354,384
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12,000,000	21,001,000	21,000,342	0	21,000,342	100	658
521113	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	383,310,000	203,940,000	177,897,157	0	177,897,157	87,23	26,042,843
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,631,228,000	8,874,759,000	8,700,289,000	1,140,000	8,699,149,000	98,02	175,610,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,733,500,000	1,869,624,000	1,858,636,836	0	1,858,636,836	99,41	10,987,164
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN

TINGKAT ESelon I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESelon I : 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Kode Lap : LR.A.B.S.2
Tanggal : 17/05/24 2:07 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	7=5+6		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	184,834,000	31,486,000	30,358,078	0	30,358,078	96,42	1,127,922
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	25,683,882,000	27,616,433,000	27,172,450,029	1,14,000	27,171,310,029	98,39	445,122,971
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	29,301,664,000	34,566,632,000	33,463,792,171	11,582,067	33,452,210,104	96,78	1,114,421,896
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,565,980,000	4,399,447,000	4,304,405,000	199,500	4,304,205,500	97,84	95,241,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8,754,674,000	7,777,714,000	7,590,215,469	8,189,000	7,582,026,469	97,48	195,687,531
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	7,834,200,000	13,090,060,000	13,078,231,700	19,332,581	13,058,899,119	99,76	31,160,881
521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	25,200,000	0	0	0	0	0	0
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	126,855,000	51,955,000	51,955,000	0	51,955,000	100	0
521252	Belanja Perjalanan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	40,019,000	39,971,050	0	39,971,050	99,88	47,950
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	52,608,573,000	59,925,827,000	58,528,570,390	39,303,148	58,489,267,242	97,6	1,436,559,758
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,165,361,000	4,681,040,000	4,623,310,859	0	4,623,310,859	98,77	57,729,141
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	82,500,000	20,000,000	199,778,000	0	199,778,000	99,89	222,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	5,247,861,000	4,881,040,000	4,823,038,859	0	4,823,038,859	98,81	57,951,141
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Layanan Listrik	3,242,398,000	3,870,937,000	3,809,559,769	6,828,599	3,802,731,170	98,24	68,205,830
522112	Belanja Layangan Telepon	722,413,000	649,873,000	616,287,341	1,739,100	614,548,241	94,56	35,324,759
522113	Belanja Layangan Air	258,687,000	225,500,000	218,219,927	0	218,219,927	96,77	7,280,073
522119	Belanja Layangan Daya dan Jasa Lainnya	881,200,000	1,283,754,000	1,273,005,506	0	1,273,005,506	99,16	10,748,494
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	135,596,000	58,319,000	41,992,980	0	41,992,980	97,01	16,326,040
522131	Belanja Jasa Konsultan	90,000,000	90,000,000	89,843,400	0	89,843,400	99,83	156,600
522141	Belanja Jasa Sewa	6,323,045,000	6,099,853,000	6,039,859,990	6,421,297	6,033,438,693	98,91	66,414,307
522151	Belanja Jasa Profesi	22,451,860,000	19,826,377,000	19,376,326,000	31,644,400	19,344,681,600	97,57	481,695,400
522191	Belanja Jasa Lainnya	38,798,640,000	37,675,299,000	37,334,408,811	12,750,000	37,321,658,811	99,06	353,640,189
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	218,897,000	31,850,000	29,600,000	0	29,600,000	92,94	2,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	73,123,736,000	69,811,762,000	68,829,103,704	59,383,396	68,769,720,308	98,51	1,042,041,692
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,574,721,000	9,630,526,000	9,534,976,771	13,664,282	9,521,312,489	98,87	109,213,511
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Mesin	101,290,000	5,149,769,000	113,657,000	112,391,590	112,391,590	98,89	1,265,410
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,358,456,000	27,000,000	4,905,110,813	8,705,386	4,896,405,427	95,08	253,363,573
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100,519,000	131,473,000	131,199,795	0	131,199,795	99,97	500
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	478,756,000	554,537,000	516,810,534	0	516,810,534	93,2	273,205
523133	Belanja Jasa Layanan Jaringan	38,800,000	71,996,000	71,975,000	0	71,975,000	99,97	37,726,466
523136	Belanja Pemeliharaan Lainnya	48,000,000	117,653,000	117,651,380	0	117,651,380	100	21,000
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya							1,620

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENUJU JENIS BELANJA / AKUN

TINGKAT ESelon I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESelon I : 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 17/05/24 2:07 PM
Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_bel_akun_ess1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI	7=5+6		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KEI OMPOK BELANJA 5231	11,727,452,000	15,771,524,000	15,392,028,383	22,369,668	15,369,658,715	97.45	401,865,285
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	41,628,884,000	38,981,735,000	38,032,046,435	478,353,707	37,553,692,728	96.34	1,428,042,272
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,631,686,000	1,753,018,000	1,533,852,549	3,767,247	1,530,085,302	87.28	222,932,698
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	10,033,887,000	9,387,063,000	9,321,590,800	26,850,000	9,294,740,800	99.02	92,322,200
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39,215,154,000	55,836,203,000	55,196,723,555	395,971,351	54,800,752,204	98.15	1,035,450,796
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	54,215,267,000	47,587,348,000	46,760,585,987	415,998,161	46,344,587,826	97.39	1,242,760,174
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	146,724,878,000	153,545,367,000	150,844,799,326	1,320,940,466	149,523,858,860	97.38	4,021,508,140
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	5,888,299,000	3,670,590,000	3,612,414,089	57,871,340	3,554,542,759	96.84	116,047,241
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	104,760,000	98,882,000	0	98,882,000	94.39	5,878,000
524212	Belanja Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	0	3,775,350,000	3,711,296,089	57,871,340	3,653,424,759	96.77	121,925,241
	JUMLAH SUB KEI OMPOK BELANJA 5242	5,888,299,000	3,670,590,000	3,554,542,759	57,871,340	3,653,424,759	96.77	121,925,241
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	324,100,000	315,300,000	313,920,000	0	313,920,000	99.56	1,380,000
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Pemda	324,100,000	315,300,000	313,920,000	0	313,920,000	99.56	1,380,000
	JUMLAH SUB KEI OMPOK BELANJA 5261	324,100,000	315,300,000	313,920,000	0	313,920,000	99.56	1,380,000
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Pemda	136,000,000	136,000,000	135,425,550	0	135,425,550	99.58	574,450
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	8,190,000,000	0	0	0	0	0	0
526312	Belanja Barang Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	8,326,000,000	136,000,000	135,425,550	0	135,425,550	99.58	574,450
	JUMLAH SUB KEI OMPOK BELANJA 5263	8,326,000,000	136,000,000	135,425,550	0	135,425,550	99.58	574,450
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	329,654,781,000	335,778,603,000	329,750,682,340	1,501,008,018	328,249,674,322	97.76	7528928678
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,873,215,000	13,623,830,000	13,582,274,697	0	13,582,274,697	99.69	41,555,303
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,380,000	680,000	680,000	0	680,000	100	0
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	14,874,575,000	13,624,510,000	13,582,954,697	0	13,582,954,697	99.69	41,555,303
	JUMLAH SUB KEI OMPOK BELANJA 5321	14,874,575,000	13,624,510,000	13,582,954,697	0	13,582,954,697	99.69	41,555,303
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56,307,615,000	52,727,584,000	52,726,779,293	0	52,726,779,293	100	804,707
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88,980,000	65,900,000	65,900,000	0	65,900,000	100	0
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	1,598,818,000	1,165,711,000	1,165,709,568	0	1,165,709,568	100	1,432
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	319,324,000	356,918,000	347,764,867	490,000	347,764,867	97.3	9,643,133
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	33,680,000	33,680,000	0	33,680,000	100	0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	58,314,737,000	54,349,793,000	54,339,833,728	490,000	54,339,843,728	99.98	10,449,272
	JUMLAH SUB KEI OMPOK BELANJA 5331	58,314,737,000	54,349,793,000	54,339,833,728	490,000	54,339,843,728	99.98	10,449,272
5361	Belanja Modal Lainnya	189,500,000	0	0	0	0	0	0
536111	Belanja Modal Lainnya	189,500,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KEI OMPOK BELANJA 5361	189,500,000	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENUJU JENIS BELANJA / AKUN

TINGKAT ESelon I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESelon I

: 023
: 13
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 17/05/24 2:07 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_ess1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELompok BELANJA 53	73,378,812,000	67,974,303,000	67,922,788,425	490,000	67,922,298,425	99,32	52004575
	JUMLAH BELANJA	558,467,934,000	548,474,648,000	540,513,967,327	1,560,660,783	538,953,306,544	98,26	9,521,341,456

Lampiran 8

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

UAPPA Eselon I Badan Pengembangan

dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023

menurut Wilayah/Satker

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ESelon I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=54	9=4-7
0100	DKI JAKARTA							
137544	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	131,133,680,000	127,050,657,000	125,434,934,046	555,617,893	124,879,316,153	98,29	2,171,340,847
419007	pusat pengembangan dan pelindungan bahasa dan	38,884,294,000	38,608,294,000	37,471,445,097	19,334,782	37,452,110,315	97,01	1,156,183,685
419008	pusat pembinaan bahasa dan sastra	41,322,425,000	39,900,445,000	38,406,355,031	310,083,124	38,086,271,907	95,48	1,804,173,093
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0100	211,340,389,000	205,559,396,000	201,312,734,174	885,035,799	200,427,698,375	97,93	5,131,697,625
0200	JAWA BARAT							
621672	BALAI BAHASA JAWA BARAT	12,148,711,000	11,946,538,742	11,920,438,375	26,100,367	11,920,438,375	98,12	228,272,625
690519	pusat pengujian dan pemberdayaan bahasa	37,184,835,000	34,784,820,000	33,910,190,361	359,218,992	33,550,971,369	96,51	1,213,848,631
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0200	49,333,546,000	46,913,531,000	45,856,729,103	385,319,359	45,471,409,744	97,75	1,442,121,256
0300	JAWA TENGAH							
621686	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	12,568,456,000	16,034,075,000	15,952,059,337	0	15,952,059,337	99,49	82,015,663
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0300	12,568,456,000	16,034,075,000	15,952,059,337	0	15,952,059,337	99,49	82,015,663
0400	DI YOGYAKARTA							
414562	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	8,461,624,000	8,461,624,000	8,397,737,759	5,864,368	8,392,073,391	99,18	69,550,609
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0400	8,461,624,000	8,461,624,000	8,397,737,759	5,864,368	8,392,073,391	99,24	69,550,609
0500	JAWA TIMUR							
615139	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	11,507,649,000	13,465,148,000	13,312,630,036	450,578	13,312,179,458	98,86	152,968,542
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0500	11,507,649,000	13,465,148,000	13,312,630,036	450,578	13,312,179,458	98,87	152,968,542
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
621712	BALAI BAHASA ACEH	9,470,622,000	8,997,668,000	8,878,676,714	12,547,244	8,866,129,470	98,54	131,538,530
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0600	9,470,622,000	8,997,668,000	8,878,676,714	12,547,244	8,866,129,470	98,88	131,538,530
0700	SUMATERA UTARA							
621690	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	10,880,505,000	10,307,097,000	10,237,093,726	8,266,188	10,228,827,538	99,24	78,269,462
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0700	10,880,505,000	10,307,097,000	10,237,093,726	8,266,188	10,228,827,538	99,32	78,269,462
0800	SUMATERA BARAT							
615101	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	7,107,067,000	6,719,381,000	6,606,946,519	41,322,044	6,565,624,475	97,71	153,736,525
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0800	7,107,067,000	6,719,381,000	6,606,946,519	41,322,044	6,565,624,475	98,33	153,736,525
0900	RIAU							
621708	BALAI BAHASA RIAU	7,258,446,000	7,244,457,000	7,235,847,879	1,470,000	7,234,377,879	99,86	10,079,121
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0900	7,258,446,000	7,244,457,000	7,235,847,879	1,470,000	7,234,377,879	99,88	10,079,121
1000	JAMBI							
660070	KANTOR BAHASA JAMB	7,131,193,000	6,689,041,000	6,638,315,643	3,685,902	6,624,649,741	99,04	64,391,259
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1000	7,131,193,000	6,689,041,000	6,638,315,643	3,685,902	6,624,649,741	99,09	64,391,259
1100	SUMATERA SELATAN							
621729	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	10,533,679,000	9,482,160,000	9,242,852,796	839	9,242,851,957	97,48	239,308,043
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1100	10,533,679,000	9,482,160,000	9,242,852,796	839	9,242,851,957	97,48	239,308,043

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 17/05/24 2:07 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_rekon17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA

TINGKAT ESELON I

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON I : 13**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 17/05/24 2:07 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1-rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=54	9=4.7
1200 660066	LAMPUNG KANTOR BAHASA LAMPUNG	8,283,236,000 8,283,236,000	8,283,236,000 8,283,236,000	8,218,014,108 8,218,014,108	686 686	8,218,013,422 8,218,013,422	99.21 99.21	65,222,578 65,222,578
1300 621733	KALIMANTAN BARAT BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	6,541,085,000 6,541,085,000	6,541,085,000 6,541,085,000	6,524,311,077 6,524,311,077	4,950,051 4,950,051	6,519,361,026 6,519,361,026	99.67 99.74	21,723,974 21,723,974
1400 621754	KALIMANTAN TENGAH BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	10,625,034,000 10,625,034,000	10,625,029,000 10,625,029,000	10,641,317,107 10,641,317,107	248 248	10,641,316,859 10,641,316,859	99.68 99.68	33,712,141 33,712,141
1500 615118	KALIMANTAN SELATAN BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	8,706,722,000 8,706,722,000	8,689,654,000 8,689,654,000	8,560,957,289 8,560,957,289	4,662,809 4,692,809	8,556,264,480 8,556,264,480	98.46 98.52	133,389,540 133,389,540
1600 660087	KALIMANTAN TIMUR KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	8,274,114,000 8,274,114,000	8,112,414,000 8,112,414,000	7,981,460,891 7,981,460,891	1,109 1,109	7,981,459,782 7,981,459,782	98.39 98.39	130,954,218 130,954,218
1700 621761	SULAWESI UTARA BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	5,330,533,000 5,330,533,000	5,472,858,000 5,472,858,000	5,447,186,395 5,447,186,395	4,631,096 4,631,096	5,442,555,299 5,442,555,299	99.45 99.53	30,302,701 30,302,701
1800 621740	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1700 SULAWESI TENGAH	5,330,533,000 7,721,846,000	5,472,858,000 7,507,028,000	5,447,186,395 7,249,118,295	4,631,096 6,405,468	5,442,555,299 7,242,712,827	99.53 98.48	30,302,701 264,315,173
1900 414571	SULAWESI SELATAN BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	10,460,990,000 10,728,812,000	10,392,095,429 10,392,095,429	14,838,025 14,838,025	10,377,257,404 14,838,025	10,377,257,404 14,838,025	99.2 99.34	83,732,596 83,732,596
2000 660109	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1800 KANTOR BAHASA SULAWESI TENGAH	7,034,431,000 7,034,431,000	7,019,877,000 7,019,877,000	6,967,635,772 6,967,635,772	24,094,420 24,094,420	6,943,541,352 6,943,541,352	98.91 99.26	76,335,648 76,335,648
2100 680586	MALUKU KANTOR BAHASA MALUKU	38,525,730,000 38,525,730,000	38,316,730,000 38,316,730,000	38,239,684,782 38,239,684,782	24,474,335 24,474,335	38,215,210,447 38,215,210,447	99.74 99.8	101,519,553 101,519,553
2200 414587	BALI BALAI BAHASA BALI	11,344,259,000 11,344,259,000	10,798,155,000 10,798,155,000	10,417,700,008 10,417,700,008	42,278,624 42,278,624	10,375,421,384 10,375,421,384	96.09 96.48	422,733,616 422,733,616
2300 660091	NUSA TENGGARA BARAT KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	9,183,941,000 9,183,941,000	9,050,470,000 9,050,470,000	9,087,316,541 9,087,316,541	58,320,086 58,320,086	9,028,996,455 9,028,996,455	99.76 100.41	21,473,545 21,473,545
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2300	9,183,941,000	9,050,470,000	9,087,316,541	58,320,086	9,028,996,455	100.41	21,473,545

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA

TINGKAT ESelon I

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 17/05/24 2:07 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_jra_bel_org_es1--rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESelon I

: 023
: 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			REALISASI %	SISA ANGGARAN
				BELANJA	FENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=54	9=47
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	7,947,824,000	7,489,678,000	7,333,745,788	286	7,333,745,502	97.92	155,932,498
680608	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR							
2500	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2400	7,947,824,000	7,489,678,000	7,333,745,788	286	7,333,745,502	97.92	155,932,498
615122	PAPUA	9,248,677,000	9,091,607,000	9,091,314,353	5,520,925	9,085,793,428	99.94	5,813,572
	BALAI BAHASA PAPUA	9,248,677,000	9,091,607,000	9,091,314,353	5,520,925	9,085,793,428	100	5,813,572
2600	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2500	9,248,677,000	9,091,607,000	9,091,314,353	364	6,749,321,971	98.93	79,737,029
680544	BENGKULU	6,920,400,000	6,829,059,000	6,749,322,335	364	6,749,321,971	98.93	79,737,029
	KANTOR BAHASA BENGKULU	6,920,400,000	6,829,059,000	6,749,322,335	364	6,749,321,971	98.93	79,737,029
2800	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2600	6,920,400,000	6,829,059,000	6,749,322,335	364	6,749,321,971	98.93	79,737,029
680572	MALUKU UTARA	8,509,434,000	8,175,924,000	8,146,821,360	4,770,864	8,142,050,496	99.59	33,873,504
	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	8,509,434,000	8,175,924,000	8,146,821,360	4,770,864	8,142,050,496	99.59	33,873,504
2900	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2800	8,175,924,000	8,146,821,360	8,142,050,496	99.59			
680551	BANTEN	6,581,749,000	6,408,907,000	6,386,867,829	0	6,386,867,829	99.96	22,039,171
	KANTOR BAHASA BANTEN	6,581,749,000	6,408,907,000	6,386,867,829	0	6,386,867,829	99.96	22,039,171
3000	BANGKA BELITUNG	4,348,751,000	4,348,751,000	4,312,362,973	7,820,000	4,304,542,973	98.98	44,208,027
680530	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4,348,751,000	4,348,751,000	4,312,362,973	7,820,000	4,304,542,973	99.16	44,208,027
3100	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3000	4,348,751,000	4,348,751,000	4,312,362,973	7,820,000	4,304,542,973	99.16	44,208,027
680585	GORONTALO	31,572,278,000	29,911,447,000	29,786,011,805	7,818,740	29,778,193,065	99.58	133,253,935
	KANTOR BAHASA GORONTALO	31,572,278,000	29,911,447,000	29,786,011,805	7,818,740	29,778,193,065	99.58	133,253,935
3200	KEPULAUAN RIAU	5,445,892,000	5,418,191,000	5,319,099,524	6,300,326	5,312,799,198	98.05	105,391,802
680590	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	5,445,892,000	5,418,191,000	5,319,099,524	6,300,326	5,312,799,198	98.17	105,391,802
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3200	5,445,892,000	5,418,191,000	5,319,099,524	6,300,326	5,312,799,198	98.17	105,391,802
	JUMLAH BELANJA	558,467,934,000	548,474,648,000	540,513,967,327	1,560,660,783	538,953,306,544	98.55	9,521,341,456

Lampiran 9

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

UAPPA Eselon I Badan Pengembangan

dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023

menurut Wilayah/Jenis Belanja

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / JENIS BELANJA

TINGKAT ESelon I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESelon I

: 023
: 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BAGAN PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Kode Lap : LRA.B.E1.3

Tanggal : 17/05/24 2:07 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_es1 -rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=54	9=4-7
null	null							
51	BELANJA PEGAWAI	155,434,341,000	144,721,742,000	142,840,496,562	59,162,765	142,781,333,797	98,66	1,940,408,203
52	BELANJA BARANG	329,654,781,000	335,778,603,000	329,750,682,340	1,501,008,018	328,249,674,322	97,76	7,528,928,678
53	BELANJA MODAL	73,378,812,000	67,974,303,000	67,922,788,425	490,000	67,922,298,425	99,92	52,004,575
	JUMLAH BELANJA WILAYAH null	558,467,934,000	548,474,648,000	540,513,967,327	1,560,660,783	538,953,306,544	98,55	9,521,341,456
	JUMLAH BELANJA	558,467,934,000	548,474,648,000	540,513,967,327	1,560,660,783	538,953,306,544	98,55	9,521,341,456

Lampiran 10

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

UAPPA Eselon I Badan Pengembangan

dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023

menurut Sumber

Dana/Program/Kegiatan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

TINGKAT ESELON I
MENUJU SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
UNIT ESELON I : 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 17/05/24 2:08 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_es1 -

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
DH	Program Penjajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan							
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	77,358,725,000	76,542,216,854	100,169,802	76,442,047,052	98.82	916,677,948	
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	93,251,110,000	90,283,052,118	396,889,890	89,886,162,228	97.88	1,942,967,772	
6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan	54,369,671,000	53,554,209,804	391,612,037	53,162,397,767	97.78	1,207,073,233	
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DH	223,957,308,000	220,371,478,776	888,671,729	219,490,807,047	98.16	4,066,718,953	
WA	Program Dukungan Manajemen							
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	324,777,810,000	320,050,901,361	656,937,745	319,393,963,616	98.34	5,383,846,384	
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	332,371,314,000	324,777,810,000	320,050,901,361	656,937,745	98.34	5,383,846,384	
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	558,328,622,000	548,335,336,000	540,430,380,137	1,545,609,474	98.205	9,450,565,337	
04	PNBP							
DH	Program Penjajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan							
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	139,312,000	83,587,190	15,051,309	68,535,881	49.2	70,776,119	
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DH	139,312,000	83,587,190	15,051,309	68,535,881	49.2	70,776,119	
	JUMLAH BELANJA PNBP	138,312,000	83,587,190	15,051,309	68,535,881	49.2	70,776,119	
	JUMLAH	558,467,934,000	548,474,648,000	540,513,967,327	1,560,686,783	538,953,306,544	88.4	9,521,341,456

Lampiran 11

Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan UAPPA Eselon I Badan

Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa Tahun 2023 menurut Akun

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON I : 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 17/05/24 2:21 PM
Halaman : 1

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	
1	2	3	4	5	6=4-5
42 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Juran Badan Usaha dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	237,345,539	0	237,345,539
425122	Pendapatan dari Pemindahtaongan BMN Lainnya	0	35,667,999	0	35,667,999
425129	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	306,288,100	0	306,288,100
425131		0	579,301,638	0	579,301,638
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Pengelolaan Hukum	0	2,275,700,000	0	2,275,700,000
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2,275,700,000	0	2,275,700,000
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252					
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	185,750,000	548,260,000	0	548,260,000
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	90,392,274	0	90,392,274
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	185,750,000	638,652,274	343,82
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254					
4258	Pendapatan Denda	0	44,800	0	44,800
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	44,800	0	44,800
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258					
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	44,800	0	44,800
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	221,485,130	0	221,485,130
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	359,586,888	0	359,586,888
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,000,000	0	10,000,000
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	505,341	0	505,341
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259					
JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42					
JUMLAH PENDAPATAN					
		185,750,000	4,085,276,071	0	4,085,276,071
		185,750,000	4,085,276,071	0	4,085,276,071
					2,199,34

Lampiran 12

Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan UAPPA Eselon I Badan

Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa Tahun 2023 menurut

Wilayah/Satker

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESelon I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ESelon I : 13 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI PENDAPATAN NETTO
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	
1	2	3	4	5	6=4-5
0100	DKI JAKARTA				7=6/3
137544	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	0	136,275,871	0	136,275,871
419007	PUTUS PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	0	54,028,411	0	54,028,411
419008	PUTUS PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	185,750,000	2,825,546,439	0	2,825,546,439
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	185,750,000	3,015,850,721	0	3,015,850,721
0200	JAWA BARAT				
621672	BALAI BAHASA JAWA BARAT	0	13,335,257	0	13,335,257
690519	PUTUS PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA	0	1,275	0	1,275
	JUMLAH PENDAPATAN (0200) - JAWA BARAT	0	13,336,532	0	13,336,532
0300	JAWA TENGAH				
621686	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	0	151,798,558	0	151,798,558
	JUMLAH PENDAPATAN (0300) - JAWA TENGAH	0	151,798,558	0	151,798,558
0400	DI YOGYAKARTA				
414562	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	0	16,456,589	0	16,456,589
	JUMLAH PENDAPATAN (0400) - DI YOGYAKARTA	0	16,456,589	0	16,456,589
0500	JAWA TIMUR				
615139	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	0	158,274,800	0	158,274,800

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 17/05/24 2:21 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pem_org_es1 --rekon17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT ESELON I

MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I

: 023
: 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	
1	2	3	4	5	6=4-5 7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR	0	158,274,800	0	158,274,800
0600 621712	NANGGROE ACEH DARUSSALAM BALAI BAHASA ACEH	0	10,819,329	0	10,819,329
	JUMLAH PENDAPATAN (0600) - NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0	10,819,329	0	10,819,329
0700 621690	SUMATERA UTARA BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	0	14,112,343	0	14,112,343
	JUMLAH PENDAPATAN (0700) - SUMATERA UTARA	0	14,112,343	0	14,112,343
0800 615101	SUMATERA BARAT BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	0	48,982,154	0	48,982,154
	JUMLAH PENDAPATAN (0800) - SUMATERA BARAT	0	48,982,154	0	48,982,154
0900 621708	RIAU BALAI BAHASA RIAU	0	62,497,139	0	62,497,139
	JUMLAH PENDAPATAN (0900) - RIAU	0	62,497,139	0	62,497,139
1000 660070	JAMBI KANTOR BAHASA JAMBI	0	17,634,212	0	17,634,212
	JUMLAH PENDAPATAN (1000) - JAMBI	0	17,634,212	0	17,634,212
1100	SUMATERA SELATAN				

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT ESelon I

MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESelon I : 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	
1	2	3	4	5	6=4-5
621729	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	0	1,800,000	0	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (1100) - SUMATERA SELATAN	0	1,800,000	0	0
1200	LAMPUNG	0	122,580,000	0	1,800,000
660066	KANTOR BAHASA LAMPUNG	0	122,580,000	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG	0	122,580,000	0	0
1300	KALIMANTAN BARAT	0	19,349,129	0	122,580,000
621733	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	0	19,349,129	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1300) - KALIMANTAN BARAT	0	19,349,129	0	0
1400	KALIMANTAN TENGAH	0	19,349,129	0	19,349,129
621754	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	0	25,377,922	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1400) - KALIMANTAN TENGAH	0	25,377,922	0	0
1500	KALIMANTAN SELATAN	0	25,377,922	0	25,377,922
615118	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	0	25,377,922	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1500) - KALIMANTAN SELATAN	0	25,377,922	0	0
1600	KALIMANTAN TIMUR	0	1,681,935	0	1,681,935
660087	KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	0	1,681,935	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1600) - KALIMANTAN TIMUR	0	1,681,935	0	0
			61,320,000	0	61,320,000
			61,320,000	0	0

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 17/05/24 2:21 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1_rekon17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT ESelon I

MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESelon I : 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	
1	2	3	4	5	6=4-5
1700	SULAWESI UTARA	0	13,807,500	0	7=6/3
621761	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	0	13,807,500	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1700) - SULAWESI UTARA	0	13,807,500	0	0
1800	SULAWESI TENGAH	0	29,012,800	0	0
621740	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	0	29,012,800	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1800) - SULAWESI TENGAH	0	29,012,800	0	0
1900	SULAWESI SELATAN	0	58,486,055	0	0
414571	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	0	58,486,055	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1900) - SULAWESI SELATAN	0	58,486,055	0	0
2000	SULAWESI TENGGARA	0	20,967,055	0	0
660109	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	0	20,967,055	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2000) - SULAWESI TENGGARA	0	20,967,055	0	0
2200	BALI	0	29,983,707	0	0
414587	BALAI BAHASA BALI	0	29,983,707	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2200) - BALI	0	29,983,707	0	0
2300	NUSA TENGGARA BARAT	0	83,055,630	0	0
660091	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	0	83,055,630	0	0

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 17/05/24 2:21 PM
Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_pendapatan --rekon17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT ESelon I
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESelon I : 13
KANTOR : 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	
1	2	3	4	5	6=4-5 7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (2300) - NUSA TENGGARA BARAT	0	83,055,630	0	83,055,630
2400	NUSA TENGGARA TIMUR	0	51,174,550	0	51,174,550
680608	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	0	51,174,550	0	51,174,550
	JUMLAH PENDAPATAN (2400) - NUSA TENGGARA TIMUR	0	14,982,032	0	14,982,032
2500	PAPUA	0	14,982,032	0	14,982,032
615122	BALAI BAHASA PAPUA	0	14,982,032	0	14,982,032
	JUMLAH PENDAPATAN (2500) - PAPUA	0	14,982,032	0	14,982,032
2600	BENGKULU	0	17,225,377	0	17,225,377
680544	KANTOR BAHASA BENGKULU	0	17,225,377	0	17,225,377
	JUMLAH PENDAPATAN (2600) - BENGKULU	0	17,225,377	0	17,225,377
2800	MALUKU UTARA	0	1,293,522	0	1,293,522
680572	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	0	1,293,522	0	1,293,522
	JUMLAH PENDAPATAN (2800) - MALUKU UTARA	0	1,293,522	0	1,293,522
2900	BANTEN	0	4,045,000	0	4,045,000
680551	KANTOR BAHASA BANTEN	0	4,045,000	0	4,045,000
	JUMLAH PENDAPATAN (2900) - BANTEN	0	4,045,000	0	4,045,000
3000	BANGKA BELITUNG				

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 17/05/24 2:21 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1-rekon17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT ESelon I

MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESelon I : 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
680530	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	470	0	470	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3000) - BANGKA BELITUNG	0	470	0	470	0
3100	GORONTALO	0	15,081,010	0	15,081,010	0
680565	KANTOR BAHASA GORONTALO	0				
	JUMLAH PENDAPATAN (3100) - GORONTALO	0	15,081,010	0	15,081,010	0
3200	KEPULAUAN RIAU	0	4,290,000	0	4,290,000	0
680590	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	0				
	JUMLAH PENDAPATAN (3200) - KEPULAUAN RIAU	0	4,290,000	0	4,290,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	185,750,000	4,085,276,071	0	4,085,276,071	46,096

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 17/05/24 2:21 PM
Halaman : 6
Prg ID : lap_irapen_org_es1 --rekon17

Lampiran 13
Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan UAPPA Eselon I Badan
Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa Tahun 2023 menurut
Wilayah/Akun

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT ESELON I

MENURUT WILAYAH / AKUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
KODE : 023
: 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	
1	2	3	4	5	6=4-5
0100	DKI JAKARTA				7=6/3
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	53,152,110	0	53,152,110
425129	Pendapatan dari Pemindahtempahan BMN Lainnya	0	27,999,999	0	27,999,999
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2,275,700,000	0	2,275,700,000
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	185,750,000	548,260,000	0	548,260,000
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	84,362,274	0	84,362,274
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,817,733	0	21,817,733
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,053,264	0	4,053,264
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	505,341	0	505,341
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	185,750,000	3,015,850,721	0	3,015,850,721
0200	JAWA BARAT				
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	13,333,339	0	13,333,339
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,193	0	3,193
	JUMLAH PENDAPATAN (0200) - JAWA BARAT	0	13,336,532	0	13,336,532
0300	JAWA TENGAH				
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	148,298,300	0	148,298,300
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,500,258	0	3,500,258

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 17/05/24 2:21 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_irapen_org_akun_es1_rekon17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT ESelon I

MENURUT WILAYAH / AKUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESelon I
: 023 : 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	
1	2	3	4	5	6=4-5
	JUMLAH PENDAPATAN (0300) - JAWA TENGAH	0	151,798,558	0	151,798,558
0400	DI YOGYAKARTA				
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,456,789	0	3,456,789
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	0	6,030,000	0	6,030,000
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	44,800	0	44,800
425911	Penerimaan Kembalikan Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,497,000	0	4,497,000
425912	Penerimaan Kembalikan Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,428,000	0	2,428,000
	JUMLAH PENDAPATAN (0400) - DI YOGYAKARTA	0	16,456,589	0	16,456,589
0500	JAWA TIMUR				
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	157,989,800	0	157,989,800
425912	Penerimaan Kembalikan Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	285,000	0	285,000
	JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR	0	158,274,800	0	158,274,800
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM				
425129	Pendapatan dari Perimbangangan BMN Lainnya	0	1,303,000	0	1,303,000
425912	Penerimaan Kembalikan Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,516,329	0	9,516,329
	JUMLAH PENDAPATAN (0600) - NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0	10,819,329	0	10,819,329
0700	SUMATERA UTARA				

Kode Lap : LRA.P.E.3

Tanggal : 17/05/24 2:21 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_irapen_org_akun_es1_rekon17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT ESELON I

MENURUT WILAYAH / AKUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESELON I : 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	
1	2	3	4	5	6=5/4
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	10,599,999	0	10,599,999
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,344	0	2,344
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,510,000	0	3,510,000
	JUMLAH PENDAPATAN (0700) - SUMATERA UTARA	0	14,112,343	0	14,112,343
0800	SUMATERA BARAT				
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5,550,000	0	5,550,000
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	33,432,154	0	33,432,154
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,000,000	0	10,000,000
	JUMLAH PENDAPATAN (0800) - SUMATERA BARAT	0	48,982,154	0	48,982,154
0900	RIAU				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	62,497,139	0	62,497,139
	JUMLAH PENDAPATAN (0900) - RIAU	0	62,497,139	0	62,497,139
1000	JAMBI				
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	5,777,777	0	5,777,777
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,307,226	0	5,307,226
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,549,209	0	6,549,209
	JUMLAH PENDAPATAN (1000) - JAMBI	0	17,634,212	0	17,634,212

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 17/05/24 2:21 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1_tekon17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT ESELON I

MENURUT WILAYAH / AKUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
ESELON I : 13 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 17/05/24 2:21 PM

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1-rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	
1	2	3	4	5	6=4-5 7=6/3
1100	SUMATERA SELATAN				
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,800,000	0	1,800,000 0
	JUMLAH PENDAPATAN (1100) - SUMATERA SELATAN	0	1,800,000	0	1,800,000 0
1200	LAMPUNG				
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	122,580,000	0	122,580,000 0
	JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG	0	122,580,000	0	122,580,000 0
1300	KALIMANTAN BARAT				
425129	Pendapatan dari Perindah tanganan BMN Lainnya	0	6,365,000	0	6,365,000 0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,984,129	0	12,984,129 0
	JUMLAH PENDAPATAN (1300) - KALIMANTAN BARAT	0	19,349,129	0	19,349,129 0
1400	KALIMANTAN TENGAH				
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	10,300,000	0	10,300,000 0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,949,922	0	7,949,922 0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,128,000	0	7,128,000 0
	JUMLAH PENDAPATAN (1400) - KALIMANTAN TENGAH	0	25,377,922	0	25,377,922 0
1500	KALIMANTAN SELATAN				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,681,935	0	1,681,935 0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT ESELON I

MENURUT WILAYAH / AKUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
: 023
: 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANDAR PENGETAHUAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (1500) - KALIMANTAN SELATAN	0	1,681,935	0	1,681,935	0
1600	KALIMANTAN TIMUR					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	44,000,000	0	44,000,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	17,320,000	0	17,320,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1600) - KALIMANTAN TIMUR	0	61,320,000	0	61,320,000	0
1700	SULAWESI UTARA					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,840,000	0	1,840,000	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,967,500	0	11,967,500	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1700) - SULAWESI UTARA	0	13,807,500	0	13,807,500	0
1800	SULAWESI TENGAH					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,462,800	0	5,462,800	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	23,550,000	0	23,550,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1800) - SULAWESI TENGAH	0	29,012,800	0	29,012,800	0
1900	SULAWESI SELATAN					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	13,555,555	0	13,555,555	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	43,430,500	0	43,430,500	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,500,000	0	1,500,000	0

Kode Lap : LRA.P.E.3

Tanggal : 17/05/24 2:21 PM

Halaman : 5

Prg ID : lap_Ira_pen_org_akun es1 -tekon17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT ESELON I

MENURUT WILAYAH / AKUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I

: 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
: 13 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	
1	JUMLAH PENDAPATAN (1900) - SULAWESI SELATAN	3	4	5	6=4-5
		0	58,486,055	0	58,486,055
2000	SULAWESI TENGGARA				7=6/3
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,555	0	4,555
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20,962,500	0	20,962,500
	JUMLAH PENDAPATAN (2000) - SULAWESI TENGGARA	0	20,967,055	0	20,967,055
2200	BALI				0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	13,365,554	0	13,365,554
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,000,000	0	7,000,000
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9,618,153	0	9,618,153
	JUMLAH PENDAPATAN (2200) - BALI	0	29,983,707	0	29,983,707
2300	NUSA TENGGARA BARAT				0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	78,095,630	0	78,095,630
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,960,000	0	4,960,000
	JUMLAH PENDAPATAN (2300) - NUSA TENGGARA BARAT	0	83,055,630	0	83,055,630
2400	NUSA TENGGARA TIMUR				0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	51,174,550	0	51,174,550
	JUMLAH PENDAPATAN (2400) - NUSA TENGGARA TIMUR	0	51,174,550	0	51,174,550

Kode Lap : LRA.P.E.3

Tanggal : 17/05/24 2:21 PM

Halaman : 6

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 –rekon17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT ESelon I

MENURUT WILAYAH / AKUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESelon I

: 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
: 13 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	
1	2	3	4	5	6=4-5
2500	PAPUA				7=6/3
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	7,299,999	0	7,299,999
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,600,033	0	4,600,033
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,082,000	0	3,082,000
	JUMLAH PENDAPATAN (2500) - PAPUA	0	14,982,032	0	14,982,032
2600	BENGKULU				
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	7,777,777	0	7,777,777
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,830,000	0	1,830,000
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,617,600	0	7,617,600
	JUMLAH PENDAPATAN (2600) - BENGKULU	0	17,225,377	0	17,225,377
2800	MALUKU UTARA				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,100,022	0	1,100,022
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	193,500	0	193,500
	JUMLAH PENDAPATAN (2800) - MALUKU UTARA	0	1,293,522	0	1,293,522
2900	BANTEN				
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,045,000	0	4,045,000
	JUMLAH PENDAPATAN (2900) - BANTEN	0	4,045,000	0	4,045,000

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 17/05/24 2:21 PM
Halaman : 7

Prg ID : lap_jra_pem_org_akun_es1 –rekon17

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT ESelon I

MENURUT WILAYAH / AKUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
ESelon I : 13
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
3000	BANGKA BELITUNG					
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	470	0	470	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3000) - BANGKA BELITUNG	0	470	0	470	0
3100	GORONTALO					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	15,081,010	0	15,081,010	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3100) - GORONTALO	0	15,081,010	0	15,081,010	0
3200	KEPULAUAN RIAU					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,290,000	0	4,290,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3200) - KEPULAUAN RIAU	0	4,290,000	0	4,290,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	185,750,000	4,085,276,071	0	4,085,276,071	4,34

Kode Lap : LRA.P.E.3

Tanggal : 17/05/24 2:21 PM

Halaman : 8

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1_rekon17

Lampiran 14

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Menurut Sumber Dana/Jenis

Belanja/Akun UAPPA Eselon I Badan

Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa Tahun 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

TINGKAT ESELON I
MENUJU SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
UNIT ESELON I : 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 17/05/24 2:25 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1 -

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=7
01 RUPAH MURNI								
51 BELANJA PEGAWAI								
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	55,569,662,000	53,828,822,000	53,351,853,200	10,240,800	53,341,612,400	98,09	487,209,600
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,390,000	1,254,000	886,757	23,410	843,347	67,25	410,653
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,467,591,000	3,707,414,000	3,652,269,030	3,320,880	3,648,948,150	98,42	58,485,850
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,274,400,000	1,190,776,000	1,153,843,052	0	1,153,843,052	96,9	36,932,948
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	814,465,000	819,880,000	811,220,000	1,762,000	809,458,000	98,73	10,422,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,116,509,000	1,382,216,000	912,216,000	38,620,000	873,586,000	63,2	508,620,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	287,394,000	126,613,000	98,006,066	0	99,006,066	78,2	27,606,934
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,191,012,000	3,090,268,000	3,053,154,780	0	3,053,154,780	98,8	37,114,220
511129	Belanja Uang Makan PNS	9,934,250,000	7,091,825,000	6,590,437,000	0	6,590,437,000	92,53	501,388,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	195,545,000	166,445,000	166,445,000	0	166,445,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Untuk PNS	2,530,304,000	2,543,780,000	2,483,115,000	5,195,875	2,477,919,325	97,41	65,860,875
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	9,367,000	8,899,500	0	8,899,500	95,01	487,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	2,000	188	0	188	9,4	1,812
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	220,000	217,260	0	217,260	98,75	2,740
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	2,205,000	1,110,000	0	1,110,000	50,34	1,095,000
512211	Belanja Uang Lembur	1,625,672,000	1,557,612,000	1,444,937,000	0	1,444,937,000	92,77	112,675,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	72,366,147,000	68,186,902,000	69,094,785,403	0	69,094,785,403	98,87	92,116,597
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	14,520,000	14,501,326	0	14,501,326	98,87	18,674
JUMLAH BELANJA PEGAWAI				155,434,341,000	142,721,742,000	59,162,765	98,7	1,822,082,673
52 BELANJA BARANG								
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	14,719,010,000	16,615,623,000	16,384,268,616	0	16,384,268,616	98,61	231,354,384
521113	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	12,000,000	21,001,000	21,000,342	0	21,000,342	100	658
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	383,310,000	203,940,000	177,389,157	0	177,389,157	87,23	26,042,843
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	8,631,228,000	8,874,759,000	8,700,289,000	1,140,000	8,699,149,000	98,02	175,610,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,753,500,000	1,569,624,000	1,858,636,836	0	1,858,636,836	99,41	10,987,164
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	184,834,000	31,486,000	30,358,078	0	30,358,078	98,42	1,127,922
521211	Belanja Bahan	29,281,732,000	34,585,350,000	33,463,792,171	11,582,087	33,452,210,104	98,78	1,113,139,896
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,565,980,000	4,389,447,000	4,304,405,000	199,500	4,304,205,500	97,84	95,241,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8,754,674,000	7,777,714,000	7,590,215,469	8,189,000	7,582,026,469	97,48	195,687,531
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	7,834,200,000	13,090,060,000	13,078,231,700	19,332,581	13,058,889,119	98,76	31,160,881
521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	26,200,000	0	0	0	0	0	0
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	126,655,000	51,955,000	57,955,000	0	51,955,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakompiabel	0	40,019,000	39,971,050	0	39,971,050	98,88	47,950
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,165,361,000	4,881,040,000	4,623,310,859	0	4,623,310,859	98,77	57,229,141
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	82,500,000	200,000,000	199,778,000	0	199,778,000	98,89	222,000
522111	Belanja Langganan Listrik	3,242,398,000	3,870,937,000	3,809,559,769	6,828,598	3,802,731,170	98,24	68,205,830
522112	Belanja Langganan Telepon	722,413,000	649,875,000	616,287,341	1,739,100	614,548,241	94,56	35,324,759

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023
UNIT ESELON I : 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 17/05/24 22:25 PM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_sd_ib_akun_es1 -

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			REALISASI ANGGARAN	% SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522113	Belanja Langganan Air	258,687,000	225,500,000	218,219,927	0	218,219,927	96.77	7,280,073
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	881,200,000	1,283,754,000	1,273,005,506	0	1,273,005,506	99.16	10,748,494
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	135,596,000	58,319,000	41,992,960	0	41,992,960	72.01	16,326,040
522131	Belanja Jasa Konsultan	90,000,000	90,000,000	89,843,400	0	89,843,400	98.83	156,600
522141	Belanja Sewa	6,323,045,000	6,099,853,000	6,038,859,980	6,421,287	6,033,438,693	98.91	66,414,307
522151	Belanja Jasa Profesi	22,451,860,000	19,820,377,000	19,376,326,000	31,644,400	19,344,681,600	97.6	475,695,400
522191	Belanja Jasa Lainnya	38,798,640,000	37,675,289,000	37,334,408,811	12,750,000	37,321,658,811	99.06	353,640,189
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	218,897,000	31,850,000	26,860,000	0	29,600,000	92.94	2,250,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,574,721,000	9,630,526,000	9,534,976,771	13,684,282	9,521,312,489	98.87	109,213,511
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	101,200,000	113,657,000	112,391,590	0	112,391,590	98.89	1,265,410
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,358,456,000	5,149,768,000	4,905,110,813	8,705,386	4,896,405,427	95.08	253,363,573
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,000,000	1,913,000	1,912,500	0	1,912,500	99.97	500
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,519,000	131,473,000	131,198,795	0	131,198,795	99.79	273,205
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	47,78,756,000	554,537,000	516,810,534	0	516,810,534	93.2	37,726,466
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	38,800,000	71,986,000	71,975,000	0	71,975,000	99.97	21,000
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	48,000,000	117,653,000	117,651,380	0	117,651,380	100	1,820
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,1628,884,000	38,849,705,000	37,945,459,245	463,32,398	37,485,156,847	96.49	1,364,548,153
524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1,631,886,000	1,753,018,000	1,533,549	3,767,247	1,530,085,302	87.28	222,932,698
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,033,887,000	9,387,063,000	9,321,590,800	26,850,000	9,294,740,800	99.02	92,322,200
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39,095,774,000	55,836,203,000	55,196,723,555	395,971,351	54,800,752,204	98.15	1,035,450,796
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	54,215,267,000	47,587,348,000	46,760,585,987	415,98,161	46,344,587,826	97.39	1,242,760,174
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	5,888,299,000	3,670,590,000	3,612,414,099	57,87,340	3,554,542,759	96.84	116,047,241
524212	Belanja Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri	0	104,760,000	98,982,000	0	98,982,000	94.39	5,878,000
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	324,100,000	315,300,000	313,920,000	0	313,920,000	99.56	1,380,000
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	136,000,000	136,000,000	135,425,550	0	135,425,550	99.58	574,450
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	8,190,000,000	0	0	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA BARANG		329,515,469,000	335,539,291,000	329,667,095,150	1,485,956,700	328,181,138,441	98.22	4,486,239,141
BELANJA MODAL								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,873,215,000	13,623,830,000	13,582,274,697	0	13,582,274,697	99.69	41,555,303
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	1,360,000	680,000	680,000	0	680,000	100	0
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56,307,615,000	52,727,584,000	52,726,779,293	0	52,726,779,293	100	804,707
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	88,980,000	65,900,000	65,900,000	0	65,900,000	100	0
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1,165,711,000	1,165,711,000	1,165,709,568	0	1,165,709,568	100	1,432
533118	Belanja Modal Peralihan Gedung dan Bangunan	319,324,000	356,918,000	347,764,867	490,000	347,764,867	97.3	9,643,133
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	33,680,000	33,680,000	0	33,680,000	100	0
536111	Belanja Modal Lainnya	189,500,000	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT ESELON I : 13 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
JUMLAH BELANJA MODAL		73,378,812,000	67,974,303,000	67,922,786,425	490,000	67,922,298,425	99,92	51,024,575
JUMLAH RUPIAH MURNI		558,328,622,000	548,335,336,000	540,430,380,137	1,545,609,474	538,884,770,863	98,56	6,359,346,389
PNBP								
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	19,932,000	1,282,000	0	0	0	0	1,282,000
522151	Belanja Jasa Profesi	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	132,030,000	83,587,190	15,051,309	68,535,881	51,91	63,494,119
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	119,380,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	139,312,000	83,587,190	15,051,309	68,535,881	60	40,673,501	
	JUMLAH PNBP	558,467,934,000	548,474,946,000	540,513,967,327	1,560,680,783	538,953,306,544	98,55	6,400,019,890
	TOTAL							

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 17/05/24 2:25 PM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_sd_ib_akun_es1 -

Lampiran 15

Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Dalam Rangka Covid-19 Menurut Jenis

Belanja/Akun Tahun 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESelon I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESelon I

: 023
: 13
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BAGAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Kode Lap : LRAB.S.2

Tanggal : 17/05/24 2:08 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_iria_bel_akun_covid_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SID BULAN INI	PENGEMBALIAN SID BULAN INI	JUMLAH NETTO SID BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4/7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
5211131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	184,834,000	31,486,000	30,358,078	0	30,358,078	96,42	1,127,922
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	184,834,000	31,486,000	30,358,078	0	30,358,078	96,42	1,127,922
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	126,855,000	51,955,000	51,955,000	0	51,955,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	126,855,000	51,955,000	51,955,000	0	51,955,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
5221192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	218,897,000	31,850,000	29,600,000	0	29,600,000	92,94	2,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	218,897,000	31,850,000	29,600,000	0	29,600,000	92,94	2,250,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52							
	JUMLAH BELANJA							
		530,586,000	115,291,000	111,913,078	0	111,913,078	97,07	3,377,922

Lampiran 16
Temuan dan Tindak Lanjut Temuan
BPK Tahun 2022

**TEMUAN DAN TINDAK LANJUT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022**

No	Nama Satker	Temuan Pemeriksaan	Nilai Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Progress
Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan						
1		Pengelolaan Pendapatan pada Satuan Kerja PNBP Belum Sesuai Ketentuan Terkait Pengelolaan PNBP dan Pengelolaan BMN	BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek untuk a. menginstruksikan Irjen dan Kepala BPP Bahasa, Dirjen GTK, Dirjen Diktristek, dan Dirjen Diksi agar memerintahkan masing-masing satker Pengelola PNBP untuk membuat SOP Pengelolaan Pendapatan yang mengatur antara lain terkait:	- Surat Menteri Nomor 23784/M/PK.A/RH/SKU.08/2023 tanggal 21 Juli 2023 Hal tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Sistem Pengendalian Intern dan Perundang-undangan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - Surat Kepala Badan Nomor 0997/I/W.S.01/05/2023 tanggal 11 Agustus 2023 kepada Kepala Satuan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Batas waktu perpanjangan atas perjanjian kerjasama pemanfaatan BMN yang akan berakhir; 2) Batas waktu pembayaran atas perjanjian kerjasama dan pemanfaatan BMN serta memasukkan klausul sanksi atas keterlambatan pembayaran; 3) Pihak yang berkewajiban 	

	BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek untuk b. menginstruksikan Kepala BPP Bahasa menginstruksikan Kepala Pusbangdin untuk menagih biaya royalti KBBI Edisi ke V Cetakan ketiga yang belum diterima dari PT BP;	- Surat Menteri Nomor 23784/M/PK.A/RHS/KU.08/2023 tanggal 21 Juli 2023 Hal tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - Surat Kepala Badan Nomor 0996//WS.01.05/2023 tanggal 11 Agustus 2023 kepada Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

2.511.000	BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek untuk c. menginstruksikan Kepala BPP Bahasa, Dirjen GTK, Dirjen Diksi untuk memerintahkan saitzer terkait agar melakukan penyetoran ke Kas Negara atas kurang setor PNBP seluruhnya sebesar Rp55.762.890,00 dengan perincian sebagai berikut. 1) BB DIY berupa pembayaran royalti yang dipotong PPh pasal 23 sebesar Rp2.511.000,00; dan 2) POLNEP berupa kerjasama pengelolaan tambak sebesar Rp44.251.890,00 dan pendapatan sewa lahan parkir sebesar Rp9.000.000,00.	<p>- Surat Menteri Nomor 23784/M/PK.A/RHS/KU.08/2023 tanggal 21 Juli 2023 Hal tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</p> <p>- Surat Kepala Badan Nomor 996/I/WS.01.05/2023 tanggal 11 Agustus 2023 kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta</p> <p>- Bukti setor tanggal 14 Agustus 2023 Nomor NTPN D615655DF0B0G9C7 Nomor NTB 936601183955 senilai Rp2.511.000,00</p>

2	Pengelolaan Belanja Pegawai pada Kemendikbudristek Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek untuk menginstruksikan Kepala BPP Bahasa agar memerintahkan bendahara terkait dalam melakukannya pemotongan PPh 21 sesuai dengan ketentuan dan membayar gaji pegawai lebih cermat	- Surat Menteri Nomor 23784/MPK.A/RHS/KU.08/2023 tanggal 21 Juli 2023 Hal tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - Surat Kepala Badan Nomor 0994/I/WS.01.05/2023 tanggal 10 Agustus 2023 kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja
3	Kekurangan Pemotongan PPH Pasal 23 di Lingkungan Kemendikbudristek Sebesar Rp3.680.342.350.00	BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek untuk menginstruksikan Pejabat Eselon I pada seluruh unit utama agar KPA masing-masing satker memerintahkan Bendahara Pengeluaran/BPP memungut PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perundangan.	- Surat Menteri Nomor 23784/MPK.A/RHS/KU.08/2023 tanggal 21 Juli 2023 Hal tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - Surat Kepala Badan Nomor 0993/I/WS.01.05/2023 tanggal 10 Agustus 2023 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja

4	Belanja Pemeliharaan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Sebesar Rp489.726.095,68	<p>BPK merekomendasikan kepada Mendiikbudristek untuk menginstruksikan Dirjen Diktristek, Irjen, Kepala BPP Bahasa dan Dirjen PAUD Dasmen agar pimpinan satker terkait memerintahkan masing-masing KPA untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa</p> <p>- Surat Menteri Nomor 23784/MPKA/RHS/KU.08/2023 tanggal 21 Juli 2023 Hal tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</p> <p>- Surat Kepala Badan Nomor 0991/I/WS.01.05/2023 tanggal 10 Agustus 2023 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</p>
---	---	---

		<p>- Surat Menteri Nomor 23784/MPK.A/RHS/KU.08/2023 tanggal 21 Juli 2023 Hal tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</p> <p>- Surat Kepala Badan Nomor 0992/I/WS.01.05/2023 tanggal 10 Agustus 2023 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja</p>
BPK merekomendasikan kepada Mendikbudristek untuk menginstruksikan Dirjen Diktristek, Irjen, Kepala BPP Bahasa dan Dirjen PAUD Dasmen agar pimpinan satker terkait memerintahkan masing-masing PPK untuk lebih cermat dalam proses serah terima hasil pekerjaan, dan meningkatkan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;		

Lampiran 17

Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal

Satker Pusat dan Daerah di lingkungan

Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa Tahun 2023 dengan KPPN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA III

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 137544
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	127,050,657,000	127,050,657,000	0
2	Belanja	125,434,934,046	125,434,934,046	0
3	Pengembalian Belanja	-555,617,893	-555,617,893	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	136,275,871	136,275,871	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KPPN YOGYAKARTA

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 414562
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,461,624,000	8,461,624,000	0
2	Belanja	8,397,737,759	8,397,737,759	0
3	Pengembalian Belanja	-5,664,368	-5,664,368	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	16,456,589	16,456,589	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI SULAWESI SELATAN
KPPN MAKASSAR I

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 414571
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	10,460,990,000	10,460,990,000	0
2	Belanja	10,392,095,429	10,392,095,429	0
3	Pengembalian Belanja	-14,838,025	-14,838,025	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	58,486,055	58,486,055	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 29-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI BALI
KPPN DENPASAR

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 414587
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	10,798,155,000	10,798,155,000	0
2	Belanja	10,417,700,008	10,417,700,008	0
3	Pengembalian Belanja	-42,278,624	-42,278,624	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	29,983,707	29,983,707	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 29-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA III

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 419007
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	38,608,294,000	38,608,294,000	0
2	Belanja	37,471,445,097	37,471,445,097	0
3	Pengembalian Belanja	-19,334,782	-19,334,782	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	54,028,411	54,028,411	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA III

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 419008
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	39,900,445,000	39,900,445,000	0
2	Belanja	38,406,355,031	38,406,355,031	0
3	Pengembalian Belanja	-310,083,124	-310,083,124	0
4	Estimasi Pendapatan	185,750,000	185,750,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	2,825,546,439	2,825,546,439	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI SUMATERA BARAT
KPPN PADANG

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 615101
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,719,361,000	6,719,361,000	0
2	Belanja	6,606,946,519	6,606,946,519	0
3	Pengembalian Belanja	-41,322,044	-41,322,044	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	48,982,154	48,982,154	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KPPN BANJARMASIN

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 615118
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,689,654,000	8,689,654,000	0
2	Belanja	8,560,957,269	8,560,957,269	0
3	Pengembalian Belanja	-4,692,809	-4,692,809	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,681,935	1,681,935	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 25-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI PAPUA
KPPN JAYAPURA

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 615122
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	9,091,607,000	9,091,607,000	0
2	Belanja	9,091,314,353	9,091,314,353	0
3	Pengembalian Belanja	-5,520,925	-5,520,925	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	14,982,032	14,982,032	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 19-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI JAWA TIMUR
KPPN SIDOARJO

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 615139
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	13,465,148,000	13,465,148,000	0
2	Belanja	13,312,630,036	13,312,630,036	0
3	Pengembalian Belanja	-450,578	-450,578	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	158,274,800	158,274,800	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI JAWA BARAT
KPPN BANDUNG I

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 621672
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	12,148,711,000	12,148,711,000	0
2	Belanja	11,946,538,742	11,946,538,742	0
3	Pengembalian Belanja	-26,100,367	-26,100,367	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	13,335,257	13,335,257	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI JAWA TENGAH
KPPN SEMARANG I

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 621686
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	16,034,075,000	16,034,075,000	0
2	Belanja	15,952,059,337	15,952,059,337	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	151,798,558	151,798,558	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN MEDAN I

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 621690
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	10,307,097,000	10,307,097,000	0
2	Belanja	10,237,093,726	10,237,093,726	0
3	Pengembalian Belanja	-8,266,188	-8,266,188	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	14,112,343	14,112,343	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI RIAU
KPPN PEKANBARU

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 621708
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	7,244,457,000	7,244,457,000	0
2	Belanja	7,235,847,879	7,235,847,879	0
3	Pengembalian Belanja	-1,470,000	-1,470,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	62,497,139	62,497,139	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KPPN BANDA ACEH

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 621712
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,997,668,000	8,997,668,000	0
2	Belanja	8,878,676,714	8,878,676,714	0
3	Pengembalian Belanja	-12,547,244	-12,547,244	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	10,819,329	10,819,329	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
KPPN PALEMBANG

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 621729
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	9,482,160,000	9,482,160,000	0
2	Belanja	9,242,852,796	9,242,852,796	0
3	Pengembalian Belanja	-839	-839	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,800,000	1,800,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	218,867,283	218,867,283	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KPPN PONTIANAK

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 621733
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,541,085,000	6,541,085,000	0
2	Belanja	6,524,311,077	6,524,311,077	0
3	Pengembalian Belanja	-4,950,051	-4,950,051	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	19,349,129	19,349,129	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI SULAWESI TENGAH
KPPN PALU

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 621740
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	7,507,028,000	7,507,028,000	0
2	Belanja	7,249,118,295	7,249,118,295	0
3	Pengembalian Belanja	-6,405,468	-6,405,468	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	29,012,800	29,012,800	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KPPN PALANGKARAYA

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 621754
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	10,675,029,000	10,675,029,000	0
2	Belanja	10,641,317,107	10,641,317,107	0
3	Pengembalian Belanja	-248	-248	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	25,377,922	25,377,922	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 29-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI SULAWESI UTARA
KPPN MANADO

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 621761
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,472,858,000	5,472,858,000	0
2	Belanja	5,447,186,395	5,447,186,395	0
3	Pengembalian Belanja	-4,631,096	-4,631,096	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	13,807,500	13,807,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI LAMPUNG
KPPN BANDAR LAMPUNG

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 660066
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,283,236,000	8,283,236,000	0
2	Belanja	8,218,014,108	8,218,014,108	0
3	Pengembalian Belanja	-686	-686	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	122,580,000	122,580,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI JAMBI
KPPN JAMBI

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 660070
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,689,041,000	6,689,041,000	0
2	Belanja	6,628,315,643	6,628,315,643	0
3	Pengembalian Belanja	-3,665,902	-3,665,902	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	17,634,212	17,634,212	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KPPN SAMARINDA

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 660087
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,112,414,000	8,112,414,000	0
2	Belanja	7,981,460,891	7,981,460,891	0
3	Pengembalian Belanja	-1,109	-1,109	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	61,320,000	61,320,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 28-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KPPN MATARAM

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 660091
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	9,050,470,000	9,050,470,000	0
2	Belanja	9,087,316,541	9,087,316,541	0
3	Pengembalian Belanja	-58,320,086	-58,320,086	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	83,055,630	83,055,630	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KPPN KENDARI

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 660109
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selsih
1	Pagu Belanja	7,019,877,000	7,019,877,000	0
2	Belanja	6,967,635,772	6,967,635,772	0
3	Pengembalian Belanja	-24,094,420	-24,094,420	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	20,967,055	20,967,055	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 29-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI BANGKA BELITUNG
KPPN PANGKAL PINANG

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 680530
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,348,751,000	4,348,751,000	0
2	Belanja	4,312,362,973	4,312,362,973	0
3	Pengembalian Belanja	-7,820,000	-7,820,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	470	470	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 25-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI BENGKULU
KPPN BENGKULU

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 680544
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,829,059,000	6,829,059,000	0
2	Belanja	6,749,322,335	6,749,322,335	0
3	Pengembalian Belanja	-364	-364	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	17,225,377	17,225,377	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI BANTEN
KPPN SERANG

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 680551
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,408,907,000	6,408,907,000	0
2	Belanja	6,386,867,829	6,386,867,829	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,045,000	4,045,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 29-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI GORONTALO
KPPN GORONTALO

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 680565
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	29,911,447,000	29,911,447,000	0
2	Belanja	29,786,011,805	29,786,011,805	0
3	Pengembalian Belanja	-7,818,740	-7,818,740	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	15,081,010	15,081,010	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI MALUKU UTARA
KPPN TERNATE

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 680572
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,175,924,000	8,175,924,000	0
2	Belanja	8,146,821,360	8,146,821,360	0
3	Pengembalian Belanja	-4,770,864	-4,770,864	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,293,522	1,293,522	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI MALUKU
KPPN AMBON

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 680586
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	38,316,730,000	38,316,730,000	0
2	Belanja	38,239,684,782	38,239,684,782	0
3	Pengembalian Belanja	-24,474,335	-24,474,335	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 29-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KPPN TANJUNG PINANG

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 680590
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,418,191,000	5,418,191,000	0
2	Belanja	5,319,099,524	5,319,099,524	0
3	Pengembalian Belanja	-6,300,326	-6,300,326	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,290,000	4,290,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KPPN KUPANG

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 680608
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	7,489,678,000	7,489,678,000	0
2	Belanja	7,333,745,788	7,333,745,788	0
3	Pengembalian Belanja	-286	-286	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	51,174,550	51,174,550	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22-JAN-24





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI JAWA BARAT
KPPN BOGOR

**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 690519
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	34,764,820,000	34,764,820,000	0
2	Belanja	33,910,190,361	33,910,190,361	0
3	Pengembalian Belanja	-359,218,992	-359,218,992	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,275	1,275	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24



Lampiran 18

Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data

Modul Persediaan, Modul Aset, dan

Modul GLP per 31 Desember 2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564; Faksimile 4750407
Laman www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL
DATA MODUL PERSEDIAAN, MODUL ASET DAN MODUL GLP
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PERIODE 31 DESEMBER 2023 AUDITED**

Pada hari ini Jumat tanggal 8 bulan Mei tahun 2024 bertempat di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Hapsari Wirastuti S.

NIP : 198206052015042002

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kompilator Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : Dede Saputra

NIP : 198907152015041003

Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kompilator Modul GLP pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada Lingkup Internal Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I 31 Desember Tahun Anggaran 2023 dengan cara membandingkan Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul GLP dari aplikasi SAKTI dengan hasil sebagai berikut.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220

Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564; Faksimile 4750407

Laman www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

III. Tabel Kesepakatan

A. Saldo Awal per 31 Desember 2022 *Audited*

Uraian Akun		Laporan BMN	Laporan Keuangan	Selisih
A	ASET LANCAR	1.932.869.402	1.932.869.402	-
1	Persediaan	1.932.869.402	1.932.869.402	-
B	ASET TETAP	1.218.487.890.931	1.218.487.890.931	-
1	Tanah	892.768.938.210	892.768.938.210	-
2	Peralatan dan Mesin	147.411.157.040	147.411.157.040	-
3	Gedung dan Bangunan	335.724.660.464	335.724.660.464	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.862.923.450	4.862.923.450	-
5	Aset Tetap Lainnya	8.286.679.684	8.286.679.684	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.924.747.073	4.924.747.073	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(175.491.214.990)	(175.491.214.990)	-
C	ASET LAINNYA	5.824.440.324	5.824.440.324	-
1	Aset Tak Berwujud	2.337.365.447	2.337.365.447	-
2	Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	-	-	-
3	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(2.077.834.385)	(2.077.834.385)	-
4	Aset Lain-Lain/Aset Yang Tidak Digunakan	18.896.450.736	18.896.450.736	-
5	Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan	(12.386.342.427)	(12.386.342.427)	-
6	Akumulasi Amortisasi ATB yang tidak digunakan	(945.199.047)	(945.199.047)	-
D	Total Intrakomptabel (A+B+C)	1.226.245.200.657	1.226.245.200.657	-
E	Ekstra Komptabel	516.959.487	-	516.959.487
1	Peralatan dan Mesin	1.970.931.568	-	1.970.931.568
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
4	Aset Lain-Lain/Aset Yang Tidak Digunakan	77.661.500	-	77.661.500
5	Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel	(1.531.633.581)	-	(1.531.633.581)
F	Total Gabungan (D+E)	1.226.762.160.144	1.226.245.200.657	516.959.487

Selisih sebesar **Rp516.959.487,00** merupakan Aset Ekstrakomptabel yang hanya tercatat di Laporan BMN.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220

Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564; Faksimile 4750407

Laman www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

B. Saldo Akhir per 31 Desember 2023

Uraian Akun		Modul Persediaan dan Aset	Modul GLP	Selisih
A	ASET LANCAR	2.080.453.885	2.080.453.885	-
117111	Barang Konsumsi	592.819.228	592.819.228	-
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	30.478.642	30.478.642	-
117121	Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	-	-
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
117124	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	-	-	-
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.456.461.675	1.456.461.675	-
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam	-	-	-
117131	Bahan Baku	396.340	396.340	-
117199	Persediaan Lainnya	298.000	298.000	-
B	ASET TETAP	1.258.772.062.870	1.258.772.062.870	-
131111	Tanah	892.987.805.493	892.987.805.493	-
132111	Peralatan dan Mesin	158.307.919.167	158.307.919.167	-
133111	Gedung dan Bangunan	334.999.285.032	334.999.285.032	-
134111	Jalan dan Jembatan	651.400.000	651.400.000	-
134112	Irigasi	1.364.143.000	1.364.143.000	-
134113	Jaringan	2.777.455.750	2.777.455.750	-
135111	Aset Tetap Renovasi	-	-	-
135121	Aset Tetap Lainnya	8.324.566.234	8.324.566.234	-
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	50.506.171.610	50.506.171.610	-
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(130.143.177.573)	(130.143.177.573)	-
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(58.748.641.100)	(58.748.641.100)	-
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(648.645.858)	(648.645.858)	-
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(437.911.810)	(437.911.810)	-
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(981.649.075)	(981.649.075)	-
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(186.658.000)	(186.658.000)	-
139111	Aset Tetap Yang Belum Diregister	-	-	-



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220

Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564; Faksimile 4750407

Laman www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

Uraian Akun		Modul Persediaan dan Aset	Modul GLP	Selisih
C	ASET LAINNYA	11.622.697.260	11.622.697.260	-
162121	Hak Cipta	-	-	-
162141	Paten	-	-	-
162151	Software	1.978.126.947	1.978.126.947	
162161	Lisensi	6.656.785.859	6.656.785.859	
162171	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	363.781.000	363.781.000	
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Penggerjaan	-	-	-
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	6.582.580.210	6.582.580.210	
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5.164.992.380	5.164.992.380	
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(5.788.402.789)	(5.788.402.789)	-
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	-	-	-
169314	Akumulasi Amortisasi Paten	-	-	-
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1.903.766.885)	(1.903.766.885)	-
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(531.497.582)	(531.497.582)	-
169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(292.380.000)	(292.380.000)	-
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(607.521.880)	(607.521.880)	-
D	Total Intrakomptabel (A+B+C)	1.272.475.214.015	1.272.475.214.015	-
E	Ekstra Komptabel	391.716.239		391.716.239
132111	Peralatan dan Mesin	2.019.088.028	-	2.019.088.028
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.627.371.789)	-	(1.627.371.789)
137111	Gedung dan Bangunan	-	-	-
137211	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin			-
135121	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya			-
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	50.046.500	-	50.046.500
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(50.046.500)	-	(50.046.500)
F	Total Gabungan (D+E)	1.272.866.930.254	1.272.475.214.015	391.716.239

Selisih sebesar **Rp391.716.239,00** merupakan Aset Ekstrakomptabel yang hanya tercatat di Laporan BMN.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564; Faksimile 4750407
Laman www.badanbahasa.kemdikbud.go.id

IV. Informasi Lainnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa periode 31 Desember Tahun 2023 *Audited*, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Mei 2024

Konsolidator E1 Modul Persediaan dan Aset

Hapsari Wirastuti S.
NIP 198206052015042002

Konsolidator E1 Modul GLP
(Pelaporan Keuangan)

Dede Saputra
NIP 198907152015041003

Mengetahui
Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

Hafidz Muksin
NIP 197001221990011001